Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim,S.H.,M.Si.

MENUJU PEMEKARAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

VISIONER

Prospek dan Tantangan

MENUJU PEMEKARAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR VISIONER

PROSPEK DAN TANTANGAN

MENUJU PEMEKARAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR VISIONER

PROSPEK DAN TANTANGAN

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.

Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MENUJU PEMEKARAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR VISIONER; Prospek dan Tantangan

I. Otonomi Daerah   II. Kab. Indragiri Hilir   III. Research

MENUJU PEMEKARAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR VISIONER

PROSPEK DAN TANTANGAN

Penulis:

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

Editor/ Penyunting:

Minan Nuri Rohman

Cover & Layout:

st. Navisah

Penerbit:

Trussmedia Grafika
Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 0821 34 797 663
Email: one_trussmedia@yahoo.com

Cetakan I, Desember 2014
xxviii + 316 ; 14 x 20,5 cm
ISBN: 978-602-0992-36-5

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang Esa atas selesainya buku ini yang merupakan Hasil Kajian Rencana Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran, Kabupaten Indragiri Selatan dan Kota Indragiri yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah administratif Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam buku ini penulis akan memaparkan berbagai data, hasil kajian dan analisis atas hasil kajian mengenai (tingkat) kelayakan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran, Kabupaten Indragiri Selatan (INSEL) dan Kota Indragiri, sesuai dengan kreteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dengan pendekatan beberapa indikator yang dikaji dengan pertimbangan (1) Kependudukan, (2) Kemampuan Ekonomi, (3) Sosial Potensi Daerah, (4) Kemampuan Keuangan, (5) Sosial Budaya, (6) Sosial Politik, (7) Luas Daerah, (8) Pertahanan, (9) Keamanan, (10) Kesejahteraan Masyarakat, (11) Rentang Kendali dan (12) Pertimbangan Lain.

Semua ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kemampuan calon Kabupaten Indragiri

Hilir Pasca Pemekaran, Kabupaten Indragiri Selatan dan Kota Indragiri dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran. Penilaian atas tingkat kemampuan ini sejalan dengan maksud dan tujuan otonomisasi daerah-daerah di Indonesia, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari apa yang diharapkan, untuk itu kami selalu terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan yang akan datang. Tidak lupa, ucapan terimakasih kami sampaikan khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah banyak membantu dalam penyelesaian buku ini, baik dalam hal materiil maupun data-data yang kami butuhkan serta pihak-pihak lain yang telah turut serta dalam penyusunan buku ini.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi kami, Tim Pengkajian Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk mengkaji apakah rencana pembentukan daerah otonom baru ini layak dan direkomendasikan untuk menjadi daerah otonom baru, dan bagi pihak-pihak yang melakukan pengkajian mengenai kelayakan rencana Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Desember 2014

PENULIS

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

KABUPATEN INDRAGIRI PASCA PEMEKARAN

KABUPATEN INDRAGIRI SELATAN

KOTA INDRAGIRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat pada era reformasi, muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru (baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota) yang terpisah dan daerah induknya. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah, balk dinamika politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonom baru, masyarakat di wilayah tersebut berharap dapat memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika keinginan masyarakat di suatu wilayah untuk menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mendukung implementasi otonomi daerah pemerintah Pusat telah mempersiapkan berbagai peraturan perundangan, antara lain undangundang dengan Iahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pada Pasal 4 ayat (2) dinyatakan pula bahwa daerah-daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk pembentukan daerah otonom baru, balk yang berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, maka agar daerah otonom baru memiliki kelayakan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak membawa dampak yang merugikan bagi daerah induknya, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat di tingkat bawah serta berbagai peraturan perundangan yang ada, beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ingin memisahkan did dari daerah kabupaten induknya untuk menjadi daerah otonom baru. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi alasan yang mendasari adanya keinginan beberapa kecamatan untuk membentuk kabupaten baru tersebut diantaranya adalah ***Pertama***, dalam peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini (UU No. 32 Tahun 2004) terdapat kemungkinan yang besar untuk pembentukan daerah kabupaten baru apabila memenuhi berbagai persyaratan. Sesuai dengan UU tersebut maka suatu wilayah dapat mengajukan usulan pemekaran menjadi kabupaten baru. ***Kedua***, tuntutan masyarakat di tingkat bawah untuk memperoleh pelayanan yang Iebih balk dari pemerintah daerah, yakni dengan semakin pendeknya birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jasa publik, ***Ketiga***, keinginan -masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya alam dan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ***Keempat***, meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik.

1.2. Permasalahan Kajian

Pengajuan usul pemekaran kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) menjadi tiga daerah otonom baru yaitu Kabupaten

Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir Selatan dan Kota Indragiri pada prinsipnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat pada khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya karena sesuai dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan diatas. Namun demikian pemekaran suatu kabupaten dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak diinginkan. Permasalahan yang perlu diantisipasi adalah terjadinya perebutan sumber daya, sumber-sumber pendapatan daerah, kekayaan daerah, maupun hutang piutang antara kabupaten bare dengan kabupaten induknya.

Pembentukan suatu daerah otonom baru pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan karena itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu yang harus dihindari adalah jangan sampai kinerja kabupaten induk setelah pemekaran menjadi lebih buruk daripada pemerintah daerah yang baru dibentuk. Apabila hal itu terjadi maka dapat muncul berbagai masalah baru yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah setempat maupun secara nasional.

Atas dasar itu maka usulan pemekaran kabupaten perlu dikaji secara mendalam mengenai kelayakannya. Oleh karena itu pertanyaan pokok dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

a) Apakah calon Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir Selatan, dan Kota Indragiri telah memenuhi persyaratan atau kelayakan untuk menjadi Kabupaten serta menjadi Pemerintah Kota (PEMKO), ditinjau dari aspek kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk,

luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004.

b) Apakah dampak pemekaran Kabupaten Inhil atau pembentukan Kota Indragiri dan Kabupaten Inhil Selatan terhadap kabupaten induknya?

1.3. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui :

a) Kelayakan calon Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Selatan. dan Kota Indragiri untuk menjadi kabupaten bare ditinjau kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya oonomi daerah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

b) Dampak pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Selatan, Kota Indragiri terhadap daerah kabupaten induknya.

c) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi tim pengkajian Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dan Bagi pihak-pihak yang melakukan pengkajian selanjutnya.

1.4. Manfaat Kajian

Hasil pengkajian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan pada akhirnya akan bermanfaat bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk memutuskan layak tidaknya Kabupaten Indragiri Hilir, dimekarkan menjadi 3 wilayah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir Selatan, dan Kota Indragiri.

1.5. Ruang Lingkup Kajian

Ruang Iingkup wilayah kajian adalah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang rencananya akan dimekarkan menjadi 3 daerah otonom baru yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir Selatan dan Kota Indragiri.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan hasil pengkajian ini berisi 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, ruang Iingkup kajian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi mengenai tinjauan teoritis yang meliputi pengertian desentralisasi, alasan dan keuntungan desentralisasi, dasar dan konsekuensi pembentukan daerah otonom serta pendekatan analisis yang digunakan sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode pengkajian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta kriteria kelulusan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS HASIL KAJIAN

Bab ini berisi deskripsi data dan analisis data berdasarkan metode analisis yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan rekomendasi hasil kajian.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENDEKATAN ANALISIS

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Desentralisasi dan otonomi

Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 tersebut maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan

pemerintahan daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara.

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara Iebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan Iangsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya itulah yang dinamakan dengan desentralisasi.

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu "*de*" lepas "*conterum*' pusat. Jadi berdasarkan peristilahannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Istilah "autonomie" berasal dari bahasa Yunani "*autos*" sendiri "*nomos*" undang-undang, berarti "perundangan sendiri (*zelfwetgefing*). Di Indonesia dalam perkembangannya, otonomi itu selain mengandung arti "perundangan" (*regeling*) juga mengandung arti "pemerintahan" (bestuur). Oleh karena itu dalam membahas desentralisasi secara tidak Iangsung membahas pula mengenai otonomi. Karena kedua hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, apalagi dalam kerangka Negara kesatuan. (Sudi Fahmi, 2006).

Desentralisasi acapkali dilawan artikan dengan sentralisasi. Kini, hampir setiap Negara menggagas arti penting dari pada

desentralisasi. Permasalahan desentralisasi dibeberapa Negara Eropa Timur juga menemukan urgensinya setelah pasca tahun 1990. Kemudian desentralisasi juga menjadi wacana menarik dibeberapa Negara Asia Pasipik, seperti Australia, Korea dan Okinawa. Hal yang menjadi pertanyaan apakah desentalisasi itu ?

Dikalangan para ahli pengertian desentralisasi dipahami sebagai pembagian atau penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tingkat pusat atau tingkat atasnya kepada pemerintah daerah. Sedangkan otonomi adalah merupakan kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom, dalam arti penggunaan segala kekuasaan daerah otonom untuk mengurus kepentingan penduduk berdasarkan atas prakarsa sendiri. Bagir Marian, 2001) mengatakan bahwa otonomi mengandung makna kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam kemandiran terkandung kebebasan. Tidak ada kemandirian tanpa kebebasan.

Bertolak dari pendapat mengenai otonomi di atas bahwa pada hakekatnya otonomi sama dengan demokrasi yakni kebebasan sekelompok manusia dalam mencapai kesejahteraan, namun lingkup otonomi lebih sempit dibandingkan demokrasi. Sebagaimana yang telah dikemukan di atas bahwa antara desentralisasi dan otonomi tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi dari suatu mata uang (Gerald S. Maryanov, 1958) maka dalam rangka menjalankan otonomi tidak lepas dad prinsip desentralisasi.

Desentralisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagi kekuasaan *(division of power).* Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan

melalui dua cara, yakni *capital division of power dan* area / *division of power. Capital division of power* merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran trias politica dari Montesque, yakni membagi kekuasaan menjadi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (kekuasaan *eksekutif*), kekuasaan untuk membuat undang-undang (kekuasaan *legislatif*) dan kekuasaan kehakiman (*judikatif*). Sedangkan areal *division of power* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni desentralisasi dan dekonsentrasi.

Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara legal (yang dilandasi hukum) untuk melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa kepada otoritas lokal yang secara formal diakui oleh konstitusi (Maddick, 1963). Sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat (Maddick, 1963).

Pandangan lain mengenai pengertian desentralisasi dikemukakan oleh Chema dan Rondinelli (1983). Menurut mereka desentralisasi .... is the transfer or delegating of planning, decision making or management authority from the central *government and its agencies to field organizations, subbordinate units of government, semi-autonomous public coorporations, area wide or regional authorities, functional authorities, or non governmental organizations* (Chema and Rondinelli, 1983). Tipe desentralisasi ditentukan oleh sejauh mana otoritas atau kekuasaan ditransfer dari pusat dan aransemen institusional (institutional arrangement) atau pengaturan kelembagaan apa yang digunakan untuk melakukan transfer tersebut. Dalam hal ini desentratisasi

dapat berupa yang paling sederhana, yakni penyerahan tugas-tugas rutin pemerintahan hingga ke pelimpahan kekuasaan (devolusi) untuk melaksanakan fungsifungsi tertentu yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat.

Menurut mereka selanjutnya *decentralization* dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni dengan melakukan *functional decentralization* (desentralisasi fungsional) atau dengan cara melaksanakan area/ *decentralizatio*n (desentralisasi teritorial). Desentralisasi fungsional merupakan suatu transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga tertentu yang memiliki fungsi tertentu pula. Misalnya adalah penyerahan kewenangan atau otoritas untuk mengelola suatu jalan tol dari Departemen Pekerjaan Umum kepada suatu BUMN tertentu. Sedangkan desentralisasi teritorial merupakan transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga publik yang beroperasi di dalam batas-batas area tertentu, seperti pelimpahan kewenangan tertentu dad pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota.

Atas dasar kedua cara tersebut maka menurut Chema dan Rondinelli (1983) terdapat empat bentuk desentralisasi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan transfer otoritas, balk dalam melakukan perencanaan maupun pelaksanaan otoritas tersebut, yakni deconcentration (dekonsentrasi), delegation (delegasi), devolution (devolusi), privatization (privatisasi). Dalam desentralisasi, unit-unit lokal dibentuk dengan kekuasaan tertentu yang dimilikinya dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan mana mereka dapat melaksanakan keputusan-keputusannya

sendiri, inisiatifnya sendiri, dan mengadministrasikannya sendiri (Maddick &Adelfer). Pengertian desentralisasi menurut Maddick dan Adelfer mengandung dua elemen yang bertalian, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu.

Menurut Rondinelli, Nellis dan Chema (1983) desentralisasi melahirkan penguatan balk dalam bidang finansial maupun legal (dalam arti mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan) dari unit-unit pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Bagir Manan mengemukakan pendapatnya dengan mendasarkan diri pada pendapatnya Van der Pot bahwa desentralisasi ada dua macam, yakni Desentralisasi territorial yang dijelmakan dalam bentuk badan yang di dasarkan pada wilayah (*gebiedscorporaties*) dan desentralisasi fungsional yang dijelmakan dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.

Dengan desentralisasi maka aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara substansial diserahkan kepada unit-unit pemerintahan daerah, dan dengan demikian berada di luar kontrol pemerintah pusat. Menurut mereka karakteristik utama dari desentralisasi adalah: Pertama, adanya unit-unit pemerintahan lokal yang otonom, independen dan secara jelas dipersepsikan sebagai tingkat pemerintahan yang terpisah dengan mana otoritas yang diberikan kepadanya dengan hanya sedikit atau malah tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. Kedua, pemerintah lokal yang memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam mana mereka melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan

publik. Ketiga, pemerintah lokal yang memiliki status sebagai korporat dan memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Dengan demikian desentralisasi melahirkan daerah otonom. Daerah otonom memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah berada di luar hirarki organisasi pemerintah pusat, bebas bertindak, tidak berada dibawah pengawasan langsung pemerintah pusat, bebas berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat, tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, mengandung integritas sistem, memiliki batasbatas tertentu *(boundaries),* serta memiliki identitas.

Sementara itu menurut Smith (1967) desentralisasi akan melahirkan pemerintahan daerah *(local self government),* sedangkan dekonsentrasi akan melahirkan pemerintahan lokal *(local state government atau field administration).* Menurut Smith (1967) desentralisasi memiliki berbagai ciri seperti penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom; fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa *(residual functions);* penerima wewenang adalah daerah otonom; penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang untuk mengatur dan mengurus *(regeling en bestur)* kepentingan yang bersifat lokal; wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum, atau bersifat abstrak; wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual, atau bersifat konkrit *(beschikking, acte administratis verwaltungsakt);* keberadaan daerah otonom adalah di luar

hirarki organisasi pemerintah pusat; menunjukkan pola hubungan kekuasaan antar organisasi; serta menciptakan *political variety dan diversity of structure* dalam sistem politik.

Dalam rangka menjalankan sistem desentralisasi pemerintahan, di daerah-daerah dibentuk pemerintah daerah *(local government)* yang merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah pusat *(central government).* Kepada pemerintah-pemerintah daerah tersebut diserahkan sebagian dari fungsi-fungsi pemerintahan (yang sebelumnya merupakan fungsi pemerintah pusat) untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu kepada daerah-daerah diserahkan pula sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah diserahkan. Demikian pula secara organisasi dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui suatu sistem pemilihan umum.

Dengan demikian pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan otonomi untuk menentukan kebijaksanaan - kebijaksanaaannya sendiri, bagaimana menjalankan kebijaksanaan - kebijaksanaan tersebut, serta bagaimana cara-cara untuk membiayainya. Perbedaan pelaksanaan desentralisasi pada pandangan pertama dan kedua dapat dilihat pada berbagai aspek pada sistem pemerintahan daerah yang ada, seperti aspek keuangan, aspek pelimpahan kewenangan, aspek kepegawaian, serta sikap dan perilaku para elite di tingkat pusat maupun daerah.

2.1.2. Alasan dan Keuntungan Desentralisasi

Secara teoritis, pemberian otonomi kepada daerah dilatarbelakangi oleh tujuan politik maupun administratif

yang ingin dicapai oleh pemerintah suatu negara. Menurut Maddick (1963), rasional dari tujuan politik dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kesadaran sipil (*civil conciousness*) dan kedewasaan politik (*political maturity*) masyarakat melalui pemerintah daerah. Penyebaran kedewasaan politik dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan melalui pemerintahan yang responsif yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal ke dalam kebijakan yang diambilnya dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Senada dengan itu, Lughlin (1981) mengemukakan bahwa sistem pemerintahan daerah diperlukan untuk mengakomodasikan pluralisme dalam suatu negara modern yang demokratis. Smith (1985) juga mengemukakan bahwa keberadaan pemerintah daerah diperlukan untuk mencegah munculnya kecenderungan centrifugal yang terjadi karena adanya perbedaan etnis, agama dan unsur-unsur primordial Iainnya di daerah-daerah.

Dari tujuan administratif, menurut Rondinelli (1984), Maddick (1963) dan Smith (1985), rasional keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam aktivitas-aktivitas w perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui desentralisasi. Tidak ada pemerintah pusat dari suatu negara yang besar yang dapat secara efektif menentukan apa yang harus dilakukan daiam semua aspek kebijakan publik.

Demikian pula tidak ada pemerintah pusat yang dapat secara efektif mengimplementasikan kebijakan dan program-programnya ke seluruh daerah secara efisien (Bowman & Hampton, 1983). Karena itu diperlukan unit-unit pemerintahan

di tingkat lokal yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu balk atas dasar prinsip devolusi (di Indonesia dikenal dengan prinsip desentralisasi) maupun atas dasar prinsip dekonsentrasi Kedua jenis pilihan (devolusi dan dekonsentrasi) tersebut akan memiliki implikasi yang sangat berbeda satu sama lain dalam penerapannya. Meskipun ada kecenderungan pemerintah berbagai negara di dunia untuk mengkombinasikan kedua pilihan tersebut secara seimbang, namun tetap saja terdapat kecenderungan bahwa prinsip yang satu selalu lebih besar dari prinsip yang lain. Pendulum devolusi atau dekonsentrasi akan selalu bergerak ke kedua sisi tergantung dari kebijakan politik dari elit pemerintahan suatu negara. Namun demikian, secara empirik terlihat bahwa negara dengan tingkat ekonomi dan politik yang relatif mapan cenderung untuk lebih menerapkan prinsip desentralisasi daripada dekonsentrasi.

Norman D. Palmer mengatakan bahwa desentralisasi tidak meiemahkan wewenang pemerintah pusat, sebaliknya dengan adanya desentralisasi dapat digunakan sebagai sarana , untuk menguatkan wewenang pemerintah pusat dan memungkinkan pelaksanaan fungsifungisnya secara Iebih efektif serta untuk mempertahankan pengawasan secara seksama terhadap lembaga perwakilan daerah atau lembagalembaga otonom di tingkat daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari kecenderungan yang terjadi di berbagai negara di dunia, meskipun tetap memiliki wama tersendiri yang berbeda. Perjalanan otonomi daerah di Indonesia setelah kemerdekaan dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1945 yang

kemudian dalam perjalanan sejarah disempumakan dengan UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, Penpres No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam perjalanannya penerapan otonomi daerah di Indonesia tetap diwarnai oleh pilihan penguatan desentralisasi atau dekonsentrasi. Perubahan-perubahan peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah merupakan indikasi dari perubahan pilihan politik di tingkat nasional, karena nature dari politik di tingkat nasional kemudian akan mewarnai politik desentralisasi yang diterapkan.

Secara umum terdapat berbagai alasan mengapa desentralisasi merupakan suatu pilihan dalam sistem pemerintahan negara-negara di dunia. Pertama, ada anggapan bahwa desentralisasi pemerintahan mencerminkan pengelolaan aspek-aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari secara lebih demokratis. Melalui desentralisasi pemerintahan, rakyat daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk menentukan keinginannya, karena mereka memang dianggap lbih mengetahui apa yang mereka inginkan dan keadaaan daerahnya sendiri. Dengan demikian merekalah yang dianggap paling pantas untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan daerahnya. Pada negara berkembang, pemerintah daerah dianggap mempunyai kemampuan yang Iebih besar dalam meningkatkan partisipasi mesyarakat daerah dalam proses pembangunan (Cohrane, 1983). Kedua, karena adanya berbagai alasan teknis yang dapat dilihat dari berbagai segi seperti segi ekonomi, geografis, etnis, budaya, dan sejarah. Panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh, mulai dari perencanaan

pembangunan maupun pelaksanaannya, membuat sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dinilai jauh Iebih efisien. Hal ini karena dengan desentralisasi dapt dilakukan pemotongan sejumlah jalur birokrasi yang panjang dan tidak perlu. Dengan demikian desentralisasi dapat mengurangi adanya overload (kelebihan beban) dan congestion (pemusatan) administrasi dan komunikasi di tingkat pusat (Rondinelli, 1983).

Hamparan wilayah yang iuas dari suatu negara dengan keadaan geografis yang bisa sangat berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya menuntut penanganan yang khusus bagi setiap daerah. Smith (1985) bahkan mengatakan bahwa kebutuhan akan berbagai bentuk atau derajat pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi merupakan suatu hal yang bersifat universal. Bahkan bagi negara-negara yang sangat kecil sekalipun, pemerintahan daerah dengan tingkat otonomi tertentu tetap dibutuhkan. Etnis, budaya dan sejarah bahkan bahasa yang berbeda, yang menghasilkan sistem sosial yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya merupakan alasan lain mengapa sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dibutuhkan dalam suatu negara.

Berbagai alasan lain mengenai desentralisasi sistem pemerintahan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan desentralisasi berkaitan dengan berbagai faktor. Berbagai studi telah dilakukan mengenai hal ini. Studi Bank Dunia terhadap 45 negara di dunia ketiga pada dekade 1960an menunjukkan bahwa tingkatan desentralisasi berhubungan dengan berbagai faktor seperti: a) umur negara, semakin tua dan semakin mapan suatu negara, semakin tinggi tingkat desentralisasinya; b) besarnya Produk Nasional Kotor (PNB),

semakin besar Produk Nasional Kotor suatu negara, semakin tinggi pula tingkat desentralisasinya; c) media massa, semakin tersebar luas media massa di suatu negara, semakin tinggi tingkat desentralisasi negara tersebut; d) tingkat industrialisasi, negara-negara dengan tingkat industrialisasi yang relatif tinggi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi pula; dan e) jumlah pemerintah daerah, negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi pula.

Hasil studi yang menunjukkan hubungan positif kelima faktor tersebut di atas dengan desentralisasi memperlihatkan bahwa faktor perkembangan sosial ekonomi negara mempengaruhi tingkat desentralisasi. Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi negaranegara di dunia yang sedang terjadi dewasa ini maka sangat beralasan bila dikatakan bahwa pemerintahan yang terdesentralisasi akan cenderung semakin dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang. Semakin kuat suatu negara dan semakin, berhasil upaya pembangunannya, maka semakin kuat dorongan politik untuk menjangkau wilayah dan golongan yang Iebih luas.

Keterbatasan pemerintah pusat untuk mendukung perluasan layanan, karena semakin jauh jangkauan layanan yang ingin dicapai maka semakin bersifat lokal dan spesifik tugas-tugas yang dihadapi, sehingga bila tugas-tugas tersebut tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat dapat menimbulkan resiko ekonomi dan politik yang semakin tinggi. Namun demikian, satu faktor penting yang perlu diperkuat terlebih dahulu sebelum desentralisasi dapat dilaksanakan adalah kesatuan nasional yang tinggi. Setelah kesatuan nasional yang tinggi dicapai, maka desentralisasi dapat menjadi prinsip

idiologis yang dihubungkan dengan tujuan-tujuan kemandirian, partisipasi rakyat, demokrasi, dan pertanggungjawaban pemerintah serta aparatnya kepada rakyat secara keseluruhan.

Dapat dikatakan bahwa desentralisasi merupakan indikator dari kedewasaan suatu sistem politik dan sistem birokrasi yang terkandung di dalamnya. Pelaksanaan desentralisasi sistem pemerintahan memiliki beberapa keuntungan (Sidik, 1994), antara lain menyebarkan pusat pengambilan keputusan (*decongestion*); kecepatan dalam pengambilan keputusan (*speed);* pengambilan keputusan yang realistis (*economic and Sosial realism*); penghematan (*economic efficiency*); keikutsertaan masyarakat local (*local participation*); serta solidaritas nasional (*national solidarity*).

Pelaksanaan desentralisasi dipengaruhi oleh berbagai hal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi tersebut menurut Rondinelli (1983) adalah: pertama, derajat komitmen politik serta dukungan administratif yang diberikan terutama oleh pemerintah pusat dan oleh elite serta masyarakat daerah itu sendiri. Kedua, adanya sikap dan perilaku serta kondisi kultural yang mendukung atau mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah. Ketiga, adanya suatu rancangan organisasi yang dapat mendukung program-program desentralisasi. Dan keempat, tersedianya sumber keuangan, tenaga kerja serta infrastuktur yang memadai bagi penyelenggaraan program-program desentralisasi.

Pembahasan mengenai alasan perlunya desentralisasi secara umum terlihat sejalan dengan keadaan di Indonesia. Keadaan geografis dengan belasan ribu pulau yang tersebar pada suatu hamparan wilayah yang sangat luas serta latar

belakang kondisi sosial ekonomi dan budaya sudah merupakan alasan yang cukup kuat bagi Indonesia untuk menerapkan sistem pemerintahan dengan azas desentralisasi. Namun demikian selain alasan yang terkesan praktis tersebut, alasan lain yang lebih bersifat fundamental merupakan alasan utama mengapa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, yaitu bahwa secara konstitusional sistem pemerintahan dengan azas desentralisasilah yang ditetapkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2.1.3. Dasar dan Konsekuensi Pembentukan Daerah Otonom

Atas dasar kerangka sebagaimana dikemukakan di atas, pembentukan suatu daerah otonom (kabupaten, kota maupun provinsi) beserta pemerintahnya memiliki implikasi yang sangat luas dan mencakup berbagai dimensi. Tujuan utama pembentukan daerah otonom yang baru adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah otonom yang bersangkutan, dan umumnya di seluruh negara. Pembentukan suatu daerah otonom secara teoritis akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal yang paling penting dipertanyakan dafam konteks pembentukan daerah otonom baru (kabupaten, kota maupun provinsi) adalah apakah pembentukan daerah otonom baru akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempermudah akses masyarakat terhadap

pelayanan, mempercepat gerak roda perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih balk. Karena itu sejalan dengan pembentukan daerah kabupaten yang baru diperlukan pengkajian atau analisis atas berbagai aspek yang diduga memiliki kontribusi terhadap jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan kriteria tersebut Pasal 4 ayat 2 PP No. 78 Tahun 2007 mengemukakan bahwa daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pasal 5 ayat 2 point a menjelaskan bahwa syarat administrasi pembentukan kabupaten/kota adalah keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang diproses berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan yang dimaksud dengan syarat teknis a) kemampuan ekonomi; b) potensi daerah; c) sosial budaya; d) sosial politik; e) jumlah penduduk; f) luas daerah; g) pertahanan ; h) keamanan; i) kemampuan keuangan ; j) tingkat kesejahteraan masyarakat dan k) rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor-faktor

tersebut dinilai berdasarkan hasil kajian daerah. Calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indicator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu. Berikutnya dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Sejalan dengan pembentukan pemerintahan daerah maka kemudian muncul persoalan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Manan, 1994). Persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah muncul karena pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan negara kemudian tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat tetapi juga oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah melaksanakan sebagian kewenangan, tugas maupun tanggung jawab pemerintahan, yakni kewenangan, tugas maupun tanggung jawab yang telah diserahkan kepada daerah atau yang diakui sebagai urusan daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan azas desentralisasi maka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya memiliki beberapa kondisi berikut: pertama, tidak mengurangi hak-hak masyarakat daerah sebagai *stakeholder* dan salah satu pilar *good governance* untuk turut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; kedua, tidak mengurangi hak-hak daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang dianggap penting oleh daerah; ketiga, bentuk hubungan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah yang satu dengan yang lain dapat berbeda-beda sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah, serta keempat, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.

Sejalan dengan itu dalam rangka pembentukan kabupaten barn perlu dilakukan pula upaya pemberdayaan (empowering) pemerintah dan masyarakat daerah. Hal ini agar pelaksanaan azas desentralisasi sejalan dengan pembentukan daerah otonom baru dapat berjalan dengan sebaikbaiknya. Sejalan dengan kedudukan pemerintah daerah selaku daerah otonom maka pemberdayaan pemerintah daerah tidak hanya menyangkut organisasi beserta aparat yang mendukungnya (capicity building), tetapi juga menyangkut kemampuan keuangannya, karena tanpa sumber keuangan yang memadai maka daerah tidak mungkin dapat melaksanakan fungsinya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Pendekatan Analisis

Pengkajian atau analisis berbagai aspek dalam pembentukan daerah kabupaten barn yang bersifat otonom (yang berasal dari pemekaran) didasarkan pada kebijakan pemerintah yang tertuang balk pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Kriteria pembentukan atau pemekaran suatu daerah otonom dikemukakan pada Pasal 4 PP No. 78 Tahun 2007, yang mengemukakan bahwa daerah dibentuk berdasarkan syarat-

syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. Kriteria-kriteria penilaian syarat teknis yang akan digunakan sebagai dasar bagi penetapan kelayakan pembentukan suatu daerah kabupaten baru yang sekaligus akan dianalisis adalah sebagai berikut:

2.2.1. Kriteria Kemampuan Ekonomi

Pertimbangan dan tujuan utama pembentukan daerah otonom yang baru adalah untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Secara teoritis, untuk mencapal tingkat kesejahteraan ekonomi diperlukan berbagai upaya yang menyangkut aspek ekonomi makro maupun mikro. Pada pendekatan makro ekonomi dijelaskan bahwa pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan ditentukan oleh aktivitas ekonomi dari berbagai sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut (Dombusch & Fishcer, 1997), yang terdiri dari sektor rumah tangga, swasta (bisnis) dan pemerintah. Sedangkan pendekatan mikro ekonomi menjelaskan bahwa daya tahan pelaku ekonomi ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola berbagai sumber daya (resources) yang digunakannya secara efisien dalam melakukan produksi. Muara dari kedua pendekatan tersebut adalah kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam kiprahnya ditengah-tengah pergulatan ekonomi nasional maupun global. Karena itu analisis aspek sosial ekonomi akan menjelaskan kondisi makro dan mikro ekonomi pada daerah otonom yang akan dibentuk.

Dornbusch & Fishcer (1997) bahwa perkembangan perekonomian daerah akan dapat dianalisis dari beberapa

variabel, diantaranya adalah struktur perekonomian daerah, daya saing ekonomi, tingkat pendapatan daerah yang dihitung clad PDRB-nya, keunggulan komparatif daerah, potensi kerjasama antar wilayah, investasi lokal dan investasi yang datang dari tuar, budaya menabung dan konsumsi, akses lokal pada pasar ekspor, kemudahan industri lokal dalam memperoleh faktor produksi, serta kekuatan PAD dan besaran APBD. Poin terpenting dalam hal ini adalah bahwa daerah yang baru harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan juga kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang lebih luas.

Sesuai dengan penjelasan PP No. 78 Tahun 2007, kemampuan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB non migas. Indikator PDRB diukur dengan menggunakan dua sub indikator, yakni PDRB perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Indikator PDRB digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan daerah (baik pemerintah maupun masyarakatnya) dalam menggali dan memanfaatkan seluruh sumber daya atau faktor produksi (input) yang ada di daerah menjadi output (produk-produk barang dan jasa). Besaran PDRB suatu daerah juga menggambarkan daya saing suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Angka PDRB juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu daerah pada periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat (Susanti dkk, 1995). Indikasi tersebut tersirat clan pertumbuhan output karena pada

dasamya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*) yang pada gilirannya akan menghasilkan aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian adanya pertumbuhan output diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat selaku pemilik faktor-faktor produksi tersebut.

Suatu perekonomian dinamakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa rill terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada Tahun tertentu lebih besar daripada sebelumnya. Lebih jauh, untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi harus dihitung dengan PDRB perrvkapita atas dasar harga konstan.

2.2.2. Kriteria Kemampuan Keuangan

Untuk melihat kemampuan keuangan digunakan pendekatan penerimaan daerah sendiri (PDS) dengann tiga kriteria yaitu jumlah PDS, rasio PDS terhadap jumlah penduduk, dan rasio PDS terhadap PDRB non migas. Indikator PDS digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan daerah dalam menggati sumber-sumber keuangan yang ada di daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio antara PDS dengan jumlah penduduk untuk melihat kemampuan daerah dalam membiayai penduduknya yang teraplikasi dalam pembiayaan pengeiuaran rutin pemda dengan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri yang sekaligus menujukkan sejauhmana kemampuan daerah untuk mandiri dari segi keuangan. Pengeluaran rutin

dalam hal ini adalah pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, yakni untuk belanja pegawai, belanja barang, bunga dan cicilan hutang dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi angka rasio PDS terhadap jumlah penduduk maka semakin besar kemampuan pemda untuk membiayai pengeluaran rutinnya dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah sendiri, yang berarti pula semakin tinggi kemandirian daerah dari segi keuangan. Sedang bila angka PDS dibandingkan dengan PDRB non migas maka angka perbandingan tersebut akan memperlihatkan sejauhmana kemampuan daerah dalam menggali atau mengumpulkan dana (pendapatan daerah) dari aktivitas-aktivitas perekonomian yang dilaksanakan oleh masyarakat di daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasio antara PDS dengan PDRB non migas maka berarti semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai barang dan jasa publik yang harus disediakannya.

2.2.3. Kriteria Potensi Daerah

Pembentukan suatu daerah otonom salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa penduduk sebagai sumber tenaga kerja, potensi yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun potensi yang berupa kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan potensipotensi tersebut saat ini (kondisi eksisting) dapat

dianggap sebagai modal dasar bagi daerah yang akan dibentuk. Demikian pula, daerah tentu saja memiliki berbagai potensi lain yang masih bersifat laten dan masih belum dapat dikembangkan karena berbagai kendala. Seluruh potensi tersebut dapat dianggap sebagai sumber daya daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan seluruh potensi atau sumber daya tersebut dapat menciptakan berbagai peluang usaha yang kemudian dapat meningkatkan gerak laju perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak ikutan (*multiplier effect*) yang luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu setiap daerah otonom harus mampu mengindentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkannya secara optimal, terarah dan terencana agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu potensi-potensi yang dimiliki daerah akan dapat mengindikasikan apa yang menjadi kompetensi inti *(core competence)* daerah, yang kemudian perlu dikembangkan pada masa yang akan datang melalui berbagai upaya dan keterlibatan balk pemda, masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.

Potensi daerah dapat dibedakan menjadi potensi yang bersifat alamiah (natural, bukan buatan) dan potensi yang bersifat buatan. Potensi alamiah terdiri potensi sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber daya manusia (SDM). Potensi sumber daya alam meliputi seluruh bumi, air dan seluruh kekayaan alam lainnya beserta apa yang terkandung di

dalamnya. Sedangkan potensi sumber daya manusia meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, balk aspek fisik maupun aspek non fisik. Sementara potensi sumber daya buatan meliputi seluruh hasil usaha dan kemampuan manusia balk yang berupa teknologi, sarana dan prasarana, produk maupun yang berupa institusi atau organisasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar itu secara teoritis identifikasi potensi daerah memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi potensi tanah beserta seluruh kandungan isinya termasuk letaknya, kesuburannya, serta bahan-bahan tambang dan mineral yang terdapat di dalam dan di. atasnya, potensi sumber daya manusia yang mencakup seluruh aspek yang menentukan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik dan segi fisik maupun non fisik, serta potensi sumber daya buatan yang berupa berbagai sarana dan prasarana, teknologi, dan organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pemanfaatan seluruh potensi daerah akan membentuk suatu hubungan yang berupa jaringan kerja (*network*) yang saling tergantung satu sama lain. Potensi sumber daya alam hanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas dengan menggunakan teknologi, sarana maupun prasarana yang tersedia datam suatu institusi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pemanfaatan seluruh sumber daya tersebut secara optimal maka diperlukan keseimbangan diantara ketiganya.

Faktor yang paling menentukan adalah sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia akan sangat

menentukan apakah potensi-potensi sumber daya yang lain dapatdimanfaatkansecaraoptimalatautidakbagikesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Turner & Hulme (1997) bahwa sumberdaya yang paling bemilai dalam suatu organisasi adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia dalam organisasi pemerintahan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, mengkoordinasikan tugas-tugas tersebut, mengorganisir input dan menghasilkan output yang berupa barang dan jasa (pelayanan). Bahkan menurut mereka, tanpa sumberdaya manusia, tidak ada organisasi. Karena itu somber daya manusia yang ada dalam organisasi pemda hams memiliki kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi, menghitung potensi, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tidak mengabaikan kemampuan atau daya dukung kelestariannya. Untuk itu sumber daya manusia di daerah perlu memiliki kemampuan atau skill, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal serta pengalaman kerja, yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Sumberdaya manusia yang dibutuhkan daerah untuk memberdayakan potensinya adalah sumberdaya yang kuat dan sehat, serta memiliki skill, kapasitas atau kemampuan untuk mengelola tugas tugas pemerintahan dan pembangunan secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel.

Untukitu, daerahotonombaruperlumemberikanperhatian pada persoalan pengembangan sumberdaya manusia (*human resources development*) dan manajemen sumberdaya manusia (*human resources management*). Potensi sumber daya manusia di daerah diantaranya dapat dilihat dan kondisi ketenagerjaan

di daerah. Kondisi ketenagakerjaan di daerah dalam hal ini dapat dilihat dan kualitas tenaga kerja yang dicerminkan oleh presentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk 15 Tahun ke atas, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk yang bekerja serta rasio pegawai negen sipil terhadap jumlah penduduk. Keseluruhan indikator tersebut mencerminkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki daerah seoptimal mungkin.

Persoalan penting lainnya dalam upaya pengembangan potensi daerah adalah sejauhmana potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat di daerah. Pemanfaatan potensi daerah membutuhkan sumber daya yang berupa modal. Masalah lain adalah akses terhadap pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat daerah. Karena itu ketersediaan lembaga keuangan (balk bank maupun non bank) serta sarana dan prasarana ekonomi (khususnya pasar dan pertokoan) di daerah merupakan salah satu indikator potensi daerah. Modal disediakan oleh berbagai lembaga keuangan balk bank maupun non bank. Kedua lembaga tersebut berperan dalam penyaluran kredit yang dapat digunakan masyarakat daerah untuk mengembangkan potensinya. Angka rasio ketersediaan lembaga keuangan di daerah (baik yang berupa bank maupun yang bukan bank) yang dinyatakan dengan rasio bank dan bukan bank per 10.000 penduduk, mencerminkan akses masyarakat terhadap modal yang kemudian mengindikasikan ketersediaan dana yang dapat digunakan masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah. Semakin tinggi rasio lembaga keuangan memperlihatkan

semakin mudahnya masyarakat daerah untuk memperoleh akses ke permodalan.

Selain ketersediaan lembaga keuangan serta sarana dan prasarana ekonomi, potensi daerah juga dicerminkan oleh ketersediaan berbagai sarana dan prasarana sosial seperti sekolah dan gurunya serta sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medisnya. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga gurunya, sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medisnya memperlihatkan seberapa besar akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Angka rasio sarana pendidikan yang tinggi akan mencerminkan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, demikian pula angka rasio sarana kesehatan yang tinggi mencerminkan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kedua jenis pelayanan tersebut merupakan pelayanan-pelayanan dasar (basic sen/ices) yang diperlukan oleh seluruh masyarakat dan akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa kini dan dimasa depan.

Prasarana lain yang juga dibutuhkan adalah transportasi dan komunikasi serta prasarana pariwisata. Prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi akan memungkinkan masyarakat di daerah memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan.

Kelancaran transportasi akan memungkinkan terjadinya mobilitas sumber daya (faktor-faktor produksi) lintas daerah, lintas wilayah, lintas provinsi maupun lintas negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akselerasi kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah dengan berbagai dampak ikutannya.

Sedangkan kelancaran komunikasi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap dunia luar dan informasi yang dapat membuka wawasan masyarakat terhadap dunia luar yang berkembang pesat. Jumlah sarana pariwisata memberikan petunjuk mengenai perkembangan pariwisata yang berlangsung di daerah selama ini dan sejauhmana kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Ketersediaan objek-objek wisata yang dilengkapi dengan sarana pariwisata memungkinkan daerah untuk mengembangkan ekonominya dimasa depan. Dikaitkan dengan kedua indikator sebelumnya maka ketiga indikator tersebut memberikan indikasi mengenai sejauhmana kemampuan daerah untuk mengembangkan perekonomiannya dimasa depan. Ketersediaan berbagai sarana dan prasarana sebagaimana yang disebutkan di samping dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi daerah untuk mengembangkan diri juga memperlihatkan pula sejauhmana tingkat pelayanan yang diterima masyarakat dan PEMDA.

2.2.4. Kriteria Sosial Budaya

Keinginan untuk pembentukan suatu daerah otonom merupakan cerminan dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara (*citizen*) yang perlu diakomodasikan secara proporsional. Keinginan tersebut bisa muncul karena faktor latar belakang sejarah (*historis*) maupun faktor sosial budaya. Dari faktor sejarah, keinginan untuk pembentukan daerah otonom baru bisa muncul karena daerah tersebut memiliki latar belakang sejarah yang dianggap berbeda dari daerah induknya. Kebanggaan akan sejarah masa

lalu dan keinginan untuk melestarikan atau menampilkan kembali kejayaan masa lalu seringkali menjadi alasan utama bagi keinginan masyarakat tersebut. Karena itu dari aspek historis perlu dikaji Iebih lanjut bagaimana sejarah suatu daerah pada masa Iampau, relevansi aspek kesejarahan tersebut terhadap pembentukan daerah otonom baru dan sejauhmana sejarah masa Iampau tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dimasa kini.

Sementara dari faktor sosial budaya keinginan untuk membentuk suatu daerah otonom seringkali dilandasi oleh adanya pandangan bahwa ada budaya sekelompok masyarakat yang terkesan terpinggirkan (termarginalkan) atau belum terakomodasikan secara memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini. Kurangnya kesempatan untuk mengekspresikan din bisa jadi merupakan faktor yang menonjol dibalik alasan untuk pembentukan daerah otonom baru. Keberadaan pemerintah daerah otonom yang baru kemudian diharapkan dapat lebih mengakomodasikan nilai-nilai budaya setempat yang bersifat khas dalam berbagai aspeknya. Karena itu pads aspek sosial budaya perlu dikaji berbagai faktor budaya masyarakat suatu daerah, faktor-faktor dominan yang terdapat dalam budaya masyarakat daerah tersebut, bagaimana masyarakat mengekspresikan budayanya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana pengaruh faktor budaya tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini, serta apakah budaya tersebut masih relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan di era modem ini. Pengkajian tersebut diperiukan dalam upaya mengungkap kesiapan sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya sosial

(*Sosial capital*) maupun sumber daya budaya (*cultural capital*) yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kriteria sosial budaya dalam pembentukan daerah otonom dalam hal ini akan dikaji melalui tiga indikator. Indikator-indikator yang digunakan adalah rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk, rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk, dan jumlah balai pertemuan. Indikator tersebut digunakan dengan asumsi bahwa aspek sosial budaya masyarakat di daerah teraktualisasikan melalui berbagai bentuk aktivitas nyata seperti aktivitas keagamaan, aktivitas seni, olah raga, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Karena itu ketersediaan berbagai fasilitas sosial budaya tersebut dianggap dapat mencerminkan sejauhmana kondisi sosial budaya masyarakat di daerah yang akan dibentuk. Indikator-indikator tersebut seluruhnya mencerminkan dua hal. Pertama, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan parasarana sosial yang dibutuhkan warganya, yakni fasilitas tempat peribadatan, tempat-tempat kegiatan sosial maupun sarana olah raga. Dalam hal ini semakin tinggi angka rasio memperlihatkan semakin besarnya perhatian pemda selama ini terhadap aspek sosial budaya masyarakat dan semakin besarnya kemampuan pemda selama ini dalam menyediakan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan warganya. Kedua, kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas sosial yang tersedia, yakni tempat peribadatan, tempat kegiatan sosial serta sarana olah raga. Dalam hal ini semakin tinggi angka rasio memperlihatkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas sosial yang tersedia, balk yang dibangun pemda maupun yang dibangun sendiri

oleh masyarakat. Dengan asumsi bahwa fasilitas atau sarana-sarana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan yang dapat mengekspresikan budaya masyarakat maka dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial tersebut diasumsikan bahwa interaksi sosial antar warga akan semakin balk, masalah-masalah sosiat dapat dikurangi atau ditanggulangi, serta jaminan sosial bagi warganya yang semakin balk.

2.2.5. Kriteria Sosial Politik

Aspek sosial politik dari keinginan untuk membentuk suatu daerah otonom dapat ditelusuri dad dinamika sosial politik yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini terutama terkait dengan keinginan masyarakat untuk memiliki kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar pemerintahan lebih demokratis, lebih bebas dan lebih mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat. Dinamika sosial politik di suatu daerah dapat dibaca dari sejauhmana peran organisasi sosial politik di daerah dalam menyalurkan aspirasi, masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya mengungkap berbagai pertanyaan seperti, apakah keinginan pembentukan daerah otonom baru telah merupakan keinginan seluruh masyarakat atau hanya keinginan segelintir elit politik di daerah, apakah seluruh elit politik di daerah telah memiliki visi yang sama dalam pembentukan daerah otonom, serta apakah organisasi sosial politik yang ada di daerah tersebut telah siap dan memberikan dukungan bagi pembentukan daerah otonom baru yang terpisah dari daerah induknya.

Kajian pada kriteria sosial politik dalam hal ini dipusatkan pada dua indikator, yakni partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan sub indikator rasio penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, serta indikator organisasi kemasyarakatan dengan sub indikator jumlah organisasi kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik yang diukur dengan rasio penduduk yang ikut Pemilu legislative terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih memperlihatkan sejauhmana kesadaran masyarakat daerah dalam berpolitik. Hal ,ini didasari oleh asumsi bahwa Pemilu legislative merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh warga negara dalam mengekspresikan kepentingan dan keinginannya melalui pilihan terhadap partai politik tertentu yang mengikuti Pemilu. Pilihan warga untuk mengikuti Pemilu dengan demikian mencerminkan adanya kesadaran warga bahwa melalui Pemilu kemudian mereka dapat mengemukakan aspirasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Angka rasio yang tinggi dengan demikian mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

Sedangkan jumiah organisasi kemasyarakatan mencerminkan banyaknya saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian indikator tersebut juga mengindikasikan tingkat kesadaran politik masyarakat daerah untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu organisasi yang berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang berperan baik dalam

pengambilan keputusan maupun dalam mengontrol jalannya pemerintahan daerah. Semakin banyak organisasi masyarakat berarti semakin banyak kelompok penekan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan publik yang menyangkut masyarakat luas. Keberadaan organisasi-organisasi masyarakat juga akan memperkuat posisi tawar menawar (*bargaining*) masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2.2.6. Kriteria Kependudukan dan Was Daerah

Tidak ada satupun pemerintah suatu negara dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijaksanaannya ataupun melaksanakan kebijaksanaan dan program-programnya secara efektif dan efisien melalui sistem sentralisasi (Bowman & Hampton, 1983). Pandangan ini menjadi dasar bagi kebutuhan akan pelimpahan atau penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada organisasi atau unit di luar pemerintah pusat itu sendiri, baik dalam konotasi politis maupun dalam konotasi administratif. Penyerahan atau pelimpahan kekuasaan atau kewenangan tersebut dapat mengambil bentuk devolusi, dekonsentrasi, delegasi atau privatisasi. Di berbagai negara keempat bentuk tersebut diterapkan, meski salah satu bentuk bisa mendapat prioritas dibandingkan dengan bentuk Iainnya (Chema & Rondinelli, 1983).

Area dan penduduk merupakan faktor utama yang menentukan ukuran pemerintahan daerah. Keadaan geografis suatu wilayah akan menentukan karakteristik masyarakat, mata pencaharian maupun budayanya. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan perluasan pemukiman yang berimplikasi kepada

aspek ekonomi, politik, administrasi, maupun cakupan wilayah kerja pemerintahan daerah. Perubahan area akan terjadi secara cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk, kondisi sosial, ekonomi, transportasi, teknologi dan sebagainya. Batas wilayah kemudian dapat menjadi kabur, dan ketergantungan antar daerah kemudian menjadi sangat dominan. Dengan demikian keadaan geografis dan demografis merupakan paramater yang cukup dominan dalam menentukan pola administasi pemerintahan suatu daerah. Dalam kaitan ini pola dan karakter pemerintahan daerah hams sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemerintab daerah untuk mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal baik dalam penyediaan pelayanan masyarakat *(public service function)*, pemberian perlindungan kepada masyarakat *(protective function)*, pelaksanaan pembangunan *(development function)*, dan mampu mengadaptasikan diri terhadap perubahan, dinamika dan perkembangan dalam masyarakat maupun lingkungan strategisnya.

Keberadaan suatu daerah otonom pada prinsipnya harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian layanan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan daerah otonom. Dalam hal ini pembentukan suatu daerah otonom seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara luas daerah dengan jumlah penduduknya. Terlalu banyaknya jumlah penduduk dalam wilayah yang sempit dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial sebagai akibat kurangnya daya dukung

lingkungan. Demikian pula, terlalu banyaknya penduduk dapat berakibat pada ketidakmampuan pemda dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada penduduknya. Sedang terlalu sedikitnya jumlah penduduk dibandingkan dengan luas daerah akan mengakibatkan pemberian layanan akan membutuhkan biaya yang tinggi sehingga tidak efisien *(high cost).*

2.2.7. Kriteria Pertahanan, Keamanan, dan Rentang Kendali

Di samping berbagai kriteria sebagaimana yang dikemukakan di atas, pembentukan suatu daerah otonom juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek lain, diantaranya adalah pertahanan dan keamanan, serta rentang kendali. Aspek pertahanan dan keamanan perlu menjadi pertimbangan karena salah satu fungsi pemerintah daerah adalah fungsi protektif, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dart berbagai gangguan maupun ancaman yang dapat menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat. Aspek lainnya adalah rentang kendali. Jumlah kecamatan dan jarak kecamatan serta desa ke pusat pemerintahan merupakan salah satu totok ukur yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan daerah otonom baru. Hal ini terutama terkait dengan rentang kendali yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan pemda. Pembentukan daerah otonom baru seharusnya dapat memperpendek jarak antara pusat pelayanan dengan wilayah-wilayah jangkauannya, yang dengan demikian akan memperpendek rentang kendali *(span of control)* pemerintahan. Demikian pula, pembentukan daerah otonom baru seharusnya dapat mempersingkat waktu tempuh masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan pemda.

Dalam kaitan ini jumlah desa dalam setiap kecamatan perlu dikaitkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang kemudian akan menentukan cakupan pelayanan dan tingkat efektivitas pelayanan. Dengan demikian, dengan adanya daerah otonom yang baru akses masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan pemda akan menjadi Iebih cepat, kualitas pelayanan menjadi lebih balk, serta kesejahteraan masyarakat secara umum akan semakin meningkat. Pada era masa depan, dimana pemerintah hanya berperan sebagai, facilitator, jumlah pegawai pemerintah yang efektif sangat diperlukan (Osborne & Gaebler, 1997). Jumlah pegawai yang efektif hanya dapat dicapai apabila pegawai pemda memiliki kualitas yang memadai. Hal ini karena pembentukan suatu daerah otonom harus diikuti dengan kemampuan pemerintahnya untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik *(excellent service)* kepada masyarakat. Selain itu pembentukan suatu daerah otonom serta keberadaan pegawainya harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance,* diantaranya *prinsip akuntabilitas, transparansi serta* partisipasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengakomodasikan seluruh aspirasi stakeholder dalam setiap kebijakan daerah mulai sejak pengambilan keputusan hingga implementasi dan pengawasannya.

2.2.8. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator bahwa suatu masyarakat itu sejahtera adalah dengan melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat

yang diukur melalui Indeks Pembangunan manusia (IPM). Menggunakan tiga aspek kehidupan manusia yaitu 1) standar hidup layak (*decent living*) diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riel yang telah disesuaikan, 2) pengetahuan (*knowledge*) diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dari penduduk usia 15 Tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung menggunakan dua variable secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki dan, tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki, 3) usia hidup (*longevity*) diukur dengan angka harapan hidup (AHH) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.[]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Pengkajian

Pengkajian dirancang dengan pendekatan multi disiplin sebagai upaya untuk mendeskripsikan selengkap mungkin berbagai aspek atau kriteria pokok yang telah ditetapkan, yakni kemampuan ekonomi daerah, potensi ekonomi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah dan distribusi penduduk, luas wilayah, serta kriteria lainnya. Kajian terhadap aspek-aspek tersebut adalah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

3.1.1 Metode Pengkajian

Metode pengkajian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif dan evaluatif yang mendeskripsikan data

berbagai indikator dan sub indikator sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 dan kemudian membandingkan indikator-indikator yang sama antara calon daerah kabupaten yang akan. dibentuk dengan daerah kabupaten induknya.

3.1.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan dalam wilayah calon kabupaten dan daerah kabupaten induk. Sedangkan sampel sama dengan populasi, karena seluruh daerah kecamatan yang ada digunakan sebagai sampel.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Data utama yang dijadikan dasar pengkajian adalah data primer dan sekunder. Data sekunder digali dari berbagai sumber yang relevan, yakni Badan Pusat Statistik, Kantor Statistik Daerah, Pemerintah Daerah, Bappeda, dan berbagai sumber lainnya di pusat maupun daerah. Data yang digunakan adalah data yang bersifat resmi dan tertulis. Selain itu, untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dilakukan pula wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan para pejabat, LSM maupun masyarakat daerah. Wawancara dilakukan pada saat ekpose data oleh Bupati dan stafnya di depan tim pengkaji.

3.2 Teknik Analisis Data

3.2.1 Metode Analisis

Pengkajian terhadap berbagai kriteria/indikator dan sub indikator sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya menggunakan tiga macam metode yaitu:

a. Metode Rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran nilai rata-rata keseluruhan daerah disekitarnya.
b. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah otonom maupun daerah induk.

3.2.2 Alasan Penggunaan Metode

Alasan pemilihan Metode rata-rata adalah bahwa semakin nilai PDRB per kapita atau laju pertumbuhan PDRB daerah calon kabupaten mendekati nilai -rata-rata PDRB per kapita atau laju pertumbuhan PDRB kabupaten atau kota dalam provinsi yang bersangkutan, hal tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara daerah calon kabupaten dengan daerah kabupaten atau kota dalam provinsi tersebut semakin kecil.

Alasan pemilihan Metode skoring adalah karena begitu bervariasinya jumlah penduduk antar daerah. Oleh karena itu diperlukan angka tertentu sebagai dasar untuk menentukan skor sesuai dengan jumlah penduduk yang dipersyaratkan bagi pembentukan suatu daerah otonom kota. Penjelasan PP 78 menyatakan bahwa kuota jumlah penduduk kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi bersangkutan atau disekitamya. Semakin besar perolehan nilai calon daerah dan daerah induk terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.

Pada dasarnya dua metode tersebut menggunakan nilai acuan tertentu sebagai dasar menentukan skor masing-masing indikator. Semakin kecil nilai indikator dibandingkan nilai acuannya, semakin kecil pula skor yang diperoleh. Sedangkan semakin besar nilai indikator dibandingkan nilai acuannya semakin besar pula skor yang diperoleh.

Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu, dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.

Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indicator Iebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, skor 4 (z 60%), skor 3 (2:40%), skor 2 (z 20%), dan skor 1 (< 20%).

3.2.3 Faktor, Indikator dan Cara Perhitungan

Faktor, indikator dan cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Faktor, Indikator, dan Cara Perhitungan

No	Faktor	Indikator	Cara Perhitungan
1	Kependudukan	1. Jumlah penduduk 2. Kepadatan penduduk	Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bln/ lebih dan atau mereka yang berdomisili <6 bln tetapi bertujuan menetap. Jumlah penduduk dibagi dgn luas wilayah.

2	Kemampuan Ekonomi	3. PDRB non migas perkapita	Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumiah penduduk.
		4. Pertumbuhan ekonomi	Nilai PDRB non migas atas dasar harga konstans Tahun ke-t dikurangi nilai PDRB nonmigas atas dasar harga konstan Tahun ke t-1 dibagi dgn nilai PDRB nonmigas atas dasar harga konstan Tahun ke t-1 x 100.
		5. Kontribusi PDRB non migas	Nilai PDRB nonmigas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas prov atas dasar harga berlaku x 100
3	Potensi Daerah	6. Rasio Bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	Jumlah Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000
		7. Rasio kelompok pertokoan/ toko per 10.000 penduduk. 8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk.	Jumlah kelompok pertokoan/ toko dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 Tahun.
		10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 Tahun.
		11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 Tahun.
		12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, polikiinik balk negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

		13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	Jumlah dokter, perawat dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2, 3 atau perahu atau perahu motor.	Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2, 3 atau perahu atau perahu motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
		15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
		16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.	Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
		17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 Tahun ke atas.	Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA/ Keatas dibagi jumlah penduduk usia 18 Tahun dikali 100.
		18. Persentase pekerja yang berpendidikan SI terhadap penduduk usia minimal 25 Tahun ke atas.	Jumlah pekerja yg berpendidikan S1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun x 100.
		19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap 10.000 penduduk.	Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.
4	Kemampuan keuangan	20. Jumlah PDS	Seluruh penerimaan daerah yg berasal dari PAD, bagi hasil pajak, bagi hasil sda, bagi hasil provinsi.
		21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	Jumlah PDS dibagi jumlah penduduk
		22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas	Jumlah PDS dibagi PDRB non migas

5	Sosial Budaya	23. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk.	Jumlah mesjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		24. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk.	Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		25. Jumlah balai pertemuan.	Jumlah balai pertemuan dibagi jumlah penduduk.
6	Sosial Politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu terhadap penduduk yang mempunyai hak pilih.	Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu dibagi jumlah penduduk usia 17 Tahun keatas atau sudah kawin.
		27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.
7	Luas Daerah	28. Luas wilayah keseluruhan	Daratan ditambah lautan.
		29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.	Luas wilayah yang digunakan untuk permukiman dan industry.
8	Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah.	Jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.
		31. Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan.	Tergantung hamparan fisik dan posisi geografis daerah.
9	Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.	Jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk x 10.000.
10	Tingkat Kesejahteraan masyarakat	33. Indeks pembangunan manusia.	Diukur dengan usia hidup, pengetahuan, dan hidup Iayak.

11	Rentang kendali	34. Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan (kabupaten/kota).	Jumlah jarak dr kecamatan ke pusat pemerintahan dibagi jumlah kecamatan.
		35. Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan kabupaten/ kota.	Jumlah waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan dibagi jumlah kecamatan.

3.2.4 Metode Penilaian

3.2.4.1 Metode Rata-rata

Penentuan metode rata-rata membandingkan besaran/ nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/ nilai rata-rata keseluruhan daerah disekitamya. Menggunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel. 3.2

NiIai Interval dan Skor

Klasifikasi/Kualitas	Nilai Skor	Interval Nilai
Sangat Mampu	5	≥80%
Mampu	4	≥60%
Kurang Mampu	3	≥40%
Tidak Mampu	2	≥20%
Sangat Tidak Mampu	1	≥10%

3.2.4.2 Metode Kuota

Metode kuota menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk

pembentukan kabupaten adalah 5 x rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 x jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya.

3.2.5. Bobot Penilaian

Bobot untuk setiap kriteria/indikator yang digunakan dalam penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Bobot Penilaian

No	Faktor dan Indikator	Bobot
1.	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk 2. Kepadatan penduduk	15 5
2.	Kemampuan Ekonomi	15
3.	Potensi Daerah	15
4.	Kemampuan Keuangan	15
5.	Sosial Budaya	5
	1. Rasio sarana peribadatan/10.000 penduduk 2. Rasio fasilitas lapangan olahraga/10.000 penduduk 3. Jumlah balai pertemuan	2 2 1
6.	Sosial Politik	5
7.	Luas Daerah	5
8.	Pertahanan	5
9.	Keamanan	5
10.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
11.	Rentang Kendali	5
	Total	100

3.2.6. Skor Kelulusan Suatu Daerah

Nilai indikator adalah hasil perkalian skor clan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Tabel 3.4
Skor Kelulusan Suatu Daerah

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

3.2.7. Kriteria Kelulusan

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru jika calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420 s/d 500) atau mampu (340 s/d 419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80 s/d 100), kemampuan ekonomi (60 s/d 75), potensi daerah (60 s/d 75), dan kemampuan keuangan (60 s/d 75).

Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator kurang mampu, tidak mampu, dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan nilai indikator faktor kependudukan < 80 atau faktor kemampuan ekonomi < 60, atau faktor kemampuan keuangan < 60.[]

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS HASIL KAJIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Pada tahun 2005, Kabupaten Indragiri Hilir dimekarkan dari 17 kecamatan menjadi 20 kecamatan dengan 174 desa dan 18 kelurahan.

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 km^2 yang terdiri dari daratan 11.605,97 km^2 dan perairan 7.207 km^2 (perairan umum 889 km^2 dan laut 6.318 km^2) dalam posisi 0^o 36' lintang utara, 1° 07 lintang selatan, 104° 100 bujur barat dan 102° 32 bujur timur. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah

Sebelah Utara	:	*Kabupaten Pelalawan*
Sebelah Selatan	:	*Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Prov. Jambi)*

Sebelah Barat : *Kabupaten Indragiri Hulu*
Sebelah Timur : *Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Prov. KEPRI)*

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungail parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah yang Iainnya adalah melalui sungai/parit-parit dengan menggunakan kendaraan *speed boat* maupun pompong dan perahu. Di antara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah sungai Indragiri yang hulunya berada di danau singkarak (Provinsi Sumatera Barat) dan bermuara di selat berhala.

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965, secara administratif Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dengan seorang Wakil Bupati, dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari I Sekretariat Daerah, I Sekretariat DPRD, 7 Badan, 16 Dinas dan 5 Kantor serta 20 Kecamatan, sekretaris daerah membawahi 3 (tiga) asisten yaitu, Asisten Pemerintahan (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan (II), Asisten Administrasi Umum (II1).

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 670.814 jiwa yang terdiri dari 337.990 jiwa penduduk laki-laki dan 332.824 jiwa penduduk perempuan. Banyaknya rumah tangga berdasarkan hasil sensus kependudukan tahun 2006 yaitu tercatat sebanyak 156.714 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga.

Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir tetap stabil meskipun pada masa krisis, hal ini dikarenakan kebijakan yang ditempuh sudah disinergikan dengan berbagai program terpadu guna meningkatkan dan mempercepat proses penguatan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi sumber daya daerah dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dengan kondisi gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir di atas kiranya perlu untuk dikaji Iebih dalam mengingat kuatnya dorongan dan desakan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk diadakannya pembentukan daerah otonom baru dalam rangka percepatan pembangunan, yakni Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemerkaran,

Kabupaten Indragiri Hilir Selatan, Kota Indragiri, yang akan ditinjau secara 9 (satu) persatu berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2007.

4.2 Gambaran Umum Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran

Secara administratif rencana wilayah Kabupaten Indragiri Hilir setelah pemekaran terdiri dari 8 kecamatan, masing-masing Kecamatan yang direncanakan tergabung dengan Kabupaten INHIL ialah Mandah, Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong, Pulau Burung, Gaung Anak Serka, Gaung, dan Concong, dengan jumlah desa/kelurahan 86. Penduduk di kawasan ini mayoritas didominasi oleh 4 suku utama yaitu, suku Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa, selain itu terdapat juga suku-suku lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara geografis, calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran terletak di sebetah utara Kota Tembilahan dengan luas wilayah 5.385,33 Km2 atau 46,40% dari wilayah induk secara keseluruhan.

Sebagian besar wilayah terdiri dari daerah datar rawa gambut, hutan bakau, hutan sagu yang cukup luas dengan kemiringan tanah 0-2 %, dengan iklim tropis, dengan curah hujan relatif kecil.

Calon Kabupaten ini memiliki 5 (lima) sungai yaitu, sungai Gaung yang terdapat di Kecamatan Gaung dan Gaung Anak Serka, Sungai Anak Serka di Kecamatan Gaung Anak Serka, Sungai Guntung terdapat di Kecamatan Kateman, Teluk Belengkong, Sungai Danai di Kecamatan Pulau Burung, dan Sungai Kateman di Kecamatan Kateman dan Pelangiran. Sumberdaya alam yang dimiliki mineral dan bahan gatian di daerah ini relative sedikit, namun demikian potensi pertanian cukup besar terutama tanaman yang dapat tumbuh subur dilahan gambut, seperti tanaman pangan dan hortikultura, kelapa dalam maupun kelapa hibrida, kelapa sawit, pinang, kakao, haramai dan sebagainya.

4.3 Deskripsi dan Analisis Hasil Kajian

Bagian ini memaparkan berbagai data, hasil kajian, dan analisis atas hasil kajian mengenai (tingkat) kelayakan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran, melalui pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir yang rencananya akan dimekarkan menjadi 3 (tiga) daerah otonom yaitu, Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran (INHIL), Kabupaten

Indragiri Selatan (INSEL), dan Kota Indragiri, sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh PP No. 78 Tahun 2007 berupa (1) Kependudukan, (2) Kemampuan Ekonomi,(3) Sosial Potensi Daerah,(4) Kemampuan Keuangan, (5) Sosial Budaya, (6) Sosial Politik, (7) Luas Daerah, (8) Pertahanan, (9) Keamanan, (10) Tingkat Kesejahteraan masyarakat, (11) Rentang Kendali, dan (12) Pertimbangan Lain.

Semua ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kemampuan Calon Kabupaten Indaragiri Hilir Pasca pemekaran, dan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pasca-pemekaran. Penilaian atas tingkat kemampuan ini sejalan dengan maksud dan tujuan otonomisasi daerah-daerah di Indonesia, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan PP.78 Tahun 2007).

4.3.1 Kriteria Jumlah Penduduk

Kriteria jumlah penduduk pada kajian ini hanya metihat dart jumlah penduduk dan kepadatan penduduk secara keseluruhan.

Jumlah penduduk per kecamatan di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir pascapemekaran adalah sebanyak 254.182 jiwa penduduk dengan kepadatan 47,2 (jiwa/km^2). Untuk lebih jelas sebagaimana dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Jumlah dan Kepadatan Penduduk CalonKabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran

Kecamatan	Jml Desa	Luas Wilayah (km)	Rumah tangga	Penduduk 2008 (jiwa)			Kepa datan Pen duduk (jiwa/ km²)
				LK	PR	Jml	
Kab.Inhil							
1. Mandah	12	1.479,24	10.703	22.660	25.765	48.422	33
2. Kateman	8	561,09	10.353	23.645	23.643	47.288	84
3. Pulau Burung	14	520,00	8.007	15.582	15.082	30.934	59
4. Pelangiran	14	531,22	7.449	17.241	14.476	31.717	60
5. T.Belengkong	13	499,00	4.005	8.094	7.001	15.095	30
6. Concong	6	160,29	3.049	7.303	6.317	13.620	85
7. Gaung	11	1.021,74	7.222	22.798	20.561	43.359	42
8. GAS	8	612,75	5.976	11.688	12.047	23.753	39
Total	**86**	**5.385.33**	**56.764**	**129.011**	**125.171**	**254.182**	**47**

Sumber : *Data Olahan,Tahun 2009*

Pada tabel di atas terlihat bahwa penduduk di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran yang terbanyak ada di kecamatan Mandah dan Gaung, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di kecamatan Concong. Pada tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat bahwa daerah yang paling padat penduduknya adalah di kecamatan di Concong ini disebabkan oleh luas wilayah kecamatan Concong yang relatif kecil, jumlah kepadatan penduduk terkecil seperti terlihat pada tabel 4.1 adalah di kecamatan Mandah, ini juga disebabkan oleh faktor wilayah Kecamatan Mandah yang begitu luas.

4.3.2 Kemampuan Ekonomi

4.3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas adanya sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan perubahan structural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang. Secara umum Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung berdasarkan 2 (dua) pendekatan yaitu Produk Domestik Regional Brotu (PDRB) berdasarkan Atas Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Brotu (PDRB) berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan, dalam kajian ini PDRB dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan dari indikator-indikator dalam menghitung PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yakni, *Pertama,* pertanian, peternakan, perikanan, Hutbun, *kedua*, pertambangan dan penggalian, *ketiga*, industri pengolahan, *keempat*,listrik dan air bersih, *kelima,* bangunan, *keenam*, perdagangan, hotel, *ketujuh*, perhubungan dan komunikasi, kedelapan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta kesembilan, jasa jasa maka PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran pada Tahun 2008 berdasarkan atas harga berlaku adalah 5.918.073 rata-rata pertumbuhan 59.180 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel. 4.2
PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2008 (dalam juta rupiah)

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata pertumbuhan 2005-2008 (%)
Kab.Inhil					
1. Mandah	534.035	645.223	695.445	810.654	107,414
2. Kateman	670.048	683.053	720.577	790.345	114,560
3. Pulau Burung	333.368	470.789	650.980	750.679	88,232
4. Pelangiran	345.656	485.574	650.780	730.546	96,502
5. T.Belengkong	355.757	421.786	610.342	720.008	84,315
6. Concong	321.213	398.476	580.980	710.169	80,433
7. Gaung	302.356	390.357	540.657	705.672	77,561
8. GAS	341.855	400.453	539.795	700.540	79,305
Total	**3.204.292**	**3.895.711**	**4.989.556**	**5.918.073**	**720.305**

Sumber : *Data OlahanTahun 2009*

Tabel. 4.3
PDRB Non Migas Perkapita
Calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran

Kecamatan	Jumlah Penduduk	PDRB Tahun 2008	PDRB Per Kapita
1. Mandah	48.422	810.654	16.741
2. Kateman	47.288	790.345	16.713
3. Pulau Burung	30.934	750.679	24.267
4. Pelangiran	31.717	730.546	23.033
5. T.Belengkong	15.095	720.008	47.698
6. Concong	13.620	710.169	52.141
7. Gaung	43.359	705.672	16.275
8. GAS	23.753	700.540	29.492
Total	**254.182**	**5.918.073**	**23.282**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.3.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan produksi rill barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi di kabupaten Indragiri Hilir, dan Calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran, proses pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh kombinasi yang kompleks dari faktor-faktor ekonomi, Sosial (termasuk pendidikan dan keterampilan) demografi, geografi, politik kebijakan ekonomi dan faktor Iainnya, laju pertumbumbuhan ekonomi calon wilayah kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2005-2008, yanga mana dihitung dengan menggunakan indikator yang sama. Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor dari tahun ke tahun dengan menghilangkan inflasi pada tahun yang bersangkutan, maka PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan (riil) pada tahun 2008 adalah 1.571.613 dengan rata-rata laju pertumbuhan 246,207 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
PDRB Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Harga Kostan Tahun 2005-2008 Pasca Pemekaran

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata pertumbuhan 2005-2008 (%)
Kab.Inhil					
1. Mandah	234.035	245.223	195.425	215.654	35,613
2. Kateman	250.048	263.053	220.177	230.345	38,544
3. Pulau Burung	200.368	220.709	150.670	210.679	31,297
4. Pelangiran	190.656	198.594	150.370	200.546	29,606
5. T.Belengkong	173.757	185.706	160.342	198.008	28,712
6. Concong	161.213	190.496	180.900	190.169	28,911
7. Gaung	172.356	186.357	160.157	170.672	27,581
8. GAS	168,915	184.335	139.805	155.540	25,943
Total	**1.551.348**	**1.674.473**	**1.357.846**	**1.571.613**	**246,207**

Sumber : *Data Olahan Tahun, 2009*

Tabel 4.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran

Kecamatan	2007	2008	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kab.Inhil			
1. Mandah	195.425	215.654	9.380
2. Kateman	220.177	230.345	4.414
3. Pulau Burung	150.670	210.679	28.483
4. Pelangiran	150.370	200.546	25.019
5. T.Belengkong	160.342	198.008	19.022
6. Concong	180.900	190.169	4.874
7. Gaung	160.157	170.672	6.160
8. GAS	139.805	155.540	10.116
Total	**1.357.846**	**1.571.613**	**13.601**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.3.2.3 Kontribusi PDRB Non Migas terhadap PDRB Provinsi Riau

Penilaian atas subindikator ini bermanfaat untuk memperoleh gambaran mengenal calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran ini dapat dilihat dalam dua hal. *Pertama,* kemmpuan dalam membentuk penghasilan domestik di kawasan Riau sebagai basis kesejahteraan (khususnya kemakmuran ekonomi) masyarakat sebagai stu entitas otonom di Provinsi Riau. *Kedua,* daya dukung calon kabupaten sebagai daerah otonom baru dalam menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan kawasan.

Data terakhir menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hilir tanpa pemekaran berdasarkan harga kostan Non Migas Tahun 2005-2008 Pascapemerkeran adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel. 4.6

PDRB Kabupaten Indragiri Hllir Pasca Pemekaran

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata pertumbuhan 2005-2008 (%)
Kab.Inhil					
1. Mandah	234.035	245.223	195.425	215.654	35,613
2. Kateman	250.048	263.053	220.177	230.345	38,544
3. Pulau Burung	200.368	220.709	150.670	210.679	31,297
4. Pelangiran	190.656	198.594	150.370	200.546	29,606
5. T.Belengkong	173.757	185.706	160.342	198.008	28,712
6. Concong	161.213	190.496	180.900	190.169	28,911
7. Gaung	172.356	186.357	160.157	170.672	27,581
8. GAS	168,915	184.335	139.805	155.540	25,943
Total	**1.551.348**	**1.674.473**	**1.357.846**	**1.571.613**	**246,207**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

Tabel 4.7
Kontribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran terhadap PDRB Propinsi Riau

PDRB Indragiri Hilir Pasca Pemekaran Tahun 2008	PDRB Propinsi Riau	Kontribusi PDRB
5.918.073.000	19.034.983,66	49,717

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.3.3 Potensi Daerah

Potensi Daerah guna mendukung rencana pembentukan daerah otonom baru (Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran) cukup memadai, ini terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut, seperti adanya lembaga keuangan, kelompok pertokoan, pasar, sekolah, pegawai pemerintah, kesehatan, panjang jalan, pekerja, dan rasio pegawai negeri sipil (PP No 78 tahun 2007).

4.3.3.1 Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk

4.3.3.1.1 Lembaga Keuangan

Bank merupakan salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan bank di suatu daerah dapat mengindikasikan kemajuan ekonomi suatu wilayah. Data menunjukkan bahwa dari 20 kecamatan, diwilayah kabupaten Indragiri Hilir terdapat sesejumlah 10 Bank, diwilayah calon

pemerkaran terdapat 2 bank yang terletak di kecamatan Kateman (Guntung).

Kondisi sebaran bank di wilayah kecamatan dan rasionya terhadap 10.000 penduduk di wilayah calon kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran dapat dilihat pada tabel 4.8 :

Tabel 4.8

Rasio Bank Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Bank	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	48.422	1	206.517
2. Kateman	47.288	2	422,940
3. Pulau Burung	30.934	1	323.268
4. Pelangiran	31.717	1	315.288
5. T.Belengkong	15.095	1	662.471
6. Concong	13.620	1	734.214
7. Gaung	43.359	1	230.632
8. Gaung Anak Serka	23.753	1	420.999
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**254.182**	**9**	**354.076**

Sumber : *Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.3.3.1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank Per 10.000 Penduduk

Kenyataan bank dalam kenyataannya tidak dapat selalu diakses oleh pelaku ekonomi di daerah karena berbagai faktor. Oleh karena itu di daerah-daerah berkembang lembaga keuangan lain di luar bank, yang disebut lembaga keuangan bukan bank. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha selain bank yang menjalankan fungsi dan kinerjanya seperti bank, yakni menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kredit

kepada masyarakat. Badan usaha bukan bank diantaranya meliputi asuransi, pegadaian dan koperasi.

Dari data terakhir, terlihat bahwa lembaga bukan bank lebih terkosentrasi di daerah-daerah pedesaan (koperasi). Hal ini terlihat pada tabel 4.9 :

Tabe14.9
Rasio Bukan Bank Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Bukan Bank	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	48.422	17	3.510
2. Kateman	47.288	21	4.440
3. Pulau Burung	30.934	19	6.142
4. Pelangiran	31.717	19	5.990
5. T.Belengkong	15.095	14	9.274
6. Concong	13.620	5	3.671
7. Gaung	43.359	38	8.764
8. Gaung Anak Serka	23.753	22	9.261
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**254.182**	**155**	**6.097**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.3.3.2 Fasilitas Perekonomian

Untuk mendukung proses perekonomian di daerah ini, terdapat fasilitas niaga seperti pasar, pertokoan, dan kios yang cukup memadai hingga proses transaksi niaga dapat berjalan dengan balk. Adapun fasilitas perdagangan yang ada diwilayah calon pemekaran kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Fasilitas Perekonomian
(Pertokoan dan Swalayan) Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pertokoan (Unit)	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	48.422	349	72.074
2. Kateman	47.288	300	63.441
3. Pulau Burung	30.934	123	39.762
4. Pelangiran	31.717	289	91.118
5. T.Belengkong	15.095	115	76.184
6. Concong	13.620	199	146.108
7. Gaung	43.359	364	83.950
8. Gaung Anak Serka	23.753	138	58.097
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**254.182**	**1.877**	**73.844**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

Tabel 4.11
Fasilitas Perekonomian (Pasar) Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pasar (Unit)	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	48.422	12	2.478
2. Kateman	47.288	4	845
3. Pulau Burung	30.934	2	646
4. Pelangiran	31.717	11	3.468
5. T.Belengkong	15.095	1	662
6. Concong	13.620	1	734
7. Gaung	43.359	2	461
8. Gaung Anak Serka	23.753	5	2.104
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**254.182**	**38**	**1.494**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.3.3.3 Pendidikan

Wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah penduduk 254.182 jiwa memiliki jumlah rakyatnya yang telah tercerahkan. , Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah menjadi skala prioritas disamping pembangunan ekonomi sebagai contoh empirik misalnya bahwa Gubernur Riau periode 2009-2014 (H. M. Rusli Zainal) merupakan putera yang berasal dad daerah ini, mayoritas penduduknya memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dari tingkat dasar hingga menengah dan bagi pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan menengahnya, mereka kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi diluar, dan saat ini Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Universitas dan Sekolah Tinggi, ini menandakan bahwa pendidikan perguruan tinggi sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Berikut keterangan jumlah saran dan usia penduduk yang berusia sekolah

Tabel 4.12
Fasilitas dan Usia Pendidikan

Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)		Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio (X)
SD	197	14.410	0.0136
SLTP	46	7.205	0.00638
SLTA/SMK	13	5.764	0.00225
Univ/Sekolah Tinggi		1.441	0
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**256**	**28.821**	**0.00888**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

4.3.3.4 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dimilik oleh calon Kabupaten Indragiri Hilir ini meliputi Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling serta sejumlah tenaga medis, dokter, perawat dan bidan, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.13
Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Kesehatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Puskesmas Rawat Inap	9	254.182	0.0000354
Puskesmas Pembantu	44	254.182	0.000173
Puskesmas Keliling	1	254.182	0.000004
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**54**	**254.182**	**0.000212**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

Tabel 4.14
Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk

Tenaga Medis		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Dokter	6	254.182	236
Perawat	92	254.182	3.619
Bidan	47	254.182	1.849
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**145**	**254.182**	**5.704**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

4.3.3.5 Persentase RT yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu, Perahu Motor atau Kapal

Dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor balk roda 2,4 atau perahu motor, atau kapal dengan berbagai jenis, rata-rata memiliki roda 2 dan perahu, dengan asumsi bahwa sarana transportasi melalui jalur sungai dan taut sangat dominan dalam dinamika ekonomi mereka.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu, Perahu Motor atau Kapal

Jenis Kendaraan		Jumlah Rumah Tangga	Rasio (X)
Kendaraan Roda 4	-	-	-
Kendaraan Roda 2	2.313	56.764	4.07
Perahu	2.735	56.764	4.48
Speat Boat dan Sejenis	280	56.764	439.27
Kapal Tongkang	20	56.764	35.23
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**5.348**	**254.182**	**9.42**

4.3.3.6 Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah Rumah Tangga

Salah satu kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat adalah ketersedian fasilitas listrik. Penggunaan listrik juga merupakan salah satu indikator dari tingkat kemajuan masyarakat disuatu daerah. Akses masyarakat terhadap listrik diwilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut :

Tabel 4.16
Persentase Pelanggan Listrik (PLN/Non PLN)
Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah R.Tangga Pelanggan Listrik (PLN/Non PLN)	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	10.703	2.112	19.73
2. Kateman	10.353	4.154	40.12
3. Pulau Burung	8.007	1.907	23.81
4. Pelangiran	7.449	512	6.87
5. T.Belengkong	4.005	1.169	29.18
6. Concong	3.049	1.509	49.49
7. Gaung	7.222	1.661	22.99
8. Gaung Anak Serka	5.976	2.652	44.37
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**56.764**	**15.676**	**27.61**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009, Data Diolah*

Berdasarkan tabel di atas persentase pelanggan listrik untuk wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran adalah 27.61%. Pelanggan terbanyak untuk wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir terpusat di kecamatan Kateman.

4.3.3.7 Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Fasilitas panjang jalan terdapat diwilayah calon Kabupaten Indragin Hilir Pasca pemekaran menurut statusnya terdiri dari jalan kabupaten, jalan kota adminitratif, jalan desa dan jalan desa tertinggal. Panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor

di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17
Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Kecamatan	Jumlah Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan Bermotor	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	74.450	2.313	0.03106
2. Kateman	96.630	2.313	0.02393
3. Pulau Burung	11.750	2.313	0.1968
4. Pelangiran	21.292	2.313	0.1086
5. T.Belengkong	7.853	2.313	0.2945
6. Concong	48.472	2.313	0.04771
7. Gaung	131.522	2.313	0.01758
8. Gaung Anak Serka	32.013	2.313	0.07225
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**383.982**	**2.313**	**0.006023**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.3.3.8 Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas

Di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran, jumlah pekerja yang berpendidikan minimal SLTA adalah sebanyak 34.301 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia 18 Tahun ke atas di wilayah calon kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran adalah 171.709 orang. Persentase pekerja yang berpendidikan SLTA ke atas terhadap jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut :

Tabel 4.18
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas

Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia> 18 Tahun	Jumlah Pekerja berpendidikan SLTA	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	32.685	6.537	20
2. Kateman	30.893	6.179	20
3. Pulau Burung	21.079	4.216	20
4. Pelangiran	20.969	4.194	20
5. T.Belengkong	8.754	1.715	20
6. Concong	10.069	2.014	20
7. Gaung	29.521	5.904	20
8. Gaung Anak Serka	17.712	3.542	20
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**171.709**	**34.301**	**20**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka ,2009, Data Diolah*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah pekerja berpendidikan SLTA ke atas terhadap jumlah penduduk di atas usia 18 tahun, pada wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran adalah sebesar 20%.

4.3.3.9 Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas

Di wilayah calon kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran, jumlah pekerja yang berpendidikan minimal SI adalah sebanyak 772.63 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran adalah 154.530 orang. Persentase pekerja yang berpendidikan

S1 ke atas terhadap jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah calon kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut :

Tabel 4.19
Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas

Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia> 25 Tahun	Jumlah Pekerja berpendidikan SLTA	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	29.416	147.08	50
2. Kateman	27.803	139.01	50
3. Pulau Burung	18.971	94.85	50
4. Pelangiran	18.872	94.36	50
5. T.Belengkong	7.896	39.48	50
6. Concong	9.062	45.31	50
7. Gaung	26.569	132.84	50
8. Gaung Anak Serka	15.941	79.70	50
Rasio Calon Kab. Inhil Pasca Pemekaran	**154.530**	**772.63**	**50**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.3.10 Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk

Salah satu komponen penting dalam pelayanan Pemerintah Daerah adalah keberadaan pegawai negeri sipil. Asumsinya, semakin banyak pegawai negeri sipil maka semakin efektif pelaksanaan tugas- tugas Pemerintah Daerah khususnya pelayanan masyarakat. Dilihat dari sisi ini, jumlah pegawai negeri sipil yang ada di wilayah calon kabupaten Indragiri Hilir

Pascapemekaran adalah sebanyak 1.364 sedangkan jumlah penduduk yang harus dilayani di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran adalah sebanyak 254.182 orang. Jumlah Pegawai negeri sipil dan jumlah penduduk beserta rasionya dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut :

Tabel 4.20
Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap 10.000 Penduduk

Instansi		Jumlah PNS Gol I/II/III/IV	Rasio (X)
Dinas Pendidikan	1.032	254.182	40.60
Pegawai Kecamatan	101	254.182	3.97
Penyuluh Pertanian	86	254.182	3.38
Kesehatan	145	254.182	5.70
Rasio Calon Kab. Baru	**1.364**	**254.182**	**53.66**

***Sumber :** BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.4 Kemampuan Keuangan

Pembentukan Kabupaten Indragieri Hilir Pasca pemekaran melalui pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir membawa konsekwensi berupa pelaksanaan otonomi dimasing-masing wilayah baru. Calon Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan memiliki kemampuan sendiri yang memadai dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Dana ini pada dasarnya bersumber dari masyarakat setempat, yang banyak dipengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan calon kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran menurut PP No. 78 Tahun 2007 ada 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah PDS, Rasio PDS terhadap jumlah penduduk, dan rasio PDS terhadap PDRB Non Migas.

4.3.4.1 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri

Jumlah Penerimaan Daerah sendiri adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil propinsi. Data terakhir penerimaan daerah sendiri calon Kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut :

Tabel 4.21
Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri

Kabupaten /Kota	Penerimaan Asli Daerah (Rp)
Indragiri Hilir	798.508.112.910
Jumlah	**798.508.112.910**
Calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran	**399.540.565.000**
Kabupaten Induk	**398.967.547.910**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.4.2 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk

Data terakhir menunjukkan, jumlah penerimaan daerah sendiri terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut :

Tabel 4.22
Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri	Jumlah Penduduk	Rasio
399.540.565.000	**254.182**	**157**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.4.3 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap PDRB Non Migas

Data terakhir menunjukkan, jumlah penerimaan daerah sendiri terhadap PDRB Non Migas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut :

Tabel 4.23
Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap PDRB Non Migas

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri	PDRB Non Migas Tahun 2008	Rasio
399.540.565.000	1.571.613	254.22

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.5 Sosial Budaya

4.3.5.1 Fasilitas Peribadatan

Sarana ibadah yang ada di wilayah ini menunjukkan adanya spirit keberagaman yang tinggi dikalangan penduduk wilayah kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran. Suatu yang sangat penting bagi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya harmonisasi hidup, sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi proses orientasi pembangunan melalui kebijakan pemerintah setempat yang dilandasi oleh nilai-nilai religius yang ada dimasyarakat yang berorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari jumlah sarana peribadatan yang ada di wilayah ini menunjukkan adanya pluralisme dan kemajemukan rakyatnya dalam memeluk suatu keyakinan agama. Sarana peribadatan yang tersedia terdiri dari musholla,

masjid, gereja maupun vihara. Rasio tempat peribadatan per 10.000 penduduk di wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran adalah sebesar 24.27 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.24
Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Sarana Peribadatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Masjid	305	254.182	11.10
Surau/Mushollah	308	254.182	12.12
Gereja	-	254.182	-
Vihara	4	254.182	0.16
Rasio Calon Kab. Baru	**617**	**254.182**	**24.27**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.5.2 Fasilitas Olahraga dan Seni

Untuk mendukung proses kreatifitas seni dan olahraga di wilayah calon kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran terdapat fasilitas berupa gedung pertunjukkan dan olahraga, sehingga proses berkesenian sebagai asset dan potensi dapat dikembangkan di samping mempromosikan potensi budaya khususnya melalui jalur seni, di wilayah ini sarana tersebut sudah ada seperti dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.25
Fasilitas Olahraga dan Seni Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Seni dan Balai Pertemuan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Pementasan Seni	4	254.182	157.36
Gedung Serba Guna	8	254.182	314.73
Balai Pertemuan	76	254.182	2.989
Rasio Calon Kab. Baru	**88**	**254.182**	**3.462**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

Jumlah lapangan olah raga meliputi sepak bola, bola volley, bulu tangkis, sepak takraw dan lain-lain terdapat 292. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.26
Fasilitas Olahraga Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Seni dan Balai Pertemuan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Lapangan Sepak Bola	86	254.182	3.383
Lapangan Sepak Takraw	76	254.182	2.950
Lapangan Bola Volly	86	254.182	3.383
Lapangan Badminton	45	254.182	1.770
Rasio Calon Kab. Baru	**292**	**254.182**	**11.487**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.6 Sosial Politik

4.3.6.1 Rasio Penduduk yang ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang mempunyai Hak PIN

Adanya konstitusi yang memberikan jaminan kepada segenap warga Negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya, hal ini dimanfaatkan oleh warga dan masyarakat calon kabupaten Indragin Hilir Pasca Pemekaran. Kesadaran politik masyarakat calon wilayah kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran dalam menayalurkan aspirasi politiknya seperti terlihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.27
Jumlah Hak Pilih

Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun atau sudah kawin	Jumlah Penduduk yang Mencoblos pada Pemilu	Rasio (X)
Kab.Inhil Pasca Pemekaran			
1. Mandah	32.685	29.416	0.90
2. Kateman	30.893	27.803	0.90
3. Pulau Burung	21.079	18.971	0.90
4. Pelangiran	20.969	18.872	0.90
5. T.Belengkong	8.754	7.896	0.90
6. Concong	10.069	9.062	0.90
7. Gaung	29.521	26.569	0.90
8. Gaung Anak Serka	17.712	15.941	0.90
	171.709	**154.538**	**0.90**

Sumber : *Data Olahan*

4.3.6.2 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Pada wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 862 oragnisasi kemasyarakatan yang terdiri dari OKP dan organisasi Profesi dan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.28
Jumlah Organsasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran

Kecamatan	Jumlah
LSM	20
OKP	300
ORMAS	542
Total	**862**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009*

4.3.7 Luas Daerah

Dari segi luas wilayah, luas wilayah kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran secar keseluruhan adalah 5.385.33 Km^2 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.29
Luas Wilayah Keseluruhan

Kecamatan	Luas Wilayah Keseluruhan (KM^2)
1. Mandah	1.479,24
2. Kateman	561,09
3. Pulau Burung	520,00
4. Pelangiran	531,22
5. T.Belengkong	499,00
6. Concong	160,29
7. Gaung	1.021,74
8. Gaung Anak Serka	612,75
Jumlah Luas Wilayah Pemukiman (KM^2)	**5.385.33**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009*

4.3.7.1 Luas wilayah yang efektif untunk digunakan untuk pemukiman dan Industri

Kriteria luas daerah pada kajian ini dilihat dari sub indikator luas wilayah keseluruhan serta luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan :

Tabet 4.30
Luas Wilayah yang Efektif untuk
digunakan untuk Pemukiman dan Industri

Kecamatan	Luas Wilayah Pemukiman	Luas Wilayah Industri
1. Mandah	539.62	939.62
2. Kateman	190.54	280.63
3. Pulau Burung	190.66	329.44
4. Pelangiran	165.61	365.61
5. T.Belengkong	171.50	327.50
6. Concong	44.145	116.145
7. Gaung	310.87	710.87
8. Gaung Anak Serka	221.37	391.375
Jumlah Pemukiman	**1.834.315**	
	Jumlah Luas Wilayah Industri Km²	**3.551.18**
	Jumlah Luas Wilayah Keseluruhan	**5.385.33**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

Pada tabel di atas terlihat bahwa kecamatan yang terluas adalah kecamatan Mandah yang juga merupakan calon ibu kota kabupaten Indragiri Hilir jika berhasil menjadi daerah otonom baru, sedangkan wilayah terkecil adalah di kecamatan concong.

4.3.8 Pertahanan

4.3.8.1 Raslo jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. Kedudukan strategis wilayah calon pemekaran Kabupaten

Indragiri Hilir sebagai kawasan perbatasan, disamping merupakan asset dalam pengembangan wilayah sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, tantangan,

hambatan, dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan Negara jika tidak dikelola dengan serius, untuk itu aspek pertahanan sangat menentukan terhadap pemekaran suatu wilayah berdasarkan PP 78 Tahun 2007, jika dilihat dari aspek ketersediaan aparat TNI, balk angkatan darat, laut dan udara. Untuk wilayah calon pemekaran wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran, ketersediaan aparat hanya ada dad TNI angkatan darat dengan jumlah Personil sebanyak 78 Personil. Jika diperbandingkan dengan luas wilayah indragiri Hilir Pascapemekaran, maka ratio personil terhadap luas wilayah keseluruhan adalah 5.385.33km^2 (dalam Ha) sebesar 0,0004642. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.31 berikut ini :

Tabel 4.31

Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah

Pertahanan/Kesatuan		Luas Wilayah	Rasio (X)
Personil TNI AD	250	5.385.33 km2	0.0004642
Personil TNI AL	-	5.385.33 km2	-
Personil TNI AU	-	5.385.33 km2	-
Total	**250**	**5.385.33 km2**	**0.0004642**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.8.2 Karakteristik Wilayah, dilihat dari sudut Pandang Pertahanan

Kedudukan strategis wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kawasan perbatasan, disamping merupakan asset dalam pengembangan wilayah sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan

Negara jika tidak dikelola dengan serius. Karakterisik wilayah calon wilayah pemekaran Indragiri Hilir sangat rawan dikarenakan wilayah ini terdiri dari daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

4.3.9 Keamanan

4.3.9.1 Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap Jumlah penduduk

Jika dilihat dari aspek keamanan dalam menjaga ketertiban wilayahnya, maka jumlah personil yang ada di wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran adalah 232 personil. Jika diperbandingkan dengan luas wilayah Indragiri Hilir Pasca Pemekaran, maka ratio personil terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,000430.

Tabel 4.32
Rasio Jumlah personil aparat Keamanan
Terhadap Jumlah Penduduk

Pertahanan/Kesatuan		Luas Wilayah	Rasio (X)
Personil POLRI	232	5.385.33 km2	0.000430
Total	**232**	**5.385.33 km2**	**0.000430**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.10 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

4.3.10.1 Indek Pembangunan Manusia

Tujuan pembangunan millennium (Milleniurn Development Goals- MDGs) adalah mengatasi delapan tantangan utama pembangunan, kedelapan tantangan itu bersumber dari

Dekiarasi Milennium PBB, sebuah komitmen global mengenai pembangunan yang dibuat oleh para pemimpin dunia dan disetujui oleh Sidang Umum PP dimana pencapaiannya secara global harus dilakukan pada 2015. Untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam PP No. 78 Tahun 2007 adalah Indeks Pembangunan Manusia. Adapun indeks Pembangunan Manusia untuk calon wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilihat dari taraf hidup manusia adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.33
Indek Pembangunan Manusia

Kabupaten INHIL Pascapemekaran	Indek Pembangunan Manusia			
	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata2 lama sekolah	IPM
Tahun 2007	69.9	98.5	6.9	71.40
Tahun 2008	70.7	98.2	7.65	73.87

Sumber : *BPS Indragiri Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.3.11 Rentang Kendali

Rentang kendali merupakan indikator yang mengisyaratkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa pemerintah. Rentang kendali ini diindikasikan dari jarak tempuh dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan ke Ibukota Kabupaten. Berdasarkan kondisi sebelum pemekaran, wilayah Indragiri Hilir memiliki jarak rata-rata ke Ibukota Tembilahan sejauh 111,17 KM dengan rata-rata waktu tempuh mencapai 2,5 jam.

Sedangkan wilayah sisanya setelah pemekaran berjarak ratarata 72,79 Km dengan waktu tempuh rata-rata 1,64 jam. Dengan pemekaran, jarak tempuh dan waktu tempuh untuk menjangkau fasilitas layanan pemerintah menjadi kecil di wilayah Indragiri Hilir, dibandingkan sebelum pemekaran. Hal ini didasarkan dari rata-rata jarak dan waktu tempuh antar kecamatan di wilayah Indragiri hilir hanya sekitar 68 km untuk jarak tempuh dan sekitar 1,3 jam untuk waktu tempuh. Jarak dan waktu tempuh untuk masing-masing kecamatan di wilayah Indragiri Hitir di tujukan pada tabel berikut :

Tabel 4.34
Rentang Kendali

Kecamatan	Jarak (km) dan waktu tempuh (jam) antar kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir							
	Mandah	Kateman	P.Burung	Pelangiran	Teluk Belengkong	Concong	Gaung	GAS
Mandah		70km	170km	50km	130km	59km	30km	35km
Kateman	1.40Jam		70km	75km	100km	70km	50km	30km
P. Burung	3Jam	2Jam		30km	50km	100km	130km	75km
Pelangiran	1Jam	1.30Jam	0.30Jam		75km	100km	75km	75km
T.Belengkong	2.6Jam	2Jam	1Jam	1.30jam		100km	130km	130km
Concong	1.20Jam	3Jam	2Jam	2jam	2Jam		75km	75km
Gaung	1Jam	1.30Jam	2.30Jam	1.30km	2.30Jam	1.30Jam		30km
GAS	1Jam	1.30Jam	2.30Jam	1.30km	2.30Jam	1.30Jam	15 Menit	
Jarak Rata-rata antar Kecamatan (jam) 50 km/Jam								
Waktu Tempuh Rata-rata antar kecamatan (Jam) 50km/jam								

Sumber : *Data olahan,2009*

4.3.11.1 Rata-Rata Jarak Kecamatan Ke Pusat Pemerintahan

Rata-rata jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten untuk wilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran adalah 1.35 jam, Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Pasca

pemekaran akan membawa pada perubahan bagi masyarakat yang selama ini bertempat tinggal diwilayah calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran, yakni akan semakin dekatnya jarak tempuh kepusat pemerintahan kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.35
Rata-Rata Jarak Kecamatan Ke Pusat Pemerintahan

Kecamatan	Jarak (km) Ibukota Kabupaten (Mandah)	Waktu Tempuh (jam) ke Ibukota Kabupaten
1. Mandah	0	0
2. Kateman	70	1,4
3. Pulau Burung	170	3,4
4. Pelangiran	50	1
5. T.Belengkong	130	2,6
6. Concong	59	1,2
7. Gaung	30	0,6
8. Gaung Anak Serka	35	0,6
Rata-rata calon Kabupaten Baru	**444**	**1.35**

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.4. Analisis Hasil Kajian

4.4.1 Pendekatan Analisis

Pada bagian metodologi telah dibahas, bahwa terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam studi ini (balk pada tahap penggalian data ataupun pada tahap analisis data). Kedua pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan kauntitatif, dan pendekatan kualitatif, dan pendekatan kuantitatif Iebih mendapat tekanan dalam kajian ini. Sebab, kajian ini

dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan yang telah tersusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan Pembentukan dan Knteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 secara komprehensif menilai kelayakan pembentukan suatu daerah otonom melalui 11 (sebelas) kriteria, yang Iebih lanjut diuraikan secara Iebih rinci dalam 35 sub indikator. Ukuran itulah yang kemudian menjadi landasan bagi penilaian bagi daerah dalam melakukan pemekaran wilayahnya. Ke 35 sub-indikator tersebut kemudian dibeikan skor berdasarkan bobot yang telah ditentukan sehingga secara keseluruhan atau skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh indikator PP tersebut memberikan gambaran kemampuan ekonomi dan kekayaan potensi yang saat ini dimiliki oleh daerah otonom (baik kabupaten induk atau pun calon kabupaten otonom).

Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut, skor total dari rencana calon wilayah pemekaran harus di atas rata-rata batas kelulusan dan tidak boleh salah satunya memiliki skor di atas batas kelulusan yang ditetapkan, sehingga dengan demikian balk calon kabupaten maupun kabupaten induk yang ditinggalkan dapat bersama-sama berkembang menjadi daerah otonom yang mampu membiayai dirinya sendiri tanpa harus menjadi beban bagi pusat serta, masyarakat.

Melalui penggabungan kedua pendekatan tersebut, diharapkan akan dapat disajikan suatu informasi yang Iengkap, sehingga Tim DPOD akan memiliki informasi yang Iebih memadai dalam pengambilan keputusan terutama tentang

kelayakan suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran, Kabupaten Indragiri Selatan (INSEL), dan Kota Indragiri menjadi daerah otonom.

4.4.2 Analisis Kelayakan Pemekaran

Analisis mengenai kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan menjadi daerah otonom, didasarkan pada data-data yang diperoleh dengan jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari 35 sub-indikator dari PP No. 78 Tahun 2007 tersebut.

Dalam Bab li PP 78/2007 yang membahas tentang syarat-syarat pembentukan daerah secara jelas di atur dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa : Pembentukan daerah kabupaten/ kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota, yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pada kajian ini hanya membahas mengenai syarat teknis yang secara tegas diatur dalam pasal 6 ayat I PP 78/2007, yang menyebutkan syarat teknis meliputi: faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pada ketentuan pada pasal 6 ayat I inilah maka pengkajian terhadap kelayakan usulan pemekaran daerah kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran, Kabupaten Indragiri Selatan (INSEL), dan Kota Indragiri dilakukan. Berikut

akan dapat dijelaskan Iebih lanjut mengenai penilaian terhadap potensi Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran, Kabupaten Indragiri Selatan (INSEL) dan Kota Indragiri. Dalam kajian ini akan di bahas satu persatu tentang analisis masingmasing rencana daerah otonom baru.

4.4.3 Analisis Kelayakan Pemekaran Calon Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran

4.4.3.1 Kependudukan

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang ikut menjadi penentu dalam rangka pemekaran wilayah ini, sebab jumlah penduduk termasuk ke dalam kriteria potensi daerah yang menentukan bagi berhasil atau tidaknya suatu daerah tersebut dalam memajukan sekaligus juga mensejahterakan masyarakatnya. Namun perlu juga diingat, bahwa jumlah penduduk selain bisa menjadi faktor yang negative. Artinya, jumlah penduduk yang besar namun tidak disertai dengan kualitas yang memadai balk dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan dan kesejahteraan justru dapat menjadi beban bagi suatu daerah itu sendiri.

Dari hasil penggalian data, dapat diperoleh gambaran bahwa untuk kriteria jumlah penduduk di kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran cukup memadai, yakni berada pada angka nilai batas kelulusan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel benkut:

Tabel 4.36
Gambaran jumlah Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran

No	Wilayah	Nilai Indikator : Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding (%)	Skor
1	Jumlah Penduduk Pasca Pemekaran	254.182	101	5
2	Jumlah Penduduk Wilayah Pembanding	252.299	100	5

Sumber : *BPS, Provinsi Riau,2008, data diolah*

Rasio nilai variable jumlah penduduk pada wilayah calon pemekaran Indragiri Hilir terhadap jumlah penduduk wilayah pembanding (jumlah penduduk rata-rata kabupaten lain di provinsi Riau) adalah sebesar 101%, yang berarti variable jumlah penduduk pada wilayah caton pemekaran, Indragiri hilir memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.2 Kepadatan Kependudukan

Wilayah calon pemekaran, Indragiri hilir yang luas wilayah total mencapai 5.385.33 KM^2, memiliki luas wilayah efektif seluas 5.385.33 KM^2. Dengan jumlah penduduk sebanyak 254.182 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk per Km^2 wilayah efektif di wilayah calon pemekaran sebesar 47,19 jiwa per KM^2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk pada wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang tersisa setelah pemekaran sebesar 57,37 jiwa per KM2. Tingkat kepadatan penduduk pada

wilayah calon pemekaran ini maupun pada wilayah induk yang tersisa setelah pemekaran lebih rendah dari rata-rata tingkat kepadatan penduduk per wilayah efektif di kabupaten lain di provinsi Riau, yang rata-rata kepadatan penduduknya sebesar 29,42 jiwa Km2.

Tabel 4.37
Skor Indikator Kepadatan Penduduk per Luas Wilayah Efektif pada Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir

No	Wilayah	Nilai Indikator: Kepadatan Penduduk (jiwa/ km2)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding (%)	Skor
1	INHIL	57,37	181,40	5
	a Wilayah pemekaran	47,19	160,40	5
	b Wilayah sisa	57,37	195,01	5

Sumber : *BPS, Provinsi Riau,2008, data diolah*

Rasio nilai variabel tingkat kepadatan penduduk perwilayah efektif pada wilayah calon pemekaran Indragiri hilir terhadap kepadatan penduduk per wilayah efektif pada wilayah pembanding adalah sebesar 160,40%, yang berarti bahwa variable tingkat kepadatan penduduk pada wilayah calon pemekara, Indragiri Hilir memiliki skor 5 (lima). Sedangkan pada wilayah sisa (INHIL setelah pemekaran) rasio tingkat kepadatan penduduknya per wilayah efektif dengan kepadatan penduduk wilayah pembanding sebesar 195,01%, yang berarti indikator kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang tersisa setelah pemekaran memiliki skor 5 (lima).

Kesimpulan dari Indikator Tingkat kepadatan penduduk pada wilayah calon pemekaran, Indragiri Hilir memiliki skor 5

(lima), demikian pula wilayah sisa (Inhil setelah pemekaran) memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.3 Faktor Kemampuan Ekonomi

4.4.3.3.1 Indikator PDRB Non Migas Perkapita

PDRB per kapita non-migas merupakan salah satu indikator yang umum dan penting untuk menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis, di peroleh gambaran bahwa tingkat PDRB perkapita wilayah calon pemekaran lebih tinggi dari PDRB per kapita wilayah pembanding. PDRB non migas pada wilayah calon pemekaran, Indragiri Hilir sebesar Rp 8,65 Juta per kapita, sedangkan PDRB non Migas pada sisa sebesar Rp 9,89 Juta per kapita, sementara wilayah pembanding memiliki PDRB non migas per kapita sebesar Rp 6,93 Juta per kapita.

Tabel 4.38

Skor Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir dan Kabupaten induknya

No	Wilayah	Nilai Indikator : Pertumbuhan Ekonomi (%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembandingan	Skor
1	INHIL	23.49	338	5
	a Wilayah pemekaran	13.60	196	5
	b Wilayah sisa	9.89	142	5
2	Wilayah Pembanding	6,93	100	5

Sumber : *BPS, PDRB Kab.Indragiri Hilir Riau,2008*

Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah calon pemekaran Indragiri Hilir lebih rendah di bandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi wilayah pembanding, namun di lihat dari Rasio pertumbuhan ekonomi wilayah calon pemekar ini dengan nilai pertumbuhan ekonomi wilayah pembanding memiliki nilai Rasio yang lebih besar dari 124% dengan demikian indikator pertumbuhan ekonomi calon wilayah pemekaran, Indragiri hifir memiliki 5 (lima) Sedangkan pada wilayah sisa (Kabupaten Indragiri Hilir setelah pemekaran) Rasio tingkat pertumbuhan ekonominya dengan pertumbuhan ekonomi wilayah pembanding sebesar 142% sehingga indikator ini pads wilayah sisa (Induk setelah pemekaran) juga memiliki skor 5 (Lima).

Kesimpulan dari Indikator Tingkat Pertumbuhan Ekonomi pads wilayah calon pemekaran, Indragiri Hilir memiliki skor 5 (lima) demikian pula wilayah sisa (Inhil setelah pemekaran) memiliki skor 5 (Lima).

4.4.3.3.2 Indikator Kontribusi PDRB Non Migas

Indikator kontribusi PDRB Non Migas di ukur dari Rasio antara Non Migas wilayah analisis menurut harga berlaku tahun 2005 dengan Non Migas Provinsi Riau pada tahun yang sama. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sebelum pemekaran memberi kontribusi sebesar 43,13% terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau. Dan besaran Kontribusi tersebut, sekitar 23,28% bersumber dari wilayah calon pemekaran Indragiri Hilir, sisanya bersumber dari wilayah sisa dari wilayah calon pemekaran dengan kontribusi sebesar

19,85% Juta per kapita terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau. Sedangkan wilayah-wilayah kabupaten di Provinsi Riau rata-rata memberi kontribusi sebesar 15,56 %.

Tabel 4.39

Skor Indikator Kontribusi PDRB Non Migas Wilayah Caton Pemekaran Indragiri Hilir dan Kabupaten Induknya terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau

No	Wilayah	Nilai Indikator: Kontribusi PDRB Non Migas (%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	43.13	277	5
	a Wilayah pemekaran	23.28	149	5
	b Wilayah sisa	19.85	127	5
2	Wilayah Pembanding	15,56	100	5

Sumber : *BPS, PDRB Kab./Kota di Provinsi Riau,2008*

Berdasarkan nilai Rasio antara kontribusi PDRB Migas wilayah calon pemekaran dengan nilai kontribusi wilayah pembanding terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau yang lainnya sebesar 15,56% menunjukkan bahwa calon wilayah pemekaran hanya memberi kontribusi terhadap PDRB Non Migas Provinsi hanya sebesar 23,28 dari kontribusi wilayah pembanding, sementara wilayah sisa dari wilayah pemekaran member kontribusi Iebih besar dari wilayah pembanding dengan nilai Rasio sebesar 149 % Dengan demikian maka indikator kontribusi PDRB Non migas pada wilayah calon pemekaran terhadap PDRB Non Migas Provinsi memiliki skor 5 (lima) sementara wilayah sisa pemekaran memiliki nilai skor 5 (lima).

Kesimpulan dari Indikator Kontribusi PDRB NON Migas Calon wilayah Pemekaran Indragiri Hilir terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau, memilki skor 5 skor pada wilayah sisa pemekaran (Indragiri Hilir Pemekaran) memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.4 Faktor Potensi Daerah

4.4.3.4.1 Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk

Walaupun ketersediaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non Bank yang ada di wilayah calon pemekaran, Indragiri Hilir Selatan, yang di indikasikan oleh ratio lembaga bank dan Non Bank dan Non Bank per 10.000 penduduk paling kecil (1,89 lembaga per 10.000 penduduk), namun indek ketersediaan lembaga tersebut tidak jauh berbeda dengan ketersediaannya dengan wilayah pembanding. Sedangkan indeks ketersediaan lembaga Bank dan Non Bank pada wilayah sisa pemekaran mencapai lembaga per 10.000 penduduk, yang berarti indeksnya Iebih tinggi dari indeks wilayah pembanding.

Tabel 4.40
Skor Indikator Rasio Bank dan lembaga Keuangan Non bank Per 10.000 Penduduk pada wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir dan Kabupaten Induknya.

No	Wilayah	Nilai Indikator : Bank dan Lembaga Non Bank Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	7.21	172	5
	a Wilayah pemekaran	3.54	84	5
	b Wilayah sisa	3.67	87	5
2	Wilayah Pembanding	4.19	100	5

***Sumber :** Data Olahan,2009*

Berdasarkan dari rasio antara indeks ketersediaan lembaga Bank dan Non Bank yang ada di wilayah calon pemekaran dengan indeks ketersediaannya di wilayah pembanding yang berada di atas 84%, maka nilai skor untuk indikator ini bernilai 5 (lima). Demikian pula halnya dengan skor indikator Bank dan non Bank ini di wilayahkan sisa pemekaran berada di atas 87% dengan nilai skor untuk indikator ini 5 (lima).

Kesimpulan dari indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non bank per 10.000 penduduk pada wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir memiliki skor 5 (lima), demikian pula pada wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah pemekaran) memilki skor 5 (lima).

4.4.3.4.2 Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk

Jumlah pertokoan kedai, waning dan tempat perbelanjaan lainnya yang ada di wilayah calon pemekaran Indragiri Hilir, secara relatif jumlah pertokoan tebih sedikit di bandingkan di wilayah sisa pemekaran. Hal ini sekitar 60,97 pertokoan per 10.000 penduduk, sementara di wilayah sisa rationya sebesar 109,35 pertokoan per 10.000 penduduk dan untuk wilayah pembanding nilai rasionya mencapai 199,65 per 10.000 penduduk.

Tabel 4.41
Skor Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	183.19	153	5
	a Wilayah pemekaran	73.84	61	4
	b Wilayah sisa	109.35	91	5
2	Wilayah	119.65	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Dengan membandingkan antara ketersediaan kelompok pertokoan per 10.000 penduduk di wilayah analisis dengan ketersediaan di wilayah pembanding, maka di peroleh ratio sekitar61% di wilayah calon pemekaran, sehingga indikator ini memiliki nilai 4 (empat) untuk wilayah calon pemekaran, sedangkan wilayah sisa pemekaran memiliki ratio sekitar 91% sehingga indikator ini memiliki nilai 5 (lima).

Kesimpulan dari Indikator Rasio Kelompok pertokoan Per 10.000 penduduk di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir, memiliki skor 4 (empat) sedangkan wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah Pemekaran) memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.4.3 Indikator Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk

Meskipun dalam jumlah absolute jumlah pasar yang ada di wilayah calon pemekaran Indragiri Hilir lebih sedikit dengan jumlah 1,49 namun secara relatif ketersediaan sarana penunjang ekonomi ini per 10.000 penduduk memilki nilai sama

dengan wilayah induk, maupun wilayah sisa pemekaran, namun nilai relatifnyab sedikit lebih rendah dari wilayah pembanding yang nilainya sebesar 2,13 yang artinya setiap 10.000 penduduk terdapat 2,13 unit pasar yang di manfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 4.42
Skor Indikator Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk pada Wilayah Calon Pemekaran Indragirl Hilir dan Kabupaten Induk

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Pasar per 10.000 penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	3.19	101	5
	a Wilayah	1.49	69	4
	b Wilayah sisa	1.70	79	5
2	Wilayah	2.13	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Perbandingan indeks ketersediaan pasar pada wilayah calon pemekaran dengan wilayah pembanding menghasilkan rasio sekitar 69%, yang berarti ketersediaan pasar secara relatlfnya di wilayah calon pemekaran tidak berbeda jauh dengan di wilayah pembanding, karena itu skor ini di wilayah calon pemekaran bernilai 4 (empat),demikian pula di wilayah sisa pemekaran, skornya bernilai 4 (empat).

Kesimpulan dad Indikator rasio Pasar Per 10.000 Penduduk di wilayah Calon pemekaran Indragiri Hilir, memiliki skor 3 (tiga), demikian pula di wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah Pemekaran) memiliki skor 3 (tiga).

4.4.3.4.4 Indikator Rasio Sekolah SD Per Penduduk usia SD

Ketersediaan Prasarana sekolah dasar menurut jumlah usia sekolah dasar pada wilayah calon pemekaran tidak jauh berbeda dengan wilayah Iainnya. Baik jika di bandingkan dengan wilayah sisa pemekaran, maupun bila di bandingkan dengan wilayah pembanding. Terlihat pada tabel berikut bahwa rasio antara sekolah dasar per penduduk usia SD di wilayah calon pemekaran adalah 0,0136 yang berarti setiap 1.000 penduduk usia SD terdapat 13,6 unit SD dapat menampung siswa per SD. Angka ratio sekolah dasar per penduduk usia SD di wilayah sisa pemekaran juga tidak berbeda jauh nilainya yaitu sekitar 0,00576 Iengkapnya nilai rasio sekolah SD per penduduk usia SD pada masing-masing wilayah analisis dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.43
Skor Indikator Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	0.01936	333	5
	a Wilayah pemekaran	0.0136	234	5
	b Wilayah sisa	0.00576	99	5
2	Wilayah Pembanding	0.00581	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Dalam Angka,2008*

Mengingat ketersediaan indeks sekolah dasar (nilai rasio sekolah SD per penduduk usia SD) pada masing-masing wilayah adalah analisis tidaklah berbeda jauh dengan nilai indeks ketersediaan sekolah dasar di wilayah pembanding, menyebabkan nilai rasio antara indeks kertersediaan sekolah dasar di wilayah calon pemekaran maupun di wilayah sisa pemekaran dengan indeks ketersediaan sekolah dasar di wilayah pembanding berada di atas 234%. Dengan demikian skor indikator rasio sekolah SD per penduduk usia SD memilki skor 5 (lima) baik untuk wilayah calon pemekaran maupun pada wilayah sisa pemekaran.

Kesimpulan dari indikator Rasio sekolah SD per penduduk usia SD di wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir, memiliki skor 5 (lima) demikian pula di wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah pemekaran)memilki skor 5 (lima).

4.4.3.4.5 Indikator Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP

Indeks ketersediaan SLTP pada wilayah calon pemekaran Indragiri Hilir (di ukur dari rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP) sedikit Iebih tinggi di bandingkan pada wilayah sisa pemekaran. Indeks ketersediaan sekolah SLTP pada wilayah calon pemekaran ini sebesar 0.00638 yang berarti setiap 1.000 penduduk usia SLTP terdapat 6.38 unit SLTP, sementara di wilayah sisa pemekaran hanya tersedia 6,60 unit per setiap 1.000 penduduk usia SLTP. Sedangkan indeks ketersediaan sekolah SLTP pada wilayah pembanding mencapai nilai 4,47 unit per setiap penduduk usia SLTP. Untuk iengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.44
Skor Indikator Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	0,1298	311	5
	a Wilayah pemekaran	0,00638	152	5
	b Wilayah sisa	0,00660	158	5
2	Wilayah Pembanding	0,00417	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka,2008*

Nilai indeks ketersediaan sekolah SLTP (nilai rasio sekolah SUP per penduduk usia SLTP) pada wilayah calon pemekaran hanya sekitar 152% dari nilai indeks ketersediaan SLTP di wilayah pembanding, bahkan rasio indek ketersediaan sekolah SLTP ini di wilayah sisa pemekaran terhadap indek wilayah pembanding hanya sekitar 158%. Dengan demikian, berdasarkan pada nilai rasio perbandingan indek ketersediaan wilayah calon pemekaran dan wilayah sisa pemekaran terhadap nilai indek wilayah pembanding, maka skor indikator rasio sekolah SLTP per penduduk usia SUP di wilayah calon pemekaran bernilai skor 5 (lima) sedangkan wilayah sisa pemekaran bemilai skor 5 (lima).

Kesimpulan dari indicator Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir, memiliki skor 5 (lima) sedangkan wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah pemekaran) memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.4.6 Indikator Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA

Indeks ketersediaan sekolah SLTA pada wilayah calon pemekaran Indragiri Hilir memilki indeks yang lebih rendah balk jika di bandingkan dengan wilayah sisa pemekaran, maupun jika di bandingkan Nilal indeks ketersediaan sekolah SLTA di wilayah calon pemekaran yang di ukur dari rasio Sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 0,00255 yang setiap 1.000 penduduk usia sekolah SLTA terdapat sekolah SLTA sebanyak 2,55 unit sekolah sedangkan nilai indeks pada wilayah sisa pemekaran sebesar 0,00355 yang berarti terdapat 3,55 unit sekolah SLTA per 1.000 penduduk usia SLTA. Lebih jelasnya indeks ketersediaan sekotah SLTA pada wilayah analisis dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.45
Skor Indikator Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	0,0061	286	5
	a Wilayah pemekaran	0,00255	119	5
	b Wilayah sisa	0,00355	166	5
2	Wilayah Pembanding	0,00213	100	5

***Sumber :** BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka,2008*

Hasil perbandingan nilai indeks ketersediaan sekolah SLTA di wilayah calon pemekaran dengan nilai indeks berupa wilayah pembanding menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sarana sekolah SLTA per penduduk usia SLTA pada wilayah calon pemekaran hanya sekitar 119% dari rasio sarana sekolah SLTA per penduduk usia SLTA di wilayah pembanding, dengan demikian indikator ini pada wilayah calon pemekaran memiliki skor 5 (lima) demikian pula pada wilayah sisa pemekaran, skor pada indikator rasio sarana sekolah per penduduk uisia SLTA memiliki nilai skor 5 (lima).

Kesimpulan dari Indikator Rasio sekolah SLTA per penduduk SLTA di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri hilir, memiliki skor 5 (lima) demikian pula pada wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah Pemekaran) memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.4.7 Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk

Ketersediaan Fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan sarana lainnya juga merupakan indikator penting untuk menilai potensi wilayah talon pemekaran dalam menyediakan fasilitas Iayanan dasar seperti kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan data indeks ketersediaan sarana kesehatan yang di ukur dari rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk, terlihat bahwa nilai indeks ini di wilayah talon pemekaran bemilai sebesar unit per 10.000 penduduk. Nilai indeks ketersediaan sarana kesehatan di wilayah caion pemekaran ini lebih tinggi jika di bandingkan nilai indeks pada wilayah pembanding yang nilal indeksnya sebesar

2.124 yang berarti setiap 10.000 penduduk jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah pembanding sebanyak 2.345 unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.46
Skor Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Fasilias Kesehatan per 10.000 penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	4,4521	189	5
	a Wilayah pemekaran	2,124	90	5
	b Wilayah sisa	2,424	103	5
2	Wilayah Pembanding	2,345	100	5

***Sumber :** BPS, Indragiri Dalam Angka,2008*

Hasil perbandingan indeks ketersediaan sarana kesehatan di wilayah calon pemekaran dengan indeks serupa di wilayah pembanding memiliki 90% yang berarti bahwa calon wilayah pemekaran Indragiri Hilir memiliki potensi yang Iebih besar dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya di bandingkan dengan wilayah pembanding. Sedangkan wilayah sisa pemekaran, meskipun potensi dalam menyediakan fasilitas kesehatan Iebih rendah dari wilayah pembandingan namun nilai Rasionya masih di atas 80%.

Dengan demikian potensi calon wilayah pemekaran dalam menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat cukup balk, demikian pula pada wilayah sisa pemekaran masing-masing memiliki skor 5 (lima).

Kesimpulan dari tndikator Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk di wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir, memilki skor 5 (lima) demikian pula pada wilayah sisa Indragiri Hilir memilki skor 5 (lima) demikian pula pada wilayah sisa pemekaran (Inhil Setelah Pemekaran skor 5 (lima).

4.4.3.4.8 Indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk

Tabel 4.47
Skor Indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk di wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Tenaga Medis per 10.000 penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	18.352	194	5
	a Wilayah pemekaran	5.704	60	4
	b Wilayah sisa	12.648	134	5
2	Wilayah Pembanding	9.415	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka,2008*

Pada tabel di atas terlihat bahwa indeks ketersediaan tenaga medis di wilayah calon pemekaran sebesar 5.704 orang yang artinya setiap 10.000 penduduk terdapat tenaga medis sebanyak 5,70 tenaga medis. Sedangkan di wilayah sisa pemekaran dan di wilayah pembanding masing-masing terdapat 12.648 dan 9.415 tenaga medis per 10.000 penduduk. Dengan membandingkan indeks ketersediaan tenaga

medis pada masing-masing wilayah analisis dengan wilayah pembanding, maka indikator potensi ketersediaan tenaga medis (rasio tenaga medis per 10.000 penduduk) pada wilayah calon pemekaran maupun pada wilayah sisa pemekaran masing-masing memiliki skor 5 (lima).

Kesimpulan dad Indikator Tenaga Medis per 10.000 penduduk di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir, memiliki skor, 4 (empat) demikian pula pada wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah pemekaran) memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.4.9. Indikator Persentase. Penduduk yang mempunyai Kendaraan bermotor/Kapal/Perahu Motor

Indeks ketersediaan kendaraan bermotor atau alat transformasi lainnya pada rumah tangga juga merupakan indikator penting bagi calon pemekaran wilayah, karena indeks tersebut mengindentifikasikan ketersediaan sarana penunjang transformasi bagi masyarakat dalam mengakses Iayanan jasa pemerintah maupun dalm menunjang aktivitas perekonomian. Indeks ketersediaan kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor di wilayah calon pemekaran yang diukur dari persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor menunjukkan nilai yang lebih kecil di bandingkan di wilayah sisa pemekaran, maupun di wilayah pembanding.

Tabel 4.48
Skor Indikator Persentase Penduduk yang mempunyai Kendaraan Bermotor/Kapal/Perahu Motor di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir dan Kabupaten Induknya

No	Wilayah	Nilai Indikator: Presentase RT memiliki Kendaraan Bermotor/ Perahu / Kapal/ Motor (100%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	23.94	159	5
	a Wilayah pemekaran	9.42	62	4
	b Wilayah sisa	14.52	96	5
2	Wilayah Pembanding	15.00	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka,2008*

Persentase rumah tangga di wilayah calon pemekaran yang memiliki kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor sebesar 9.42% rumah tangga, sedangkan di wilayah sisa pemekaran proporsinya sebesar 14,52% clan wilayah pembanding mencapai 15.00%. Berdasarkan perbandingan nilai indeks ketersediaan kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor di wilayah analisis dengan nilai indeks serupa di wilayah calon pemekaran bemilai rasio perbandingan untuk wilayah sisa pemekaran. Dengan demikian skor indikator persentase rumah tangga yang memilki kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor di wilayah calon pemekaran memiliki skor 4 (empat) sedangkan wilayah sisa memiliki skor 5 (lima).

Kesimpulan dari Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor

di wilayah Calon Pemekaran Indragiri hilir, memiliki skor 4 (empat), sedangkan wilayah. sisa pemekaran (Inhil Setelah Pemekaran) memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.4.10 Indikator Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga

Fasilitas layanan penerangan PLN di wilayah calon pemekaran, umumnya hanya mampu melayani rumah tangga yang berada di pusat-pusat kecamatan den beberapa desa di sekitarnya, sehingga sebagian besar masyarakat menggunakan sarana penerangan Non PLN. Kondisi tersebut juga tidak berbeda jauh dengan di wilayah sisa pemekaran. Besarnya pelanggan listrik baik yang PLN maupun pelanggan listrik Non PLN di calon wilayah pemekaran baru sekitar 27.61 dari total rumah tangga yang ada, sedangkan di wilayah sisa pemekaran persentase pelanggan listrik ini mencapai 41.01 dari total rumah tangga. Sementara di rata-rata kabupaten lain di lingkungan Provinsi riau, di mane rata- rata persentase pelanggan listriknya terhadap total rumah tangganya mencapai 75.13.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelayanan fasilitas penerangan bagi rumah tangga di wilayah calon pemekaran masih terpaut jauh ketinggalan di bandingkan dengan tingkat pelayan jasa penerangan di kabupaten lainnya di provinsi Riau.

Indikator tingkat pelayan jasa penerangan yang di ukur dari persentase pelanggan PLN dan Non PLN di wilayah analisis maupun di wilayah pembanding dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.49
Skor Indikator Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir dan Kabupaten Induknya

No	Wilayah	Nilai Indikator: Presentase Listrik PLN dan Non PLN Terhadap Jumlah RT	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	68.62	91	5
	a Wilayah pemekaran	27.61	36	2
	b Wilayah sisa	41.01	54	4
2	Wilayah Pembanding	75.13	100	5

***Sumber :** BPS,Kecamatan dalam Angka,2003 dan Indragiri Dalam Angka,2008*

Dengan membandingkan nilai indikator pelayanan jasa peneranagn di wilayah analisis dengan nilai indikator tersebut di wilayah pembanding, amak teriihat bahwa nilai indikator Iayanan jasa penerangan ini di wilayah calon pemekaran hanya 36 % dari tingkat Iayanan jasa penerangan wilayah pembanding, sedangkan di wilayah sisa pemekaran nilai rasionya mencapai 54 %. Berdasarkan nilai rasio perbandingan tingkat Iayanan jasa penerangan di calon pemekaran memiliki skor 2 (dua), sedangkan di wilayah sisa pemekaran memiliki skor 4 (empat)

Kesimpulan dari indikator Persentase Pelanggan PLN dan Non PLN terhadap Junlah rumah tangga di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir, memiliki skor 2 (dua), demikian pula di wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah pemekaran), memiliki skor 4 (empat).

4.4.3.4.11 Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap jumlah Kendaraan Bermotor

Indikator rasio panjang jalan tehadap kendaraan bermotor mengidentifikasikan potensi pelayanan prasaran jalan bagi masyarakat, semakin tinggi nilai rasio ini maka potensi yang tersedia bagi pelayanan jasa jalan ini semakin bagus atau denagn kata lain ketersediaan ajian yang aad semakin memadai. Berdasarkan hasil analisis mengenai rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor yang ada diperoleh gambaran bahwa ketersediaan prasarana jalan per jumlah kendaraan di wilayah calon pemekaran lebih tinggi di bandingkan dengan nilai rasio serupa di wilayah sisa pemekaran maupun di wilayah pembanding.

Tabel 4.50
Skor indikator Rasio panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotordi Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir dan Kabupaten Induknya

No	Wilayah	Nilai Indikator : Panjang Jalan terhadap Kendaraan Bermotor	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	0.15212	176	5
	a. Wilayah pemekaran	0.06023	70	5
	b. Wilayah sisa	0.09189	106	5
2	Wilayah Pembanding	0.08600	100	5

Sumber : *BPS,Kecamatan dalam Angka,2006 dan Indragiri Hilir Dalam ngka,2008*

Mengingat ketersediaan jalan per unit kendaraan bermotor di wilayah calon pemekaran Iebih tinggi di bandingkan ketersediaan jalan per unit kendaraan di wilayah pembanding, maka skor dari indikator rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor di wilayah calon pemekaran memilki skor 5 (lima), demikian pula ketersediaan jalan per unit kendaraan di wilayah sisa pemekaran lebih tinggi di bandingkan di wilayah pembanding yang di tunjukkan oleh rasio perbandingan sebesar 106%, sehingga nilai skor pada indikator ini di wilayah sisa pemekaran juga memilki nilai skor 5 (lima).

Kesimpulan dad Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir, memiliki skor 5 (lima), demikian pula di wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah pemekaran), memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.4.12 lndikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke atas

Indiaktor persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA keatas terhadap penduduk usia 18 tahun keatas, merupakan indikator potensi sumber daya manusia yang terdapat di wilayah analisis. Berdasarkan nilai variable dari indikator ini di per oleh gambaran bahwa persentase tenaga kerja yang berpendidikan SLTA ke atas terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas di wilayah calon pemekaran Indragiri Hilir sebanyak 20.00 sedangkan di wilayah sisa pemekaran terdapat 17.07 clan di wilayah pembanding terdapat sebanyak 18.00.

Tabel 4.51
Skor Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir dan Kabupaten Induknya

No	Wilayah	Nilai Indikator: Persentase Pekerja Berpindidikan Minimum SLTA terhadap Usia 18 Tahun ke atas	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	27.07	150	5
	a. Wilayah pemekaran	20.00	111	5
	b. Wilayah Pembanding	17.07	94	5
2	Wilayah Pembanding	18.00	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka,2008 dan Susena 2008*

Ratio perbandingan nilai variable dari indikator persentase pekerja yang minimal berpendidikan SLTA terhadap ,penduduk yang berusia 18 tahun ke atas di wilayah calon pemekaran di bandingkan dengan di wilayah pembanding menunjukkan nilai rasio sebesar 111 sedangkan nilai rasio variabel tersebut di wilayah sisa pemekaran dengan di wilayah pembanding memilki nilai rasio sebesar 94% dengan demikian skor dari indikator. Persentase pekerja yang minimal berpendidikan SLTA terhadap penduduk yang berusia 18 tahun ke atas di wilayah calon pemekaran memiliki skor 5 (lima) sedangkan di wilayah sisa memiliki nilai skor 5 (Lima).

Kesimpulan dari Indikator Persentase pekerja yang minimal berpendidikan SLTA terhadap penduduk berusia 18

tahun ke atas di Wilayah Calon Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki skor 5 (lima) sedangkan wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah pemekaran), memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.4.13 Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SI terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke atas

Indikator persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas juga merupakan indikator kinerja yang menggambarkan potensi sumber daya manusia yang tersedia di wilayah yang di analisis. Di wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, persentase pekerja berpendidikan minimal SI terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas sebanyak 49% sementara di wilayah sisa persentase tenaga kerja tersebut terdapat sebanyak 70% Gambaran tersebut menjelaskan bahwa potensi sumber daya manusia yang tersedia di wilayah calon pemekaran lebih rendah di bandingkan dengan wilayah sisa dan daerah pembanding seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.52
Skor Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SI terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas di wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir dan Kabupaten lnduknya

No	Wilayah	Nilai Indikator : Persentase Pekerja Berpindidikan Minimum S1 terhadap Usia 25 Tahun ke atas	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	120.22	119	5
	a Wilayah pemekaran	50.00	49	3
	b Wilayah Sisa	70.22	70	4
2	Wilayah Pembanding	100.34	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka,2006 dan Susena 2008*

Nilai rasio perbandingan nilai variabel dan indikator pekerja berpendidikan minimal SI terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah talon pemekaran dengan wilayah pembanding memiliki nilai skor 3 (tiga) sedangkan di wilayah sisa pemekaran, nilai memiliki nilai skor 5 (lima)

Kesimpulan dari Indikator Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk berusia 25 tahun ke atas di Wilayah Calon Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki skor 3 (tiga) sedangkan wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah pemekaran), memiliki skor 4 (empat).

4.4.3.4.14 Indikator Rasio Pegawal Negeri Sipil terhadap 10.000 Penduduk

Selain indikator persentase pekerja menurut tingkat pendidikan SLTA dan S1, maka nilai variabel indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk juga mengindikasikan ketersediaan sumber daya manusia di wilayyh analisis. Wilayah Calon Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 1.364 jiwa, memiliki rasio pegawai negeri per 10.000 penduduk 53.66 yang berarti setiap 1.000 penduduk terdapat pegawai negeri sipil sebanyak 5.3 jiwa, sedangkan di wilayah sisa pemekaran per 10.000 penduduk terdapat pegawal negeri sipil sebanyak jiwa. Sementara di wilayah pembanding terdapat sekitar 124,03 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas juga merupakan indikator kinerja yang menggambarkan potensi sumber daya manusia yang tersedia di wilayah yang dianalisis.

Tabel 4.53
Skor indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap Penduduk di wilayah Calon Pemekaran Indragirl Hilir dan Kabupaten Induknya

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	164.24	184	5
	a. Wilayah pemekaran	53.66	60	4
	b. Wilayah Sisa	110.58	124	5
2	Wilayah Pembanding	89.15	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka,2008 dan Susena 2008*

Berdasarkan hasil perbandingan nilai variabel indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk di wilayah calon pemekaran terhadap wilayah pembanding, maka di dapatkan nilai rasio sebesar 60 yang berarti indikator rasio pegawai negen sipil per 10.000 penduduk di wilayah calon pemekaran memiliki nilai skor 4 (empat) Sedangkan di wilayah sisa pemekaran memitiki nilai rasio sebesar 124 yang berarti potensi ketersediaan pegawai negeri sipil di wilayah induk ini lebih tinggi di bandingkan ketersediaan pegawai negeri sipil di wilayah pembanding, karena itu nilai skor indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk di wilayah sisa pemekaran memitiki skor 5 (lima).

Kesimpulan dari Indikator Rasio pegawai negeri sipil terhaadp 10.000 penduduk di wilayah Calon Pemekaran

Indrairi Hilir, memiliki skor 4 (empat) sedangkan wilayah sisa pemekaran (Inhil setetah pemekaran), memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.5 Kemampuan Keuangan

4.4.3.5.1 Jumlah PDS

Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah baru karena berkaitan dengan kemampuan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh kerena itu indikator yang dipergunakan yaitu semakin tinggi PDS di suatu wilayah maka semakin balk aspek kemandirian daerah daalm membiayai pembangunan. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kabupaten Indargiri Hilir pasca pemekaran memiliki nilai variabel yaitu 254.22 dengan rasio sebesar 83 % Artinya daerah ini tergolong sangat mampu, apalagi bila Indragiri Hilir Pascapemekaran telah menjadi daerah otonom baru maka PDS akan meningkat karena SDA yang ada belum di kelola secara optimal seperti adanya cadangan minyak bumi di blok jabung (Kecamatan Gaung) dan pertambangan lepas pantai serta perusahaan-perusahaan besar yang akan menjadi PDS bagi daerah otonom baru ini. Sementara itu PDS di kabupaten pembanding pada daerah sekitar Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 305,06, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.54
Nilal Variabel Jumlah dan Rasionya serta Nilai SkorKab. Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel : Jumlah PDS	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	798,50	261	5
	a. Wilayah pemekaran	254,22	83	5
	b. Wilayah Sisa	544,28	178	5
2	Wilayah Pembanding	305,06	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dalam konteks PDS yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai katagori sangat tidak mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator Iebih besar atau sama dengan 83 %.

Kesimpulan dari Indikator Jumlah PDS di Wilayah Calon Pemekaran Indragiri Hilir, memiliki skor 5 (lima) sedangkan Wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah Pemekaran), memiliki skor 5 (lima).

4.4.3.5.2 Rasio PDS Terhadap jumlah Penduduk

Rasio Pendapatan Daerah sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daearh baru karena berkaitan denagn kemampuan mensejahterakan

masyarakat. Oleh sebab itu indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi rasio PDS terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah maka semakin baik aspek keuangan daerah dalam membangun kesjahteraan rakyat. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk kabupaten inhil memiliki nilai variabel yaitu 157.41 dengan rasio sebesar 40% artinya daerah ini tergolong mampu. Sementara itu rasio PDS terhadap jumlah penduduk di kabupaten pembanding pada daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 389.33%, kabupaten Induk (Inhil) sekitar 596.14%.

Analisis di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap kabupaten Inhil dalam konteks rasio PDS terhadap jumlah penduduk yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai katagori kurang mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 83% nilai rata-rata untuk Iebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.55
Nilai Variabel PDS terhadap Jumlah dan Rasionya serta Nilal Skor Kab. Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	596.14	314	5
	a. Wilayah pemekaran	157.41	83	5
	b. Wilayah Sisa	411.73	217	5
2	Wilayah Pembanding	189.33	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.5.3 Rasio PDS Terhadap PDRB

Rasio Pendapatan daerah sendiri (PDS) terhaadp PDRB sesuai denagn ketentuan dalam PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah baru karena berkaitan denagn kemampuan pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh sebab itu indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS).

Terhadap PDRB di suatu wilayah maka semakin balk aspek pertumbuhan perekonomian daerah. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kabupaten Indragiri Hilir memiliki nilai variabel yaitu 0,0122 dengan rasio sebesar 25 % artinya daerah ini tergolong tidak mampu, tetapi bila Indragiri Hilir telah menjadi daearh otonom baru maka rasio PDS akan meningkat karena SDA yang ada beium di kelola secara optimal. Sementara itu Rasio Pendapatan Daerah sendiri (PDS) terhadap PDRB di kabupaten pembanding pada daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 0,24 Kabupaten Induk (Inhil) sekitar 0,65 dan Kabupaten Indragiri Hilir setelah pemekaran, 0,20.

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir dalam konteks rasio Pendapatan Daerah sendiri (PDS) terhadap PDSB yaitu mempunyai skor 5 atau dikatakan sebagai sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata- rata. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 nilai rata-rata. Nilai indikator 5 memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir sangat layak di rekomendasikan menjadi Daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut Rasio Pendapatan Daerah

Sendiri (PDS) terhadap PDRB, dan Kabupaten Indragiri Hilir sangat prospek dalam meningkatkan rasio PDS-nya. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapatkan nilai sebesar 187% atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 5 (Lima) nilai rata-rata. Nilai indikator 5 (lima) memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Hilir layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru namun masih potensial berkembang jika dimekarkan.

Tabel 4.56
Nital Variabel PDS Terhadap PDRB dan Rasionya serta Nilai Skor Kab. Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasio PDS Terhadap PDRB	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	0,65	270	5
	a Wilayah pemekaran	0,20	83	5
	b Wilayah Sisa	0,45	187	5
2	Wilayah Pembanding	0,24	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.6 Sosial Budaya

4.4.3.6.1 Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk

Aspek rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk PP NO. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelaaykan pemekaran daearah baru karena berkaitan dengan penyediaan sarana

peribadatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat di kabupaten Inhil merupakan masyarakat yang sangat aat berubadah. Oleh sebab itu indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi rasio sarana peribadatan (per 10.000 penduduk) di suatu wilayah maka semakin balk aspek peribadatan daerah tersebut. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kabupaten Indragiri Hilir memiliki nilai Variabel yaitu 24,27 dengan rasio sebesar 80 % artinya semua warga masyarakat dapat tertampung dalam sarana peribadatan untuk Iebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.57
Nilai Variabel Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk serta Nilai Skor Kab. Inhil Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	50.43	166	5
	a Wilayah pemekaran	24.27	80	5
	b Wilayah Sisa	26.16	86	5
2	Wilayah Pembanding	30.20	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir dalam konteks rasio sarana peribadatan yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa

nilai indikator lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata. Nilai indikator skor 5 (lima) memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Hilir layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru)

Jika di pandang dari sudut rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapatkan nilai skor sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu.

4.4.3.6.2 Rasio fasilitas Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk

Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran daearah baru karena berkaitan dengan penciptaan masyarakat yang sehat jasmani. Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan masyarakat yang balk dalam aspek olahraga. Oleh sebab itu indiaktor yang di gunakan yaitu semakin tinggi fasilitas lapangan olah raga tersedia (per 10.000 penduduk) di suatu wilayah maka semakin balk aspek jasmani daerah tersebut. Berkaitan dengan indiaktor tersebut maka untuk Kabupaten Indragiri Hilir pasca pemekaran memiliki nilai variabel yaitu 11.487 dengan rasio sebesar 84 % artinya semua warga masyarakat dapat tertampung dalam sarana olah raga.

Hasil perhitungan di atas memberikan penilalan bahwa skor nilai di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dalam konteks fasilitas olah raga yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat

mampu. Hal inl berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilai indikator 5 (lima) memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten) tanpa merugikan kabuapten induk karena di pandang dad sudut fasilitas lapangan olah raga, kabupaten induk maupun kabupaten yang dimekarkan sama-sama dapat mengakomodasikan masyarakat yang akan melakukan kegiatan olah raga. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.58
Nilal Variabel Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga per 10.000penduduk serta Nilai Skor Kab. Inhil Setelah Pemekaran danWilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga per 10.000 penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	25.27	185	5
	a. Wilayah pemekaran	11.48	84	5
	b. Wilayah Sisa	13.79	101	5
2	Wilayah Pembanding	13.65	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.6.3 Jumlah Balai Pertemuan

Jumlah balai pertemuan sesuai PP No. 78 Tahun 2009 ikut menentukan kelayakan pemekaran daerah baru karena berkaitan dengan penyediaan sarana rapat clan pertemuan

dalam rangka musyawarah untuk mufakat pada suatu agenda rapat tertentu. Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan masyarakat yang tergolong tinggi tingkat permusyawaratannya. Oleh sebab itu indikator yang di gunakan yaitu semakin tinggi rasio sarana balai pertemuan di suatu wilayah maka semakin balk aspek permusyawaratan daerah tersebut. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran memiliki nilai variabel yaitu 88 dengan rasio sebesar 58% artinya sebagian warga masyarakat belum tertampung sepenuhnya dalam balai pertemuan. Sementara itu balai pertemuan di kabupaten pembanding pada daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 138, kabupaten Induk (Inhil) sekitar 226. Artinya bahwa rasio sarana balai pertemuan di daerah Inhil masih harus di tambah pembangunannya agar rasionya mencukupi.

Analisa diatas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dalam konteks sarana balai pertemuan yaitu mempunyai skor 3 (tiga) atau di katakan sebagai kategori kurang mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator 58% memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Hilir dari sudut pandang penyediaan balai pertemuan kurang mampu di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru). Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu untuk Iebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.59
Nilai Variabel Balai pertemuan serta Rasionalnya danNilai Skor Kab. Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Jumlah Balai Pertemuan	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	226	150	5
	a. Wilayah pemekaran	88	58	3
	b. Wilayah Sisa	138	92	5
2	Wilayah Pembanding	150	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.7 Sosial politik

4.4.3.7.1 Rasio Penduduk yang ikut Pemilu Legislatif yang mempunyai Hak Pilih

Aspek rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan pertisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang tingkat partisipasi politik dalam Pemilu tergolong cukup tinggi clan hal itu sangat balk dalam penciptaan demokrasi lokal. Indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi partisipasi politik di suatu wilayah maka semakin balk aspek demokrasi lokal daerah tersebut.

Berdasarkan analisa di atas maka skor yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dalam konteks rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih yaitu mempunyai skor 5 (lima)

atau dikatakan sebagai kategori sangat mampu. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar nilai skor 4 (empat) atau di katakan sebagai kategori mampu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.60
Nilai Variabel rasio Penduduk yang Ikut Pemilu dari Jumlah penduduk yang mempunyai Hak Pilih Serta Nilai Skor Kab Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasional Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang mempunyai Hak Pilih	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	1.56	185	5
	a. Wilayah pemekaran	0.90	107	5
	b. Wilayah Sisa	0.66	78	4
2	Wilayah Pembanding	0.84	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.7.2 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Aspek jumlah organisasi kemasyarakatan sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan penguatan pilar-pilar demokrasi lokal. Organisasi kemasyarakatan merupakan sosial kontrol dan jugs kekuatan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang tingkat partisipasi masyarakat pembangunan cukup tinggi dan hal itu sangat baik dalam percepat pembangunan daerah. Indikator yang di gunakan yaitu semakin tinggi jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam aspek politik, ekonomi,

sosial dan pembangunan daerah tersebut. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran memiliki nilai variabel yaitu 862 dengan rasio persentase sebesar 31%. Sementara itu rasio di kabupaten pembanding di daerah sekitara Inhil yaitu sebesar 2756 dan kabupaten Induk (Inhil) sekitar 3018 dan sedangkan diwitayah sisa setelah pemekaran sebanyak 2156. Artinya bahwa rasio organisasi kemasyarakatan di daerah Indragiri Hilir masih proporsional di banding daerah sekitar dan hal itu di perkirakan akan turut memperkuat pembangunan daerah.

Berdasarkan analisa di atas skor nilai yang di berikan terhadap Kabupeten Indragiri Hilir dalam konteks jumlah organisasi kemasyarakatan yaitu mempunyai skor 2 (dua) atau di katakan sebagai kategori kurang mampu. Skor pada kabupeten sisa setelah pemekaran memiliki skor 4 atau di katakan sebagai kategori mampu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.61
Nilai Variabel Rasio Organisasi Kemasyarakatan Serta Nilai Skor Kab Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	3018	109	5
	a. Wilayah pemekaran	862	31	2
	b. Wilayah Sisa	2156	78	4
2	Wilayah Pembanding	2756	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.8 Luas Daerah

4.4.3.8.1 Luas wilayah keseluruhan

Luas wilayah sangat berperan dalamm menentukan kelayakan dalam daerah otonom baru kerena berkaitan dengan penataan ruang dan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan. Di dalam suatu tata ruang wilayah setidaknya terdapat pola dan ruang dan struktur ruang yang keseluruhan di akomodasi oleh lahan di suatu kabupaten. Oleh sebab itu dengan menggunakan indikator luas wilayah keseluruhan maka Kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran memiliki nilai luas yaitu 5.385.33 km dengan rasio sebesar 46,40 %. Jika di bandingkan dengan luas wilayah pembanding sekitar 8.424,93 km maka kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran sangat Iayak dimekarkan untuk menjadi daerah otonom baru.

Dengan menggunakan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran dalam konteks luas wilayah keseluruhan yaitu mempunyai skor 4 (empat) atau kategori mampu, namun demikian dan perspektif penataan ruang, semua kepentingan ruang akan terakomodasi dengan luas wilayah 5.385.33 km. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator Iebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) karena tidak menganggu luas wilayah kabupaten induk.

Tabel 4.62
Nilai Rasio Variabel Was Wilayah Serta Nilai Skor Kab Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Luas Wilayah Keseluruhan	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	11.605	137,76	5
	a. Wilayah pemekaran	5.385	63,92	4
	b. Wilayah Sisa	7.383	87,64	5
2	Wilayah Pembanding	8.424	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.8.2 Luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan

Luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan berperan menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan peruntukan lahan untuk kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan dan pertahanan keamanan. Ruang wilayah yang dapat di manfaatkan harus mengakomodasikan ruang terbuka hijau, kawasan resapan dan ruang publik. Oleh sebab itu luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan maka Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemakaran memiliki nilai variable yaitu 5.385 km dengan rasio sebesar 46,40 % dari luas Indragiri Hilir secara keseluruhan. Sementara itu luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan di kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil yaitu memiliki luas sebesar 6.570 km. kabupaten Induk (Inhil) seluas 11.605 km, sedangkan luas kabupaten Inhil setelah pemekaran seluas 7.383 km. Data tersebut memberikan informasi bahwa di tinjau dari luas wilayah maka Kabupaten Indragiri Hilir sangat memungkinkan untuk di mekarkan menjadi

3 kabupaten yaitu dengan memekarkan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir Selatan, dan Kota Indragiri.

Bila menggunkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dalam konteks luas wilayah yang dapat di manfaatkan yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau kategori sangat mampu, namun demikian clad perspektif tata ruang maka di indifikasikan bahwa semua kepentingan ruang akan terakomodasi dengan luas wilayah

Seluas 5.385 km. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilai indikator 80 % memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran sangat layak direkomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) karena tidak mengganggu luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan oleh kabupaten induk.

Tabel 4.63
Nilal Rasio Variabel Luas Wilayah yang dapat dimanfaatkanSerta Nilai Skor Kab Inhil setelah Pemekaran dan WilayahPembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Luas Wilayah Efektif yang dapat dimanfaatkan	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	11.605	176,63	5
	a. Wilayah pemekaran	5.385	81,96	5
	b. Wilayah Sisa	7.383	112,37	5
2	Wilayah Pembanding	6.570	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.9 Pertahanan

4.4.3.9.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Luas Wilayah

Aspek pertahanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan denagn lingkungan strategi dan jugs integritas bangsa. Kabupaten Inhil merupakan kabupaten yang berada di sepanjang Selat Malaka dan berbatasan dengan Negara tetangga. indikator yang dipergunakan yaitu semakin tinggi rasio jumlah aparat pertahanan di suatu wilayah maka semakin baik aspek pertahanan daerah tersebut, apalagi bagi daerah di kawasan perbatasan laut dengan Negara tetangga. Berkaitan dengan indikator pertahanan maka kabupaten Indragiri Hilir memiliki nilai variable _yaitu 0,000209 dengan rasio sebesar 103%. Sementara itu rasio jumlah personil aparat pertahanan di kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 0,000160, kabupaten Induk (Inhil) sekitar 0,00060 dan kabupaten Inhil setelah pemekaran 0,00017. Artinya rasio jumlah personil aparat pertahanan di daerah Indragiri Hilir relative lebih balk di bandingkan daerah sekitar kabupaten.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dalam konteks rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap tuas wilayah yaitu mempunyai skor 5 atau di katakan sebagai katagori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa niali indikator lebih besar atau sama dengan 80 nilai rata-rata. Nitai indikator 80 % memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom

baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 atau dikatakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran selain layak direkomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa merugikan kabupaten induk karena di pandang dari sudut jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.64
Nilai Rasio Variabel Jumlah Personil Aparat Pertahanan serta Nilai Skor Kab. Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Luas Wilayah	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	0,00	105	5
	a. Wilayah pemekaran	0,0209	103	5
	b. Wilayah Sisa	0,000171	107	5
2	Wilayah Pembanding	0,000160	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.9.2 Karateristik Wilayah dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan

Karakteristik wilayah di lihat dad sudut pandang pertahanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan

dengan strategi pertahanan. Karena kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang tidak ada berbatasan dengan Negara tetangga sehingga Penanganan wilayah ini tidak akan sangat berbeda dengan wilayah lainnya. Dilihat dad indikator karakteristik wilayah dad sudut pandang pertahanan, maka untuk kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi yang lebih strategis.

Dari analisis maka skor nilai yang di berikan terhadap kabupaten Indragiri Hilir dalam konteks karakteristik wilayah di lihat dari sudut pandang pertahanan, yaltu mempunyai skor 5 atau di katakan sebagai katagori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pascapemakaran layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut karakteristik wilayah di lihat dad sudut pandang pertahanan. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran terdapat nilai sebesar 5 atau dikatakan sebagai sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru).

Tabel 4.65
Nilai Rasio Variabel Karakteristik wilayah di lihatdari sudut pandang pertahanan Serta Nilai Skor Kab Inhilsetelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel Karakteristk Wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	Ratio Variabel Wilayah Analisa dengan Wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	-	-	5
	a. Wilayah Pemekaran Indragiri Hilir	Utara berbatasan dengan Propinsi lain	-	5
	b. Wilayah Sisa	Kepulauan, laut dan Darat, berbatasan dengan Negara lain	-	5
2	Wilayah Pembanding	Darata, tidak berbatasan dengan negara lain	-	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.10 Keamanan

4.4.3.10.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk

Keamanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan dengan kenyamanan tinggal, kriminalitas rendah dan keamanan berinvestasi. Semakin tinggi rasio jumlah aparat keamanan maka semakin balk keamanan daerah yang hendak di mekarkan. Untuk kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran memiliki nilai variable yaitu 0,0008 dengan rasio sebesar 114%. Sementara itu rasio jumlah personil aparat

keamanan di kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 0,00070, kabupaten induk (Inhil) sekitar 0,00075 dan kabupaten INHIL setelah pemekaran 0,0007,3. Artinya bahwa rasio keamanan di daerah Indragiri Hilir relatif lebih baik.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran dalam konteks keamanan yaitu mempunyai skor 5 atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 atau di katakan senagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa merugikan kabupaten induk karena di pandang mempunyai keamanan yang tinggi.

Tabel 4.66
Nilai Rasio Variabel Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk dan Nilai Skor Kab. Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap jumlah penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	0,000755	107	5
	a. Wilayah pemekaran	0,000804	114	5
	b. Wilayah Sisa	0,000733	104	5
2	Wilayah Pembanding	0,000703	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.11 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

4.4.3.11.11ndeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di turunkan dari variable tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan adalah merupakan variable kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM maka semakin balk tingkat kesejahteraan lebih tinggi yaitu denga nilai variable rata-rata 72,25, denga rasio sebesar 67,2. Artinya bahwa indeks Pembangunan Manusia di wilayah Inhil Selatan jauh Iebih baik di atas rata-rata.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap kabupaten setelah dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia yaitu mempunyai skor 5 atau di katakan

sebagai kategori sangat sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata Nilai Indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten ini layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut Indeks Pembanguan Manusia. Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 atau di katakan sebagai kategori sangat.

Mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Insdragiri Hilir Pascapemakaran layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa merugikan kabupaten induk.

Tabel 4.67
Nilai Rasio Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Nilai SkorKab Inhil Setelah Pemekaran Dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel: Indeks Pembangunan Manusia	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	68,00	100	5
	a Wilayah pemekaran	72,25	107	5
	b Wilayah Sisa	67,29	99	5
2	Wilayah Pembanding	67,58	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.12 Rentang Kendali

4.4.3.12.1 Rata-rata Jarak Kabupaten/Kota atau Kecamatan ke Pusat Pemerintah (Ibukota Provinsi atau Ibukota Kabupaten/Kota)

Rentang kendali pemerintah di daerah sangat di tentukan oleh jarak dari pusat pemerintah (ibu kota) kepada wilayah

sekitar yang di layani. Semakin dekat jarak pelayanan maka akan semakin balk rentang kendalinya, sebaiknya semakin jauh jarak pelayanan maka akan semakin lamban pelayanan. Dalam konteks kelayakan pemekaran bila mana jarak dari pusat ibu kota ke kawasan yang akan di mekarkan,, semakin jauh akan semakin layak di mekarkan. Kabupaten inhil memiliki jarak yang relative jauh dari ibu kota kabupaten Inhit (Tembilahan) yaitu dengan nilai variabel 111,16 km dengan rasio pelayanan Sebesar 222%. Sementara itu nilai kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil jarak ke pusat pemerintah rata-rata mempunyai nilai pelayanan sekisar 50 km.

Berdasarkan variabel di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap kabupaten Indragiri Hilir Pascapemekaran dalam konteks indikator variabel jarak pelayanan pemerintah yaitu mempunyai skor 5 atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru). Dengan adanya pemekaran Indragiri Hilir maka jarak ke pusat pemerintahan di kawasan Inhil setelah di mekarkan nilai rata-rata menjadi 72,79 km dengan rasio 80 % Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa membuat kabupaten induk (Kab. Inhil) terganggu dengan adanya pemekaran.

Tabel 4.68
Nilai Variabel Jarak Rata-rata Kecamatan ke Pusat Pemerintah dan Rasionya serta Nilai Skor Kab. Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rata-rata jarak kecamatan ke pusat Pemerintahan (Ibukota Kabupaten/ Kota)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	111,16	222	5
	a Wilayah pemekaran	55,50	111	5
	b Wilayah Sisa	55,66	111	5
2	Wilayah Pembanding	50,00	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.4.3.12.2 Rata-rata Waktu Perjatanan dari Kabupaten/Kota atau Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Provinsi) atau Kabupaten/Kota)

Rata-rata waktu perjalanan dari dan ke ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir akan sangat menentukan efesiensi pelayanan pemerintah bagi wilayah sekitar yang akan di Iayani. Semakin pendek waktu perjalanan maka akan semakin efesiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan, sebaiknya semakin lama waktu di tempuh untuk mendapat pelayanan maka akan semakin tidak efesien pelayanan tersebut. Dalam konteks kelayakan pemekaran semakin panjang (lama) maka akan

semakin layak daerah tersebut di mekarkan. Untuk kabupaten Inhil (Tembilahan) yaitu dengan nilai variabel rata-rata 2,5 jam, dengan rasio pelayanan sebesar 225%. Sementara itu nilai kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil waktu perjalanan ke pusat pemerintah rata-rata mempunyai nilai berkisar 1,1 jam. Kabupaten Induk (Inhil) sekitar 1,8 jam, dan posisi waktu di Kabupaten Indragiri Hilir setelah pemekaran menjadi 2,5 jam. Artinya bahwa waktu tempuh perjalanan ke kawasan Indragiri Hilir relatif lebih lama (jauh).

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Indragiri Hilir Pascapemekaran dalam konteks indikator variabel waktu perjalanan ke pusat pemerintah yaitu mempunyai skor 5 atau di katagori sangat mampu. Hal ini berarti nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru). Skor pada kabupaten induk setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% niali rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Hilir layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa membuat kabupaten induk (kab. Inhil) terganggu dengan adanya pemekaran.

Tabel 4.69
Niiai Variabel Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan Kepusat Pemerintah Nilai Skor Kab. Inhil setelah Pemekaran dan Wilayah Pembanding

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan ke Pusat Pemerintah	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1	INHIL	1,89	170	5
	a Wilayah pemekaran	1,05	94	5
	b Wilayah Sisa	1,84	165	5
2	Wilayah Pembanding	1,11	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Untuk lebih memperjelas dasar kebutuhan dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, analisis terhadap faktor utama sebagaimana di sajikan pada Tabel 4.70. berikut yang merupakan ringkasan dari 35 indikator sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka akan tergambar informasi yang berguna bagi calon pemimpin daerah ini tentang aspekaspek apa saja yang harus di tingkatkan kerena secara relatif masih tertinggat dari rata-rata kemampuan kabupaten lain di Provinsi Riau.

Tabel 4.70
Rekapitulasi Skor
Rencana Pemekaran Indragiri Hilir Pasca Pemekaran

No	Indikator	Skor Maksimal	Indragiri Hilir (Hasil Pemekaran	
			Skor	Pencapaian (% dari Skor Maksimal)
1.	Kependudukan.	100	80	80.0
2.	Kemampuan Ekonomi.	75	75	95.0
3.	Potensi Daerah.	75	67	87.0
4.	Kemampuan Keuangan.	75	65	86.6
5.	Sosial Budaya.	25	23	92.0
6.	Sosial politik.	25	19	76.0
7.	Luas Daerah.	25	18	72.0
8.	Pertahanan.	25	25	100.0
9.	Keamanan.	25	25	100.0
10.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.	25	25	100.0
11.	Rentang Kendali.	25	25	100.0
	Total	**500**	**437**	**88.87**

Dari tabel di atas terlihat bahwa kemampuan ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya dan politik, tingkat kesejateraan dan rentang kendali merupakan aspek yang dominan sebagai dasar pembentukan Indragiri Hilir Pasca Pemekaran. Letak geografis daerah ini berbatasan Iangsung dengan propinsi tetangga juga merupakan daerah kelautan membutuhkan tata administrasi yang lebih balk untuk dapat lebih balk untuk dapat lebih efektif dalam mengambil keuntungan dari posisi strategis ini.

4.5 Gambaran Umum Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

Secara administratif rencana wilayah Kabupaten Indragiri Selatan setelah pemekaran terdiri dan 6 kecamatan, masing-masing Kecamatanyang direncanakan tergabung dengan Kabupaten Indragiri Selatan ialah Keritang, Reteh, Enok, Tanah Merah, Kemuning, Sungai Batang, dengan jumlah desa/kelurahan 62. Penduduk di kawasan ini mayoritas didominasi oleh 4 suku utama yaitu, suku Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa, selain itu terdapat juga suku-suku lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara geografis, calon Kabupaten Indragiri Selatan terletak disebelah selatan Kota Tembilahan dengan luas wilayah 3.225,09 km2 atau 27,78% dari wilayah induk secara keseluruhan.

Calon Kabupaten ini juga memiliki beberapa sungai antara lain, sungai gangsal dikecamatan Reteh dan Keritang, sungai keritang di kecamatan Keritang dan Kemuning dan sungai terab di kecamatan Reteh, sedangkan sumberdaya alam yang dimiliki mineral dan bahan galian di daerah ini relative sedikit, namun demikian potensi pertanian cukup besar terutama tanaman yang dapat tumbuh subur dilahan gambut, seperti tanaman pangan dan hortikultura, kelapa dalam maupun kelapa hibrida, kelapa sawit, pinang, kakao, haramai dan sebagainya.

4.6 Deskripsi dan Analisis Hasil Kajian

Bagian ini memaparkan berbagai data, hasil kajian, dan analisis atas hasil kajian mengenai (tingkat) kelayakan

pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan, melalui pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir yang rencananya akan dimekarkan menjadi 3 (tiga) daerah otonom yaitu, Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL), Kabupaten Indragiri Selatan (INSEL), dan Kota Indragiri, sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh PP No. 78 Tahun 2007 berupa (1) Kependudukan, (2) Kemampuan Ekonomi, (3) Sosial Potensi Daerah,(4) Kemampuan Keuangan, (5) Sosial Budaya, (6) Sosial Politik, (7) Was Daerah, (8) Pertahanan, (9) Keamanan, (10) Tingkat Kesejahteraan masyarakat, (11) Rentang Kendali, dan (12) Pertimbangan Lain.

Semua ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kemampuan Calon Kabupaten Indaragiri Selatan, dan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pascapemekaran. Penilaian atas tingkat kemampuan ini sejalan dengan maksud dan tujuan otonomisasi daerah-daerah di Indonesia, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan PP.78 Tahun 2007).

4.6.1 Kriteria Jumlah Penduduk

Kriteria jumlah penduduk pada kajian ini hanya melihat dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Selatan ialah sekitar 210.545 jiwa atau sekitar 31,38%. Untuk Iebih jelas sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 4.71 berikut :

Tabel 4.71
Luas Wilayah dan Jumlah Kepadatan Penduduk
Calon Kabupaten Indragiri Selatan

Kecamatan	Jml Desa	Luas Wilayah (km)	Rumah tangga	Penduduk 2008 (jiwa)			Kepa datan Pen duduk (jiwa/ km²)
				LK	PR	Jml	
1. Keritang	13	543,45	15.224	29.858	30.752	60.610	112
2. Reteh	10	407,75	12.099	23.449	24.605	48.054	118
3. Enok	12	880,86	9.394	17.771	19.488	37.259	42
4. Tanah Merah	10	721,56	7.999	17.294	18.385	35.679	49
5. Kemuning	11	525,48	3.342	7.862	7.416	15.278	29
6. Sungai Batang	6	145,99	3.262	7.280	6.385	13.665	94
Total	**62**	**3.225.09**	**51.320**	**103.514**	**107.031**	**210.545**	**74**

Sumber : *Data Olahan,Tahun 2009*

Pada tabel di atas terlihat bahwa penduduk di wilayah calon kabupaten Indragiri Selatan yang terbanyak ada di kecamatan Keritang dan Reteh, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di kecamatan Sungai Batang. Pada tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat bahwa daerah yang paling padat penduduknya adalah di kecamatan di Keritang ini disebabkan oleh luas wilayah kecamatan Keritang yang relative kecil, jumlah kepadatan penduduk terkecil seperti terlihat pada tabel 4.71 adalah di kecamatan Kemuning, ini juga disebabkan oleh faktor wilayah Kecamatan Kemuning yang cukup luas.

4.6.2 Kemampuan Ekonomi

4.6.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan

salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/ daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada Kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas adanya sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang. seimbang. Secara umum Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung berdasarkan 2 (dua) pendekatan yaitu Produk Domestik Regional Brotu (PDRB) berdasarkan Atas Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Brotu (PDRB) berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan, dalam kajian ini PDRB dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan dari indikator-indikator dalam menghitung PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yakni, Pertama, pertanian, petemakan, perikanan, Hutbun, kedua, pertambangan dan penggalian, ketiga, industri pengolahan, keempat,listrik dan air bersih, kelima, bangunan, keenam, perdagangan, hotel, ketujuh, perhubungan dan komunikasi, kedelapan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta kesembilan, jasa jasa maka PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran pada Tahun 2008 berdasarkan atas harga berlaku adalah 2.330.460 rata-rata pertumbuhan 23.304 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.72 berikut ini:

Tabel. 4.72
PDRB Kabupaten Indragirl Selatan
Atas Dasa Harga Berlaku Tahun 2005-2008 (dalam juta rupiah)

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata pertumbuhan 2005-2008 (%)
1. Keritang	451,204	471,891	492,513	514,035	77.185
2. Reteh	403,217	419,541	435, 735	452,554	68.441
3. Enok	278,723	302,148	326,380	352,556	50.392
4. Tanah Merah	299,956	335,341	374,441	418,101	57.113
5. Kemuning	146,674	157,458	168,495	180,307	26.117
6. Sungai Batang	299,821	334,211	364,541	412,907	56.459
Total	**1.879.595**	**2.020.590**	**2.162.105**	**2.330.460**	**335.71**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

Tabel. 4.73
PDRB Non Migas Perkapita
Calon Kabupaten Indragiri Selatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk	PDRB Tahun 2008	PDRB Per Kapita
1. Keritang	48.422	810.654	16.741
2. Reteh	47.288	790.345	16.713
3. Enok	30.934	750.679	24.267
4. Tanah Merah	31.717	730.546	23.033
5. Kemuning	15.095	720.008	47.698
6. Sungai Batang	13.620	710.169	52.141
Total	**254.182**	**5.918.073**	**23.282**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.6.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan produksi nil

barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi di kabupaten Indragiri Hilir, dan Calon Kabupaten indragiri Selatan, proses pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh kombinasi yang kompleks dad faktor-faktor ekonomi, Sosial (termasuk pendidikan dan keterampilan) demografi, geografi, politik kebijakan ekonomi dan faktor lainnya, laju pertumbuhan ekonomi calon wilayah kabupaten indragiri Hilir berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dad Tahun 2005-2008, yang mana dihitung dengan menggunakan indikator yang sama. Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor clad tahun ke tahun dengan menghilangkan inflasi pada tahun yang bersangkutan, maka PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan (ril) pada tahun 2008 adalah 4.091.891 dengan rata-rata laju pertumbuhan 509.036 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.74 berikut ini :

Tabel 4.74
PDRB Kabupaten indragiri Selatan berdasarkan Harga Kostan Tahun 2005-2008

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata pertumbuhan 2005-2008 (%)
1. Keritang	444.025	545.213	675.475	710.154	94.994
2. Reteh	370.018	483.052	620.572	690.341	86.559
3. Enok	323.368	420.789	650.980	690.679	83.432
4. Tanah Merah	315.653	475.571	630.780	680.546	84.102
5. Kemuning	355.751	421.782	630.342	690.008	83.915
6. Sungai Batang	341.212	418.483	510.980	630.163	76.003
Total	**2.150.027**	**2.764.863**	**3.719.129**	**4.091.891**	**509.036**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

Tabel 4.75
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Calon Kabupaten Indragiri Selatan

Kecamatan	2007	2008	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1. Keritang	195.425	215.654	9.380
2. Reteh	220.177	230.345	4.414
3. Enok	150.670	210.679	28.483
4. Tanah Merah	150.370	200.546	25.019
5. Kemuning	160.342	198.008	19.022
6. Sungai Batang	180.900	190.169	4.874
Total	**254.182**	**5.918.073**	**23.282**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.6.2.3 Kontribusi PDRB Non Migas terhadap PDRB Provinsi Riau

Penilaian atas sub indikator ini bermanfaat untuk memperoleh gambaran mengenai calon Kabupaten Indragiri Selatan ini dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, kemmpuan dalam membentuk penghasilan domestik di kawasan Riau sebagai basis kesejahteraan (khususnya kemakmuran ekonomi) masyarakat sebagai identitas otonom di Provinsi Riau. Kedua, daya dukung calon kabupaten sebagai daerah otonom baru dalam menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan kawasan.

Data terakhir menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hitir tanpa pemekaran berdasarkan harga konstan Non Migas Tahun 2005-2008 Pasca pemekaran adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel. 4.76
PDRB Kabupaten Indragiri Selatan

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Pertumbuhan 2005-2008 (%)
1. Keritang	244.025	245.213	265.471	270.164	40.994
2. Reteh	170.018	183.072	210.576	260.301	32.958
3. Enok	193.378	220.780	230.985	240.639	35.431
4. Tanah Merah	195.693	215.571	240.783	270.516	36.902
5. Kemuning	175.781	191.782	210.341	220.028	31.917
6. Sungai Batang	171.214	188.483	200.981	230.143	31.632
Total	**1.150.109**	**1.244.901**	**1.359.137**	**1491.791**	**209.837**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

Tabel 4.77
Kontribusi PDRB Kabupaten Indragiri SelatanTerhadap PDRB Propinsi Riau

PDRB Indragiri Selatan Tahun 2008	PDRB Propinsi Riau	Kontribusi PDRB
1.491.791.000	**119.034.983,66**	**12.53**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.6.3 Potensi Daerah

Potensi Daerah guna mendukung rencana pembentukan daerah otonom baru (Kabupaten Indragiri Selatan) cukup memadai, ini terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut, seperti adanya lembaga keuangan, kelompok pertokoan, pasar, sekolah, pegawai pemerintah,

kesehatan, panjang jalan, pekerja, dan rasio pegawai negeri sipil (PP No 78 tahun 2007).

4.6.3.1 Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk

4.6.3.1.1 Lembaga Keuangan

Bank merupakan salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan bank di suatu daerah dapat mengindikasikan kemajuan ekonomi suatu wilayah. Data menunjukkan bahwa dad 20 kecamatan, diwilayah kabupaten Indragiri Hilir terdapat sejumlah 10 Bank, diwilayah calon pemerakaran terdapat 6 bank yang terletak di masingmasing kecamatan.

Kondisi sebaran bank di wilayah kecamatan dan rasionya terhadap 10.000 penduduk di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan dapat dilihat pada tabel 4.78 :

Tabel 4.78
Rasio Bank Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Bank	Rasio (X)
1. Keritang	60.610	1	0.164
2. Reteh	48.054	1	0.208
3. Enok	37.259	1	0.268
4. Tanah Merah	35.679	1	0.280
5. Kemuning	15.278	1	0.654
6. Sungai Batang	13.665	1	0.731
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**210.545**	**6**	**0.284**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.6.3.1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank Per 10.000 Penduduk

Kenyataan bank dalam kenyataannya tidak dapat selalu diakses oleh pelaku ekonomi di daerah karena berbagai faktor. Oleh karena itu di daerah-daerah berkembang lembaga keuangan lain di luar bank, yang disebut lembaga keuangan bukan bank. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha selain bank yang menjalankan fungsi dan kinerjanya seperti bank, yakni menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Badan Usaha Bukan Bank diantaranya meliputi asuransi, pengadaian dan koperasi.

Dari data terakhir, terlihat bahwa Lembaga Bukan Bank lebih terkosentrasi di daerah-daerah pedesaan (koperasi). Hal ini terlihat pada tabel 4.79 :

Tabel 4.79 Rasio Bukan Bank Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Bukan Bank	Rasio (X)
1. Keritang	60.610	13	2.144
2. Reteh	48.054	10	2.080
3. Enok	37.259	8	2.147
4. Tanah Merah	35.679	9	2.552
5. Kemuning	15.278	7	4.581
6. Sungai Batang	13.665	9	6.586
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**210.545**	**56**	**2.659**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.6.3.2 Fasilitas Perekonomian

Untuk mendukung proses perekonomian di daerah ini, terdapat fasilitas niaga seperti pasar, pertokoan, dan kios yang

cukup memadai hingga proses transaksi niaga dapat berjalan dengan balk. Adapun fasilitas perdagangan yang ada diwilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan pada tabel 4.80 berikut :

Tabe14.80
Fasilitas Perekonomian
(Pertokoan dan Swalayan) Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pertokoan (Unit)	Rasio (X)
1. Keritang	60.610	498	82.164
2. Reteh	48.054	475	98.847
3. Enok	37.259	455	122.118
4. Tanah Merah	35.679	393	110.148
5. Kemuning	15.278	325	212.724
6. Sungai Batang	13.665	356	260.519
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**210.545**	**2.455**	**116.602**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

Tabel 4.81
Fasilitas Perekonomian
(Pasar) Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pasar (Unit)	Rasio (X)
1. Keritang	60.610	9	1.484
2. Reteh	48.054	8	1.664
3. Enok	37.259	8	2.147
4. Tanah Merah	35.679	7	1.961
5. Kemuning	15.278	6	3.927
6. Sungai Batang	13.665	6	4.390
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**210.545**	**44**	**2.089**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.6.3.3 Pendidikan

Wilayah calon kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah penduduk 210.545 jiwa memiliki jumlah rakyatnya yang telah tercerahkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah menjadi skala prioritas disamping pembangunan ekonomi sebagai contoh empirik misalnya bahwa Gubemur Riau periode 2009-2014 (H.M. Rusli Zainal) merupakan putera yang berasal dari daerah ini, mayoritas penduduknya memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dari tingkat dasar hingga menengah dan bagi pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan menengahnya, mereka kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi diluar, dan saat ini kabupaten Indragiri Hilir memiliki Universitas dan Sekolah Tinggi, ini menandakan bahwa pendidikan perguruan tinggi sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Berikut keterangan jumlah sarana dan usia penduduk yang berusia sekolah :

Tabel 4.82
Fasilitas dan Usia Pendidikan

Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)		Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio (X)
SD	165	13.773	0.0119
SLTP	44	6.705	0.0065
SLTA/SMK	12	5.264	0.0022
Univ/Sekolah Tinggi	-	1.211	-
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**221**	**27,853**	**0.0079**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

4.6.3.4 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dimilik oleh calon Kabupaten Indragiri Selatan ini meliputi Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling serta sejumlah tenaga medis, dokter, perawat dan bidan, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.83
Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Kesehatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Puskesmas Rawat Inap	10	210.454	0.474
Puskesmas Pembantu	40	210.454	1.899
Puskesmas Keliling	4	210.454	0.189
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**54**	**210.454**	**2.567**

Sumber : BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009

Tabel 4.84
Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk

Tenaga Medis		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Dokter	20	210.454	0.949
Perawat	50	210.454	2.374
Bidan	152	210.454	7.219
Calon Rasio Kabupaten Indragiri Selatan	**222**	**210.454**	**10.544**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.6.3.5 Persentase RT yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu, Perahu Motor atau Kapal

Dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2, 4 atau perahu motor, atau kapal dengan berbagai jenis, rata-

rata memiliki roda 2 dan perahu, dengan asumsi bahwa sarana transportasi melalui jalur sungai dan taut sangat dominan dalam dinamika ekonomi mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.85
Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan BermotorAtau Perahu, Perahu Motor atau Kapal

Jenis Kendaraan		Rumah Tangga	Rasio (X)
Kendaraan Roda 4	672	51.320	1.309
Kendaraan Roda 2	3.654	51.320	7.120
Perahu	1.647	51.320	3.209
Speat Boat dan Sejenis	176	51.320	0.342
Kapal Tongkang	17	51.320	0.033
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**6.166**	**51.320**	**12.014**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009, Data Diolah*

4.6.3.6 Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga

Salah satu kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat adalah ketersedian fasilitas listrik. Penggunaan listrik juga merupakan salah satu indikator dari tingkat kemajuan masyarakat disuatu daerah. Akses masyarakat terhadap Iistrik diwilayah calon kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran dapat diiihat pada tabel 4.86 berikut :

Tabel 4.86
Persentase Pelanggan Listrik (PLN/Non PLN) Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah R. Tangga Pelanggan Listrik (PLN/Non PLN)	Rasio (X)
1. Keritang	15.224	7.132	46.847
2. Reteh	12.099	6.114	50.533
3. Enok	9.394	3.907	41.590
4. Tanah Merah	7.999	2.512	31.403
5. Kemuning	3.342	1.156	34.590
6. Sungai Batang	3.262	1.578	48.375
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**51.320**	**22.399**	**43.645**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

Berdasarkan tabel di atas persentase pelanggan listrik untuk wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan adalah 43.645%. Pelanggan terbanyak untuk wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan terpusat di Kecamatan Reteh.

4.6.3.7 Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Fasilitas panjang jalan terdapat diwilayah calon Kabupaten Indragin Selatan menurut statusnya terdiri dari jalan kabupaten, jalan kota adminitratif, jalan desa dan jalan desa tertinggal. Panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.87
Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Kecamatan	Jumlah Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan Bermotor	Rasio (X)
1. Keritang	84.450	4.326	0.05122
2. Reteh	76.630	4.326	0.05645
3. Enok	21.750	4.326	0.19889
4. Tanah Merah	31.292	4.326	0.13824
5. Kemuning	17.853	4.326	0.24231
6. Sungai Batang	38.472	4.326	0.11244
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**270.447**	**4.326**	**0.01599**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.6.3.8 Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun ke Atas

Di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan, jumlah pekerja yang berpendidikan minimal SLTA adalah sebanyak 18.959 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia 18 Tahun ke atas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan adalah 141.289 orang. Persentase pekerja yang berpendidikan SLTA ke atas terhadap jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan dapat dilihat pada tabel 4.88 berikut :

Tabel 4.88
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas

Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia >18 Tahun	Jumlah Pekerja Berpendidikan SLTA	Rasio (X)
1. Keritang	33.152	3.587	10.819
2. Reteh	27.233	2.170	7.968
3. Enok	24.239	3.286	13.556
4. Tanah Merah	25.771	3.191	12.382
5. Kemuning	18.734	3.714	19.824
6. Sungai Batang	12.160	3.011	24.761
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**141.289**	**18.959**	**13.418**

Sumber : *BPS Indragirl Hilir Dalam Angka, 2009, Data Diolah*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah pekerja berpendidikan SLTA ke atas terhadap jumlah penduduk di atas usia 18 tahun, pada wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan adalah sebesar 13.418.

4.6.3.9 Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas

Di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan, jumlah pekerja yang berpendidikan minimal SI adalah sebanyak 419.95 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan adalah 99.324 orang. Persentase pekerja yang berpendidikan SI ke atas terhadap jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan dapat dilihat pada tabel 4.89 berikut :

Tabel 4.89
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SI terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas

Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia >25 Tahun	Jumlah Pekerja Berpendidikan S1	Rasio (X)
1. Keritang	25.478	117.17	46
2. Reteh	27.890	109.89	39
3. Enok	17.678	74.00	42
4. Tanah Merah	10.800	54.15	50
5. Kemuning	7.716	29.29	38
6. Sungai Batang	9.762	35.45	35
Rasio Calon Kabupaten Indragiri Selatan	**99.324**	**419.95**	**42**

Sumber: *BPS Indragirl Hilir Dalam Angka, 2009, Data Diolah*

4.6.3.10 Rasio Pegawal Negeri Sipil Terhadap Penduduk

Salah satu komponen penting dalam pelayanan Pemerintah Daerah adalah keberadaan pegawai negeri sipil.Asumsinya, semakin banyak pegawai negeri sipil maka semakin efektif pelaksanaan tugastugas Pemerintah Daerah khususnya pelayanan masyarakat. Dilihat dad sisi ini, jumlah pegawai negeri sipil yang ada di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan secara keseluruhan adalah sebanyak 1.428 sedangkan jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah adalah sebanyak 85 orang, penduduk yang harus dilayani di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan adalah sebanyak 210.545 orang. Jumlah Pegawai negeri sipil dan jumlah penduduk beserta rasionya dapat dilihat pada tabel 4.90 berikut :

Tabel 4.90
Raslo Pegawal Negeri Sipil Terhadap Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah PNS Gol. I/II/III/IV	Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Dinas Pendidikan	881	210.545	3.509
Pegawai Kecamatan	58	210.545	4.037
Penyuluh Pertanian	18	210.545	0.854
Kesehatan	222	210.545	10.544
Rasio Calon Kabupaten Baru	**1.428**	**210.545**	**67.823**

Sumber: *BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.4 Kemampuan Keuangan

Pembentukan Kabupaten Indragieri Hilir melalui pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan membawa konsekwensi berupa pelaksanaan otonomi dimasing-masing wilayah baru. Calon Kabupaten Indragiri Selatan diharapkan memiliki kemampuan sendiri yang memadai dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Dana ini pada dasarnya bersumber dari masyarakat setempat, yang banyak dipengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan calon Kabupaten Indragiri Selatan menurut PP No. 78 Tahun 2007 ada 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah PDS, Rasio PDS terhadap jumlah penduduk, dan rasio PDS terhadap PDRB Non Migas.

4.6.4.1 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri

Jumlah Penerimaan Daerah sendiri adalah Seluruh penerimaan daerah yang berasal dan pendapatan asli daerah yang terdiri dan pajak daerah, retribusi daerah, bagian

laba usaha daerah dan pendapatan lain-lain. Data terakhir penerimaan daerah sendin calon Kabupaten Indragiri Selatan dapat dilihat pada tabel 4.91 berikut :

Tabel 4.91
Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri

Kabupaten/Kota	Penerimaan Asli Daerah (Rp)
Indragiri Hilir	798.508.112.910
Jumlah	**798.508.112.910**
Calon Kabupaten Indragiri Selatan	128.108.122.000
Kabupaten Induk	**678.399.990.910**

Sumber: *BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.4.2 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri terhadap Jumlah Penduduk

Data terakhir menunjukkan, jumlah penerimaan daerah sendiri terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan dapat dilihat pada tabel 4.92 berikut :

Tabel 4.92
Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri	Jumlah Penduduk	Rasio (X)
128. 108.122.234	**210.545**	**608.45**

Sumber :*BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.4.3 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap PDRB Non Migas

Data terakhir menunjukkan, jumlah penerimaan daerah sendin terhadap PDRB Non Migas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan dapat dilihat pada tabel 4.93 berikut :

Tabel 4.93
Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap PDRB Non Migas

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri	PDRB Non Migas Tahun 2008	Rasio (X)
128. 108.122.234	1491.791	0.11
128. 108.122.234	210.545	608.45

Sumber :*BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.5 Sosial Budaya

4.6.5.1 Fasilitas Peribadatan

Sarana ibadah yang ada di wilayah ini menunjukkan adanya spirit keberagaman yang tinggi dikalangan penduduk wilayah Kabupaten Indragiri Selatan. Suatu yang sangat penting bagi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya harmonisasi hidup, sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi proses orientasi pembangunan melalui kebijakan pemerintah setempat yang dilandasi oleh nilai-nilai religius yang ada dimasyarakat yang berorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari jumlah sarana peribadatan yang ada di wilayah ini menunjukkan adanya pluralisme dan kemajemukan rakyatnya dalam memejuk suatu keyakinan agama. Sarana peribadatan yang tersedia terdiri dari musholla, masjid, gereja maupun vihara. Rasio tempat peribadatan per

10.000 penduduk di wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan adalah sebesar 29.019 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.94
Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Sarana Peribadatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Masjid	256	210.454	12.158
Surau /Mushollah	348	210.454	16.528
Gereja	-	210.454	-
Vihara	7	210.454	0.332
Total	**611**	**210.454**	**29.019**

Sumber :*BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.5.2 Fasilitas Olahraga dan Seni

Untuk mendukung proses kreatifitas seni dan olahraga di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan terdapat fasilitas berupa gedung pertunjukkan dan olahraga, sehingga proses berkesenian sebagai asset dan potensi dapat dikembangkan di samping mempromosikan potensi budaya khususnya melalui jalur seni, di wilayah ini sarana tersebut sudah ada seperti dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.95
Fasilitas Olahraga dan Seni Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Seni dan Balai Pertemuan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Pementasan Seni	6	210.454	0.284
Gedung Serbaguna	6	210.454	0.284
Balai Pertemuan	62	210.454	2.944
Total	**74**	**210.454**	**3.514**

Sumber : *BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

Jumlah lapangan olah raga mellputi sepak bola, bola volley, bulu tangkis, sepak takraw dan lain-lain terdapat 221. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.96
Fasilitas Olahraga Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Olahraga		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Lapangan Sepakbola	62	210.454	2.994
Lapangan Sepak Takraw	56	210.454	2.659
Lapangan Bola Volly	68	210.454	3.229
Lapangan Badminton	35	210.454	1.662
Total	**221**	**210.454**	**10.496**

Sumber : *BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.6 Sosial Politik

4.6.6.1 Rasio Penduduk yang ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang mempunyai Hak Pilih

Adanya konstitusi yang memberikan jaminan kepada segenap warga Negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya, hal ini dimanfaatkan oleh warga dan masyarakat calon Kabupaten Indragiri Selatan. Kesadaran politik masyarakat calon wilayah Kabupaten Indragiri Selatan dalam menayalurkan aspirasi politiknya seperti terlihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.97
Jumlah Hak Pilih

Kecamatan	Jumlah yang Mempunyai Hak Pilih	Jumlah Penduduk yang menggunakan Hak Pilih	Rasio (X)
1. Keritang	27.124	25.412	0.936
2. Reteh	29.168	27.123	0.929
3. Enok	22.245	19.931	0.895
4. Tanah Merah	24.135	21.135	0.875
5. Kemuning	13.356	11.190	0.837
6. Sungai Batang	11.798	10.413	0.882
Total	**295.658**	**115.204**	**0.389**

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.6.6.2Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Pada wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan terdapat 537 organisasi kemasyarakatan yang terdiri dad OKP dan organisasi Profesi dan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.98
Jumlah Organsasi Kemasyarakatan Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah	Jumlah Penduduk	Rasio (X)
LSM	62	210.454	2.944
OKP	221	210.454	10.496
ORMAS	254	210.454	12.063
Total	**537**	**210.454**	**25.505**

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.6.7 Luas Daerah

Kriteria luas daerah pada kajian ini dilihat dari sub indikator luas wilayah keseluruhan serta luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan.

4.6.7.1 Luas Wilayah Keseluruhan

Dan segi luas wilayah, luas wilayah Kabupaten Indragiri Selatan adalah 3.225,09 km2 atau 27,78 % seperti terlihat pada tabet berikut ini :

Tabel 4.99
Luas Wilayah Keseluruhan

Kecamatan	Luas Wilayah (KM)
1. Keritang	543,45
2. Reteh	407,75
3. Enok	880,86
4. Tanah Merah	721,56
5. Kemuning	525,48
6. Sungai Batang	145,99
Total	**3.225,09**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

Pada tabel di atas terlihat bahwa kecamatan yang terluas adalah kecamatan Enok, sedangkan wilayah terkecil adalah di kecamatan Sungai Batang.

4.6.7.2 Luas Wilayah Efektif yang dapat dikembangkan untuk Pemukiman dan Industri

Luas efektif yang dapat dikembangkan di wilayah talon Kabupaten Indragiri Selatan adalah 1.263.085 Km^2 tidak

termasuk wilayah lautan sedangkan luas wilayah pemukiman adalah 531.086 Km^2, untuk Iebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.100
Luas wilayah efektif yang dapat dikembangkan untuk Pemukiman dan Industri

Kecamatan	Jumlah Luas Wilayah Pemukiman	Jumlah Luas Wilayah Pengembangan
1. Keritang	71.725	271.725
2. Reteh	103.86	203.86
3. Enok	140.22	340.22
4. Tanah Merah	104.61	216.61
5. Kemuning	72.71	152.71
6. Sungai Batang	37.96	77.96
Jumlah Luas Wilayah	**531.086**	
Jumlah Luas Wilayah Industri		**1.263.085**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

4.6.8 Pertahanan

4.6.8.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Was Wilayah

Kedudukan strategis wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan sebagai kawasan perbatasan, disamping merupakan asset dalam pengembangan wilayah sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan Negara jika tidak dikelola dengan serius, untuk itu aspek pertahanan sangat menentukan terhadap pemekaran suatu wilayah berdasarkan PP 78 Tahun 2007, jika dilihat dari aspek ketersediaan aparat TNI, balk angkatan darat, taut dan udara.

Untuk wilayah calon pemekaran wilayah Kabupaten Indragiri Selatan, ketersediaan aparat hanya ada dari TNI angkatan darat dengan jumtah Personil sebanyak 160 Personil. Jika diperbandingkan dengan luas wilayah Indragiri Selatan, maka ratio personii terhadap luas wilayah keseluruhan adalah 3.225,09 km2 (dalam Ha) sebesar 0.000496. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.101 berikut ini :

Tabel 4.101

Rasio jumlah personal aparat pertahanan terhadap luas wilayah

Pertahanan /Kesatuan		Luas Wilayah	Rasio (X)
Personil TNI AD	160	3.225,09	0.000496
Personil TNI AL	-	-	-
Personil TNI AU	-	-	-
Total	**160**	**3.225,09**	**0.000496**

Sumber : *BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.8.2 Karakteristik Wilayah, dilihat dari sudut pandang Pertahanan

Kedudukan strategis wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan sebagai kawasan perbatasan, disamping merupakan asset dalam pengembangan wilayah sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan Negara jika tidak dikelola dengan serius. Karakterisik calon wilayah pemekaran Indragiri Selatan sangat rawan dikarenakan wilayah ini terdiri dari daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

4.6.9 Keamanan

4.6.9.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk

Jika dilihat dari aspek keamanan dalam menjaga ketertiban wilayahnya, maka jumlah personil yang ada di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan adalah 170 personil. Jika diperbandingkan dengan luas wilayah Indragiri Selatan, maka ratio personil terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0.000807 atau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.102
Rasio Jumlah personal aparat Keamananterhadap Jumlah Penduduk

Pertahanan /Kesatuan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Personil POLRI	170	210.545	0.000807
Total	**170**	**210.545**	**0.000807**

Sumber : *BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.10 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

4.6.10.1 Indek Pembangunan Manusia

Tujuan pembangunan millennium (*Millenium Development Goals MDGs*) adalah mengatasi delapan tantangan utama pembangunan, kedelapan tantangan itu bersumber dari Deklarasi Milennium PBB, sebuah komitmen global mengenai pembangunan yang dibuat oleh para pemimpin dunia dan disetujui oleh Sidang Umum PP dimana pencapaiannya secara global harus dilakukan pada 2015. Untuk mengukur tingkat

pencapaian pembangunan manusia, dan sesuai dengan indikator yang tetah ditetapkan dalam PP No. 78 Tahun 2007 adalah Indeks Pembangunan Manusia. Adapun indeks Pembangunan Manusia untuk calon wilayah Kabupaten Indragiri Selatan yang dilihat dari taraf hidup manusia adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.103
Indek Pembangunan Manusia

Kecamatan	Indek Pembangunan Manusia			
	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata2 Lama Sekolah	IPM
Tahun 2007	70.9	98.00	7.2	72.40
Tahun 2008	70.7	97.52	7.3	71.87

Sumber : *BPS Indragirl Hilir, 2009, Data Diolah Kembali*

4.6.11 Rentang Kendali

4.6.11.1 Rata-Rata Jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten

Rentang kendali merupakan indikator yang mengisyaratkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa pemerintah. Rentang kendali ini diindikasikan dari jarak tempuh dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten. Berdasarkan kondisi sebelum pemekaran, wilayah Kabupaten Indragiri Selatan memiliki jarak rata-rata ke ibukota Tembilahan sejauh 114,17 Km dengan rata-rata waktu tempuh mencapai 3 jam.

Sedangkan wilayah sisanya seteiah pemekaran berjarak rata-rata 72,79 Km dengan waktu tempuh rata-rata 1,64 jam. Dengan pemekaran, jarak tempuh dan waktu tempuh untuk

menjangkau fasilitas layanan pemerintah menjadi kecil di wilayah Kabupaten Indragiri Selatan, di bandingkan sebelum pemekaran. Hal ini didasarkan dari rata-rata jarak dan waktu tempuh antar kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Selatan hanya sekitar 50.5 km untuk jarak tempuh dan sekitar 1,1 jam untuk waktu tempuh. Jarak dan waktu tempuh untuk masing-masing kecamatan di wilayah Indragiri Hilir di tujukan pada tabel berikut :

Tabel 4.104
Rentang Kendali

Kecamatan	Jarak (km) dan waktu tempuh (jam) antar kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir					
	Kemuning	Reteh	Enok	Tanah Merah	Keritang	Sungai Batang
Kemuning		60Km	120Km	120Km	70Km	90Km
Reteh	1Jam		40Km	120Km	30Km	70Km
Enok	2.4Jam	2.4Jam		40Km	120Km	60Km
Tanah Merah	2.4Jam	2.4Jam	0.35Jam		120Km	60Km
Keritang	1.2Jam	0.3Jam	2.4Jam	2.4Jam		50
Sungai Batang	1.4Jam	1Jam	1Jam	1Jam	1Jam	
Jarak rata-rata kecamatan (jam) 50 km/Jam						
Waktu tempuh Rata-rata kecamatan (jam) 50 km /Jam						

Sumber : *Data olahan,2009*

4.6.11.2 Rata-Rata Jarak Kecamatan Ke Pusat Pemerintahan

Rata-rata jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten untuk wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan adalah 1.1 Jam pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan akan membawa pada perubahan bagi masyarakat yang selama ini bertempat tinggal di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan, yakni akan semakin dekatnya jarak tempuh ke pusat pemerintahan kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.105
Rata-Rata Jarak Kecamatan Ke Pusat Pemerintahan

Kecamatan	Jumlah Luas Wilayah Pemukiman	Jumlah Luas Wilayah Pengembangan
1. Keritang	71.725	271.725
2. Reteh	103.86	203.86
3. Enok	140.22	340.22
4. Tanah Merah	104.61	216.61
5. Kemuning	72.71	152.71
6. Sungai Batang	37.96	77.96
Jumlah Luas Wilayah	**531.086**	
Jumlah Luas Wilayah Industri		**1.263.085**

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.7 Analisis Hasil Kajian

4.7.1 Pendekatan Analisis

Pada bagian metodologi telah dibahas, bahwa terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam studi ini (balk pada ,tahap penggalian data ataupun pada tahap analisis data).Kedua pendekatan yang dimaksud adalah, pendekatan kauntitatif, dan pendekatan kualitatif, dan pendekatan kuantitatif Iebih mendapat tekanan dalam kajian ini. Sebab, kajian ini dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan yang telah tersusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 secara komprehensif menilai kelayakan pembentukan suatu daerah

otonom melalui 11 (sebelas) kriteria, yang Iebih lanjut diuraikan secara Iebih rinci dalam 35 sub indikator. Ukuran itulah yang kemudian menjadi landasan bagi penilaian bagi daerah dalam melakukan pemekaran wilayahnya. Ke 35 sub-indikator tersebut kemudian dibeikan skor berdasarkan bobot yang telah ditentukan sehingga secara keseluruhan atau skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh indikator PP tersebut membenkan gambaran kemampuan ekonomi dan kekayaan potensi yang saat ini dimiliki oleh daerah otonom (baik kabupaten induk atau pun calon kabupaten otonom).

Berdasarkan amanat dan Peraturan Pemerintah tersebut, skor total dari rencana calon wilayah pemekaran harus di atas rata-rata batas kelulusan dan tidak boleh salah satunya memiliki skor di atas batas kelulusan yang ditetapkan, sehingga dengan demikian balk calon kabupaten maupun kabupaten induk yang ditinggalkan dapat bersamasama berkembang menjadi daerah otonom yang mampu membiayai dinnya sendin tanpa hares menjadi beban bagi pusat serta, masyarakat.

Melalui penggabungan kedua pendekatan tersebut, diharapkan akan dapat disajikan suatu informasi yang lengkap, sehingga Tim DPOD akan memiliki informasi yang lebih memadai dalam pengambilan keputusan terutama tentang kelayakan suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten Indragiri Selatan menjadi daerah otonom yang baru yang ada di Propinsi Riau.

4.7.2 Analisis Kelayakan Pemekaran

Analisis mengenai kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan menjadi daerah otonom, didasarkan pada data-

data yang diperoleh dengan jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari 35 subindikator dari PP No. 78 Tahun 2007 tersebut.

Dalam Bab II PP 78/2007 yang membahas tentang syarat-syarat pembentukan daerah secara jelas di atur dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa : Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota, yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pada kajian ini hanya membahas mengenai syarat teknis yang secara tegas diatur dalam pasal 6 ayat 1 PP 78/2007, yang menyebutkan syarat teknis meliputi: faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pada ketentuan pada pasal 6 ayat 1 inilah maka pengkajian terhadap kelayakan usulan pemekaran daerah Kabupaten Indragiri Selatan, akan dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap potensi Kabupaten Indragiri Selatan. Dalam kajian ini akan di bahas satu persatu tentang analisis masing-masing rencana daerah otonom baru.

4.7.3 Analisis Kelayakan Pemekaran Calon Kabupaten Indragiri Selatan

4.7.3.1 Kependudukan

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang ikut menjadi penentu dalam rangka pemekaran wilayah

ini, sebab jumlah penduduk termasuk ke dalam kriteria potensi daerah yang mentukan bagi berhasil atau tidaknya suatu daerah tersebut dalam memajukan sekaligus juga mensejahterakan masyarakatnya. Namun perlu juga diingat, bahwa jumlah penduduk selain bisa menjadi faktor yang negative. Artinya, jumlah penduduk yang besar namun tidak disertai dengan kualitas yang memadai baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan dan kesejahteraan justru dapat menjadi beban bagi suatu daerah itu sendiri.

Dari hasil penggalian data, dapat diperoleh gambaran bahwa untuk kriteria jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Selatan cukup memadai, yakni berada pada angka nilai batas kelulusan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.106
Skor Indikator Jumlah Penduduk
Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Jumlah Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding (%)	Skor
1.	Jumlah Penduduk	210.545	83	5
2.	Jumlah Penduduk Wilayah Pembanding	252.299	100	5

Sumber : BPS. Provinsi Riau,2008, data diolah

Rasio nilai variable jumlah penduduk pada wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan terhadap jumlah penduduk wilayah pembanding (jumlah penduduk rata-rata kabupaten lain di provinsi Riau) adalah sebesar 252.299 dengan

skor nilai 5 (lima) jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah pemekaran rencana Kabupaten Indragiri Selatan maka memiliki persentase sebesar 83 persen dengan skor 5 (lima).

4.7.3.2 Kepadatan Kependudukan

Wilayah calon pemekaran, Kabupaten Indragiri Selatan yang luas wilayah total mencapai 3.225,09 Km^2, memiliki luas wilayah efektif seluas 1.794,17 Km^2. Dengan jumlah penduduk sebanyak 210.545 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk per Km^2 wilayah efektif di wilayah calon pemekaran sebesar 74 jiwa per Km^2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk pada wilayah INHIL yang tersisa setelah pemekaran sebesar 57,37 jiwa per Km^2. Tingkat kepadatan penduduk pada wilayah calon pemekaran ini maupun pada wilayah induk yang tersisa setelah pemekaran lebih rendah dari rata-rata tingkat kepadatan penduduk per wilayah efektif di kabupaten lain di provinsi Riau, yang rata-rata kepadatan penduduknya sebesar 29,42 jiwa Km^2.

Tabel 4.107
Skor Indikator Kepadatan Penduduk per Was Wilayah Efektif pada Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Jumlah Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	74,00	251	5
	Wilayah Sisa setelah Pemekaran	57,37	195	5
2.	Wilayah Pembanding	29,42	100	5

Sumber : *BPS. Provinsi Riau,2008, data diolah*

Rasio nilai variable tingkat kepadatan penduduk perwilayah efektif pada wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan terhadap kepadatan penduduk per wilayah efektif pada wilayah pembanding adalah sebesar 251 %, yang berarti bahwa variable tingkat kepadatan penduduk pada wilayah calon pemekaran Indragiri Selatan memiliki skor 5 (lima). Sedangkan pada wilayah sisa (Indragiri Hilir setelah pemekaran) rasio tingkat kepadatan penduduknya per wilayah efektif dengan kepadatan penduduk wilayah pembanding sebesar 195% yang berarti indikator kepadatan penduduk wilayah Indragiri Hilir yang tersisa setelah pemekaran memiliki skor 5 (lima).

4.7.3.3 Faktor Kemampuan Ekonomi

4.7.3.3.1 Indikator PDRB Non Migas Perkapita

PDRB per kapita non-migas merupakan salah satu indikator yang umum dan panting untuk menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis, di peroleh gambaran bahwa tingkat PDRB perkapita wilayah talon pemekaran lebih tinggi dari PDRB per kapita wilayah pembanding. PDRB non migas pada wilayah calon pemekaran, Indragiri Hilir sebesar Rp 13.601 Juta per kapita, sedangkan PDRB non Migas pada sisa sebesar Rp 9.89 Juta per kapita, sementara wilayah pembanding memiliki PDRB non migas per kapita sebesar Rp 6,93 Juta per kapita.

Tabel 4.108
Skor Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Pada Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Pertumbuhan Ekonomi (%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	13.601	188	5
	b.Wilayah Sisa	9.89	142	5
2.	Wilayah Pembanding	6,93	100	5

Sumber : *BPS. PDRB Kabupaten Indragiri Selatan Riau,2008*

Dari tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah rencana pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan sangat mampu dengan persentase sebesar 188 % dengan skor 5 (lima). IN disebabkan oleh daerah ini sangat mudah diakses bagi pelaku-pelaku ekonomi yang ada,sedangkan diwilayah sisa juga memiliki skor yang sama yaitu 5 (lima).

4.7.3.3.2 Indikator Kontribusi PDRB Non Migas

Indikator kontribusi PDRB Non Migas di ukur dari Rasio antara Non Migas wilayah analisis menurut harga berlaku tahun 2005 dengan Non Migas Provinsi Riau pada tahun yang sama. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sebelum pemekaran memberi kontribusi sebesar 32.38 % terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau. Dari besaran Kontribusi tersebut, sekitar 19.85 bersumber dari wilayah talon Kabupaten Indragiri Selatan, sisanya bersumber dari wilayah

sisa dari wilayah talon pemekaran dengan kontribusi sebesar 12.53 % Juta per kapita terhadap PDRB NON Migas Provinsi Riau. Sedangkan wilayah-wilayah kabupaten di Provinsi Riau rata-rata memberi kontribusi sebesar 15.56 %.

Tabel 4.109
Skor indikator Kontribusi PDRB Non Migas Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan Terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau

No	Wilayah	Nilai Indikator : Kontribusi PDRB Non Migas (%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	12.53	80	5
	b.Wilayah Sisa	19.85	127	5
2.	Wilayah Pembanding	19.56	100	5

Sumber : *BPS. PDRB Kabupaten Indragiri Selatan Riau,2008*

Berdasarkan nilai Rasio antara kontribusi PDRB Migas wilayah calon pemekaran dengan nilai kontribusi wilayah pembanding terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau yang Iainnya sebesar 32.38 menunjukkan bahwa calon wilayah pemekaran hanya memberi kontribusi terhadap PDRB Non Migas Provinsi hanya sebesar 12.53 %, sementara wilayah sisa dari wilayah pemekaran memberi kontribusi Iebih besar dari wilayah pembanding dengan nilai sebesar 19.85 Dengan demikian maka indikator kontribusi PDRB Non migas pada wilayah calon pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan terhadap PDRB Non Migas Provinsi memiliki skor 5 (lima) sementara wilayah sisa pemekaran memiliki nilai skor 5 (lima)

4.7.3.4 Faktor Potensi Daerah

4.7.3.4.1 Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk

Walaupun ketersediaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Non Bank yang ada di wilayah calon pemekaran Indragiri Selatan, yang di indikasikan oleh ratio lembaga bank dan Non Bank per 10.000 penduduk adalah sebesar 2.94 lembaga per 10.000 penduduk, namun indek ketersediaan lembaga tersebut tidak jauh berbeda dengan ketersediaannya dengan wilayah sisa setelah pemekaran. Sedangkan indeks ketersediaan lembaga Bank dan Non Bank pada wilayah sisa pemekaran mencapai 3.67 lembaga per 10.000 penduduk, yang berarti indeksnya Iebih rendah dari indeks wilayah pembanding.

Tabel 4.110
Skor Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk pada Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Bank & Lembaga Non Bank Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a. Wilayah Pemekaran	2.94	92	5
	b. Wilayah Sisa	3.67	87	5
2.	Wilayah Pembanding	3.19	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Berdasarkan dari rasio antara indeks ketersediaan lembaga Bank dan Non Bank yang ada di wilayah calon pemekaran dengan indeks ketersediaannya berada di atas 92 %, maka nilai

skor untuk indikator ini bemilai 5 (lima). Demikian pula halnya dengan skor indikator Bank dan non Bank ini di wilayahkan sisa pemekaran berada di atas 87% dengan nilai skor untuk indikator ini 5 (lima).

4.7.3.4.2 Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk

Jumlah pertokoan kedai, warung dan tempat perbelanjaan lainnya yang ada di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan, secara relative jumlah pertokoan lebih banyak di bandingkan di wilayah sisa pemekaran, namun lebih sedikit di bandingkan dengan wilayah pembanding yaitu sekitar 116.60 pertokoan per 10.000 penduduk, sementara di wilayah sisa rasionya sebesar 109,35 pertokoan per 10.000 penduduk dan untuk wilayah pembanding nilai rasionya mencapai 119,65 per 10.000 penduduk.

Tabel 4.111
Skor Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a. Wilayah Pemekaran	116.60	97	5
	b. Wilayah Sisa	109.35	91	5
2.	Wilayah Pembanding	119.65	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Dengan membandingkan antara ketersediaan kelompok pertokoan per 10.000 penduduk di wilayah analisis dengan ketersediaan di wilayah pembanding, maka di peroleh ratio sekitar 97% di wilayah calon pemekaran, sehingga indikator ini memiliki nilai skor 5 (lima) untuk wilayah calon pemekaran, sedangkan wilayah sisa pemekaran memiliki ratio sekitar 91% sehingga indikator ini memiliki nilai 5 (lima).

4.7.3.4.3 Indikator Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk

Tabel 4.112
Skor indikator Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk pada Wilayah Calon Kabupaten Indragirl Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	2.08	97	5
	b.Wilayah Sisa	1.70	80	5
2.	Wilayah Pembanding	2.13	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Dari tabel di atas perbandingan indeks ketersediaan pasar pada wilayah calon pemekaran dengan wilayah pembanding menghasilkan rasia sekitar 97%, dengan skor 5 (lima) sementara diwilayah sisa setelah pemekaran yaitu sebesar 80% atau setara dengan skor nilai 5 (lima).

4.7.3.4.4 Indikator Rasio Sekolah SD Per Penduduk usia SD

Ketersediaan Prasarana sekolah dasar menurut jumlah usia sekolah dasar pada wilayah calon pemekaran kabupaten

Indragiri Selatan lebih balk jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Baik jika dibandingkan dengan wilayah sisa pemekaran, maupun bila di bandingkan dengan wilayah pembanding. Terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.113
Skor indikator Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia di Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.0119	205	5
	b.Wilayah Sisa	0.0057	99	5
2.	Wilayah Pembanding	0.0058	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir dalam Angka,2008*

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio antara sekolah dasar per penduduk usia SD di wilayah calon pemekaran adalah 0.0119 yang berarti setiap 1.000 penduduk usia SD terdapat 11.9 unit SD dapat menampung siswa per SD. Angka ratio sekolah dasar per penduduk usia SD di wilayah sisa pemekaran juga tidak berbeda jauh nilainya yaitu sekitar 5.7 unit SD.

Mengingat ketersediaan indeks sekolah dasar (nilai rasio sekolah SD per penduduk usia SD) pada masing-masing wilayah setelah dianalisis maka skor untuk rencana wilayah kabupaten Indragiri Selatan memiliki skor 5 atau 205 % sedangkan diwilayah sisa setelah pemekaran juga memiliki skor yang sama dengan nilai skor yaitu 5 (lima) dengan persentase 99 %.

4.7.3.4.5 Indikator Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP

Indeks ketersediaan SUP pada wifayah calon Kabupaten Indragiri Selatan (di ukur dari rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP) sedikit Iebih tinggi di bandingkan pada wilayah sisa pemekaran. Indeks ketersediaan sekolah SUP pada wilayah calon pemekaran ini sebesar 0.0065 yang berarti setiap 1.000 penduduk usia SUP terdapat 6.5 unit SUP, sementara di wilayah sisa pemekaran hanya tersedia 6.6 unit per setiap 1.000 penduduk usia SUP. Sedangkan indeks ketersediaan sekolah SUP pada wilayah pembanding mencapai nilai 4.1 unit per setiap penduduk usia SUP. Untuk lengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.114
Skor Indikator Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.0065	158	5
	b.Wilayah Sisa	0.0066	158	5
2.	Wilayah Pembanding	0.0041	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir dalam Angka,2008*

Nilai indeks ketersediaan sekolah SLTP (nilai rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP) pada wilayah calon pemekaran hanya sekitar 158 % dari nilai indeks ketersediaan SLTP di wilayah

pembanding, sedangkan rasio indek ketersediaan sekolah SLTP ini di wilayah sisa pemekaran terhadap indek wilayah pembanding sama yaitu sekitar 158 %. Dengan demikian, berdasarkan pada nilai rasio perbandingan indek ketersediaan wilayah calon pemekaran dan wilayah sisa pemekaran terhadap nilai indek wilayah pembanding, maka skor indikator rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP di wilayah calon pemekaran bemilai skor 5 (lima) sedangkan wilayah sisa pemekaran bemilai skor 5 (lima).

4.7.3.4.6 Indikator Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA

Indeks ketersediaan sekolah SLTA pada wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan memilki indeks yang lebih rendah balk jika di bandingkan dengan wilayah sisa pemekaran, maupun jika di bandingkan Nilal indeks ketersediaan sekolah SLTA di wilayah calon pemekaran yang di ukur dari rasio.

Sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 0.0022 yang setiap 1.000 penduduk usia sekolah SLTA terdapat sekolah SLTA sebanyak 2.2 unit sekolah sedangkan nilai indeks pada wilayah sisa pemekaran sebesar 0.0035 yang berarti terdapat 3.5 unit sekolah SLTA per 1.000 penduduk usia SLTA. Lebih jelasnya indeks ketersediaan sekolah SLTA pada wilayah analisis dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 4.115
Skor Indikator Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.0022	104	5
	b.Wilayah Sisa	0.0035	166	5
2.	Wilayah Pembanding	0.0021	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir dalam Angka,2008*

Hasil perbandingan nilai indeks ketersediaan sekolah SLTA di wilayah calon pemekaran dengan nilai indeks berupa wilayah pembanding menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sarana sekolah SLTA per penduduk usia SLTA pads wilayah calon pemekaran hanya sekitar 104 % dari rasio sarana sekolah SLTA per penduduk usia SLTA di wilayah pembanding, dengan demikian indikator ini pada wilayah calon pemekaran memiliki skor 5 (lima) demikian pula pada wilayah sisa pemekaran, skor pada indikator rasio sarana sekolah per penduduk usia SLTA memiliki nilai skor 5 (lima).

4.7.3.4.7 Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk

Ketersediaan Fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu clan sarana lainnya juga merupakan indikator pening untuk menilai potensi wilayah calon pemekaran dalam menyediakan fasilitas layanan dasar seperti kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan data indeks

ketersediaan sarana kesehatan yang di ukur dad rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk, terlihat bahwa nilai indeks ini di wilayah calon pemekaran bernilai sebesar 2.564 unit per 10.000 penduduk. Nilai indeks ketersediaan sarana kesehatan di wilayah calon pemekaran ini Iebih tinggi jika di bandingkan nilai indeks pada wilayah pembanding yang nilai indeksnya sebesar 2.424 unit yang berarti setiap 10.000 penduduk jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah pembanding sebanyak 2.345 unit. Lengkapnya lihat tabel berikut :

Tabel 4.116
Skor Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	2.564	109	5
	b.Wilayah Sisa	2.424	103	5
2.	Wilayah Pembanding	2.345	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir dalam Angka,2008*

Hasil perbandingan indeks ketersediaan sarana kesehatan di wilayah calon pemekaran dengan indeks serupa di wilayah pembanding memiliki 109 % yang berarti bahwa calon wilayah Kabupaten Indragiri Selatan memiliki potensi yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya di bandingkan dengan wilayah pembanding. Sedangkan wilayah sisa pemekaran, meskipun potensi dalam menyediakan fasilitas kesehatan lebih rendah dari wilayah

pembandingan namun nilai skor nya sama dengan rencana wilayah pemekaran Indragiri Selatan sama-sama skor 5 (lima).

Dengan demikian potensi calon wilayah pemekaran dalam menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat sangat mendukung jika Indragiri Selatan resmi menjadi daerah otonom.

4.7.3.4.8 Indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk

Tabel 4.117
Skor Indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	10.544	111	5
	b.Wilayah Sisa	12.648	134	5
2.	Wilayah Pembanding	9.415	100	5

Sumber : BPS, Indragiri Hilir dalam Angka,2008

Pada tabel di atas terlihat bahwa indeks ketersediaan tenaga medis di wilayah calon pemekaran sebesar 10.544 yang artinya setiap 10.000 penduduk terdapat tenaga medis sebanyak 1.05 orang tenaga medis. Sedangkan di wilayah sisa pemekaran dan di wilayah pembanding masing-masing terdapat 1.2 dan 9.4 tenaga medis per 10.000 penduduk. Dengan membandingkan indeks ketersediaan tenaga medis pada masing-masing wilayah

analisis dengan wilayah pembanding, maka indikator potensi ketersediaan tenaga medis (rasio tenaga medis per 10.000 penduduk) pada wilayah calon pemekaran maupun pada wilayah sisa pemekaran masing-masing memiliki skor 5 (lima).

4.7.3.4.9 Indikator Persentase Penduduk yang Mempunyai Kendaraan bermotor/Kapal/Perahu Motor

Indeks ketersediaan kendaraan bermotor atau alat transformasi Iainnya pada rumah tangga juga merupakan indikator penting bagi calon pemekaran wilayah, karena indeks tersebut mengindentifikasikan ketersediaan sarana penunjang transformasi bagi masyarakat dalam mengakses layanan jasa pemerintah maupun dalm menunjang aktivitas perekonomian. Indeks ketersediaan kendaraan bermotor/ perahu/kapal bermotor di wilayah calon pemekaran yang di ukur dari persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor menunjukkan nilai yang lebih kecil di bandingkan di wilayah sisa pemekaran, maupun di wilayah pembanding.

Tabel 4.118
Skor Indikator Persentase Penduduk yang Mempunyai Kendaraan Bermotor/KapaUPerahu Motor di Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Presentase RT Memiliki Kendaraan Bermotor/ Perahu/Kapal/Motor (%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	12.01	80	5
	b.Wilayah Sisa	14.52	96	5
2.	Wilayah Pembanding	15.00	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir dalam Angka,2008*

Persentase rumah tangga di wilayah calon pemekaran yang memiliki kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor sebesar 80 rumah tangga, sedangkan di wilayah sisa pemekaran proporsinya sebesar 96%. Berdasarkan perbandingan, nilai indeks ketersediaan kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor di wilayah analisis dengan nilai indeks serupa di wilayah calon pemekaran bernilai rasio perbandingan untuk wilayah sisa pemekaran. Dengan demikian skor indikator persentase rumah tangga yang memilki kendaraan bermotor/ perahu/kapal bermotor di wilayah calon pemekaran memiliki skor 5 (lima) sedangkan wilayah sisa memiliki skor 5 (lima).

4.7.3.4.10 Indikator Persentase Pelanggan Ustrik terhadap jumlah Rumah Tangga

Fasilitas layanan penerangan PLN di wilayah calon pemekaran, umumnya hanya mampu melayani rumah tangga yang berada di pusat-pusat kecamatan dan beberapa desa di sekitamya, sehingga sebagian besar masyarakat menggunakan sarana penerangan Non PLN. Kondisi tersebut juga tidak berbeda jauh dengan di wilayah sisa pemekaran. Besarnya pelanggan listrik balk yang PLN maupun pelanggan listrik Non PLN di calon wilayah pemekaran baru sekitar 22.39 dari total rumah tangga yang ada, sedangkan di wilayah sisa pemekaran persentase pelanggan listrik ini mencapai 41.01 dad total rumah tangga. Sementara di rata-rata kabupaten lain di Iingkungan Provinsi riau, di mana rata-rata persentase pelanggan listriknya terhadap total rumah tangganya mencapai 75.13.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelayanan fasilitas penerangan bagi rumah tangga di wilayah

calon pemekaran masih terpaut jauh ketinggalan di bandingkan dengan tingkat pelayan jasa penerangan di kabupaten lainnya di provinsi Riau.

Indikator tingkat pelayan jasa penerangan yang di ukur dari persentase pelanggan PLN dan Non PLN di wilayah analisis maupun di wilayah pem banding dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.119
Skor Indikator Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga di Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Presentase Listri PLN Non PLN terhadap jumlah RT	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	22.39	30	2
	b.Wilayah Jasa	41.01	54	3
2.	Wilayah Pembanding	75.13	100	5

Sumber : *BPS, Kecamatan Dalam Angka, 2003 dan Inhil Dalam Angka,2008*

Dengan membandingkan nilai indikator pelayanan jasa peneranagn di wilayah analisis dengan nilai indikator tersebut di wilayah pembanding, amak terlihat bahwa nilai indikator layanan jasa penerangan ini di wilayah talon pemekaran hanya 30 % dari tingkat layanan jasa penerangan wilayah pembanding, sedangkan di wilayah sisa pemekaran nilai rasionya mencapai 54 %. Berdasarkan nilai rasio perbandingan tingkat layanan jasa penerangan di wilayah analisis dengan wilayah pembanding tersebut, maka skor untuk potensi layanan jasa penerangan ini di wilayah calon pemekaran maupun di wilayah sisa pemekaran

masing-masing memiliki nilai skor 2 (dua), clan wilayah sisa pemekaran memiliki skor 3 (tiga).

4.7.3.4.11 Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Indikator rasio panjang jalan tehadap kendaraan bermotor mengidentifikasikan potensi pelayanan prasaran jalan bagi masyarakat, semakin tinggi nilai rasio ini maka potensi yang tersedia bagi pelayanan jasa jalan ini semakin bagus atau denagn kata lain ketersediaan jalan yang ada semakin memadai, mengenai ketersediaan panjang jaian di wilayah pemekaran Indragiri Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.120
Skor indikator Rasio panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Panjang Jalan Terhadap Kendaraan Bermotor	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.01599	18	2
	b.Wilayah Sisa	0.09189	160	5
2.	Wilayah Pembanding	0.08600	100	5

Sumber : *BPS, Kecamatan Dalam Angka, 2006 dan Inhil Dalam Angka,2008*

Mengingat ketersediaan jalan per unit kendaraan bermotor di wilayah calon pemekaran lebih rendah di bandingkan ketersediaan jalan per unit kendaraan di wilayah sisa pemekaran, maka skor dari indikator rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor di wilayah calon pemekaran memilki skor 2 (dua) demikian pula ketersediaan jalan per unit kendaraan di wilayah sisa pemekaran lebih tinggi di bandingkan di wilayah pembanding yang di tunjukkan oleh rasio perbandingan sebesar 106 %, sehingga nilai skor pada indikator ini di wilaayh sisa pemekaran juga memilki nilai skor 5 (lima).

4.7.3.4.12 Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke atas

Indiaktor persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA keatas terhadap penduduk usia 18 tahun keatas, merupakan indikator potensi sumber daya manusia yang terdapat di wilayah analisis. Berdasarkan nilai variable dari indikator ini di peroleh gambaran bahwa persentase tenaga kerja yang berpendidikan SLTA ke atas terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan sebanyak 13.41 sedangkan di wilayah sisa pemekaran terdapat 17.07 dan wilayah pembanding terdapat 18.00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4. 121
Skor Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Persentase Pekerja Berpendidikan Minimum SLTA Terhadap Usia 18 Tahun ke Atas	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	13.41	74	4
	b.Wilayah	17.07	94	5
2.	Wilayah Pembanding	18.00	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka, 2006 Susena 2008*

Ratio perbandingan nilai variable dari indikator persentase pekerja yang minimal berpendidikan SLTA terhadap penduduk yang berusia 18 tahun ke atas di wilayah calon pemekaran di bandingkan dengan di wilaayh pembanding menunjukkan nilai rasio sebesar 74 dengan nilai skor 4 (empat), sedangkan nilai rasio variabel tersebut di wilayah sisa pemekaran dengan di wilayah pembanding memilki nilai rasio sebesar 94 % dengan demikian skor 5 (lima).

4.7.3.4.13 Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SI terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke atas

Indikator persentase pekerja yang berpendidikan minimal SI terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas juga merupakan indikator kinerja yang menggambarkan potensi sumber daya

manusia yang tersedia di wilayah yang di analisis. Di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan, persentase pekerja berpendidikan minimal SI terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas sebanyak 4.22 sementara di wilayah pembanding persentase tenaga kerja tersebut terdapat sebanyak 16.00 Gambaran tersebut menjelaskan bahwa potensi sumber daya manusia yang tersedia di wilayah calon pemekaran jauh lebih rendah di bandingkan dengan wilayah pembanding.

Tabel 4.122
Skor Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SI Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas di wilayah Calon Kabupaten Indragirl Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Persentase Pekerja Berpendidikan Minimum S1 Terhadap Usia 25 Tahun ke Atas	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	4.22	26	2
	b.Wilayah Sisa	13.22	82	5
2.	Wilayah Pembanding	16.00	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka, 2006 Susena 2008*

Nilai rasio perbandingan nilai variabel clan indikator pekerja berpendidikan minimal SI terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah calon pemekaran dengan wilayah pembanding memiliki nilai rasio sebesar 26% dengan demikian indikator ini di wilayah calon pemekaran memiliki nilal skor 2 (dua), sedangkan di wilayah sisa pemekaran, nilai rasio variabel tersebut terhadap nilai variabel wilayah pembanding rasionya

mencapai 82% yang berarti skor indikator persentase pekerjaan berpendidikan minimal S1 terhadap usia 25 tahun ke atas di wilayah sisa pemekaran memiliki nilai skor 5 (lima).

4.7.3.4.14 Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap 10.000 Penduduk

Selain indikator persentase pekerja menurut tingkat pendidikan SLTA dan S1, maka nilai variabel indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk juga mengindikasikan ketersediaan sumber daya manusia di wilayah analisis. Wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan yang memiliki jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 1.428 jiwa, memiliki rasio pegawai negeri per 10.000 penduduk sebesar 67.82% yang berarti setiap 1.000 penduduk terdapat pegawai negeri sipil sebanyak 6.7 jiwa, lebih jelasnya dapat ditihat tabel berikut :

Tabel 4.123
Skor Indikator Rasio Pegawal Negeri Sipil Terhadap Penduduk di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	67.82	76	4
	b.Wilayah Sisa	110.58	124	5
2.	Wilayah Pembanding	89.15	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka, 2008 Susena 2008*

Berdasarkan hasil perbandingan nilai variabel indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk di wilayah

calon pemekaran terhadap wilayah pembanding, maka di dapattkan nilai rasio sebesar 76% yang berarti indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk di wilayah calon pemekaran memiliki nilai skor 4 (empat). Sedangkan di wilayah sisa pemekaran memiliki nilai rasio sebesar 124% yang berarti potensi ketersediaan pegawai negeri sipil di wilayah induk ini Iebih tinggi di bandingkan ketersediaan pegawai negeri sipil di wilayah pembanding, karena itu nilai skor indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk di wilayah sisa pemekaran memiliki skor 5 (lima).

4.7.3.5 Kemampuan Keuangan

4.7.3.5.1 Jumlah PDS

Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah baru karena berkaitan dengan kemampuan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh kerena itu indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi PDS di suatu wilayah maka semakin balk aspek kemandirian daerah daalm membiayai pembangunan. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk kabupaten Indargiri Selatan memiliki nilai variabel yaltu 45 dengan rasio sebesar 18% Artinya daerah ini tergolong tidak mampu, tetapi bila Indragiri Selatan telah menjadi daerah otonom baru maka PDS akan meningkat karena SDA yang ada belum di kelola secara optimal seperti adanya cadangan minyak bumi, dan adanya Batubara yang belum terkelola dengan balk. Sementara itu PDS di kabupaten pembanding pada daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 305,06,

wilayah sisa setelah pemekaran 110.48 dan Kabupaten Indragiri Selatan setelah pernekaran 308.45.

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks PDS yaitu mempunyai skor 5 (lima).atau di katakan sebagai katagori sangat tidak mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 101%.

Tabel 4.124
Nilai Variabel Jumlah dan Rasionya serta Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Jumlah PDS	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	308.45	101	5
	b.Wilayah Sisa	210.48	68	4
2.	Wilayah Pembanding	305.06	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Kesimpulan dari Indikator Jumlah PDS di Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan, memiliki skor 5 (lima) sedangkan Wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah Pemekaran), memiliki skor 4 (empat)

4.7.3.5.2 Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio Pendapatan Daerah sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah

baru karena berkaitan denagn kemampuan mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi rasio PDS terhadap jumlah penduduk di suatu wiayah maka semakin baik aspek keuangan daerah dalam membangun kesjahteraan rakyat. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kabupaten Indragiri Selatan memiliki nilai variabel yaitu 128.108.122.234 degan rasio sebesar 608.45% artinya daerah ini tergolong sangat mampu untuk Iebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.125
Nilai Variabel PDS Tehadap Jumlah dan Rasionya serta Nilai Skor di wilayah Capon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	608.45	156	5
	b.Wilayah Sisa	411.73	105	5
2.	Wilayah Pembanding	389.33	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Analisis di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks rasio PDS terhadap jumlah penduduk yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai katagori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Sedangkan diwilayah sisa setelah pemekaran memiliki skor 5 (lima), artinya setelah adanya pembentukan otonom baru tidak mempengaruhi terhadap pembangunan yang ada di Indragiri Hilir sebelum dilakukannya pemekaran.

4.7.3.5.3 Rasio PDS terhadap PDRB

Rasio Pendapatan daerah sendiri (PDS) terhaadp PDRB sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah baru karena berkaitan dengan kemampuan pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh sebab itu indikator yang di pergunakan yaku semakin tinggi Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS).

Terhadap PDRB di suatu wilayah maka semakin balk aspek pertumbuhan perekonomian daerah. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kabupaten Indragiri Selatan memiliki nilal variabel yaitu 1491.791 dengan rasio sebesar 0.01% artinya daerah ini tergolong tidak mampu, tetapi bila Indragiri Hilir telah menjadi daearh otonom baru maka rasio PDS akan meningkat karena SDA yang ada belum di kelola secara optimal.

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks rasio Pendapatan Daerah sendiri (PDS) terhadap PDSB yaitu mempunyai skor 3 atau dikatakan sebagai kurang mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40 % nilai rata-rata. Nilai indikator 3 (tiga) memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan pads dasamya layak di rekomendasikan menjadi Daerah otonom bans (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap PDRB, dan kabupaten Indragiri Selatan harus selalu berusaha dalam meningkatkan rasio PDS-nya. Skor pada wilayah sisa pemekaran mendapatkan nilai sebesar 187% atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti

bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 187% maka nilai rata-rata. Nilai indikator 5 (lima).

Tabel 4.126
Nilai Variabel PDS Terhadap PDRB dan Rasionya serta Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasio PDS Terhadap PDRB	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.11	45	4
	b.Wilayah Sisa	0.45	187	5
2.	Wilayah Pembanding	0.24	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.6 Sosial Budaya

4.7.3.6.1 Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk

Aspek rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk PP No. 78 Tahun 2007 ikut menentukan ketayakan pemekaran daerah baru karena berkaitan dengan penyediaan sarana peribadatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat di Kabupaten Indragiri Selatan merupakan masyarakat yang sangat taat beribadah. Untuk Iebih jelasnya lihat tbel berikut ini :

Tabel 4.127
Nilai Variabel Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk serta Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	29.01	96	5
	b.Wilayah Sisa	26.16	86	5
2.	Wilayah Pembanding	30.20	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks rasia sarana peribadatan yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata. Nilai indikator skor 5 (lima) memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan layak direkomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru).

4.7.3.6.2 Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk

Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran daearah bare karena berkaitan dengan penciptaan masyarakat yang sehat jasmani. Masyarakat di Kabupaten Indragiri Selatan merupakan masyarakat yang balk dalam

aspek olah raga. Oleh sebab itu indikator yang di gunakan yaitu semakin tinggi fasilitas lapangan olah raga tersedia (per 10.000 penduduk) di suatu wilayah maka semakin balk aspek jasmani daerah tersebut.

Dan hasil perhitungan memberikan penilaian bahwa skor nilai di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks fasilitas olah raga yaitu mempunyai skor 5 (lima), atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan jumlah nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom bare. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator Iebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilai indikator 5 (lima) memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten) tanpa merugikan kabupaten induk karena di pandang dari sudut fasilitas lapangan olah raga, kabupaten induk maupun kabupaten yang di mekarkan sama-sama dapat mengakomodasi masyarakat yang akan melakukan kegiatan olah raga. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.128
Nilal Variabel Rasio
Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk serta
Nilai Skor di Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	10.49	287	5
	b.Wilayah Sisa	3.79	103	5
2.	Wilayah Pembanding	3.65	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.6.3 Jumlah Balai Pertemuan

Jumlah balai pertemuan sesuai PP No. 78 tahun 2009 ikut menentukan kelayakan pemekaran daerah baru karena berkaitan dengan penyediaan sarana rapat dan pertemuan dalam rangka musyawarah untuk mufakat pada suatu agenda rapat tertentu. Masyarakat di Kabupaten Indragiri Selatan merupakan masyarakat yang tergolong tinggi tingkat permusyawaratannya. Oleh sebab itu indikator yang di gunakan yaitu semakin tinggi rasio sarana balai pertemuan di suatu wilayah maka semakin balk aspek permusyawaratan daerah tersebut. Rasio fasilitas balai pertemuan per 10.000 penduduk sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran daearah baru karena berkaitan dengan kondisi demokrasi yang ada ditengah masyarakat itu sendiri.

Masyarakat di Kabupaten Indragiri Sefatan merupakan masyarakat yang bijak dalam menyelesaikan problematika yang ada. Oleh sebab itu indiaktor yang di gunakan yaitu semakin banyak fasilitas balai pertemuan tersedia (per 10.000 penduduk) di suatu wilayah maka semakin tinggi pelaksanaan musyawarah di daerah tersebut.

Dari hasil perhitungan memberikan penilaian bahwa skor nilai di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks balai pertemuan yaitu mempunyai skor 3 (tiga), atau di katakan sebagai kategori mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan jumlah nilai rata-rata. Nilai indikator 40% memiliki makna bahwa kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu.Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.129
Nilai Variabel Balai pertemuan Serta Rasionalnya dan Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Jumlah Balai Pertemuan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	74	49	3
	b.Wilayah Sisa	138	92	5
2.	Wilayah Pembanding	150	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.7 Sosial politik

4.7.3.7.1 Rasio Penduduk yang ikut Pemilu Legislatif yang mempunyai Hak Pilih

Aspek rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan pertisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Kabupaten Indragiri Selatan merupakan kabupaten yang tingkat partisipasi politik dalam Pemilu tergolong cukup tinggi dan hal itu sangat balk dalam penciptaan demokrasi lokal. Indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi partisipasi politik di suatu wilayah maka semakin balk aspek demokrasi lokal daerah tersebut.

Berdasarkan analisa di atas maka skor yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih yaitu mempunyai skor 3 (tiga) atau dikatakan sebagai kategori mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% nilai rata- rata. Nilai indikator 40% memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaeten baru) jika di pandang dari sudut rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilal sebesar nilai skor 4 (empat) atau di katakan sebagai kategori mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 78%. nilai rata-rata. Nilai indikator 78% memiliki makna bahwa kebupaten Indragiri.

Hilir Iayak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa mengganggu demokrasi lokal kabupaten induk.

Tabel 4.130
Nilai Variabel rasio Penduduk yang ikut Pemilu dari Jumlah penduduk yang mempunyai Hak Pilih serta Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasional Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.38	45	3
	b.Wilayah Sisa	0.66	78	4
2.	Wilayah Pembanding	0.84	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.7.2 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Aspek jumlah organisasi kemasyarakatan sesuai PP No.78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan penguatan pilar-pilar demokrasi lokal. Organisasi kemasyarakatan merupakan sosial kontrol dan juga kekuatan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Indragiri Selatan merupakan kabupaten yang tingkat partisipasi masyarakat pembangunan cukup tinggi dan hat itu sangat balk dalam percepatan pembangunan daerah. Indikator yang di gunakan yaitu semakin tinggi jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam aspek politik, ekonomi,

sosial dan pembangunan daerah tersebut. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kabupaten Indragiri Selatan memiliki nilai jumlah organisasi kemasyarakatan sebanyak 537 dengan rasio sebesar 25.505.

Berdasarkan analisa di atas skor nilai yang di berikan terhadap kabupeten Indragiri Selatan dalam konteks jumlah organisasi kemasyarakatan yaitu mempunyai skor I (satu) atau di katakan sebagai tidak mampu. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.131
Nilai Variabel rasio Organisasi Kemasyarakatan
Serta Nilal Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	537	19	1
	b.Wilayah Sisa	2481	90	5
2.	Wilayah Pembanding	2756	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.8 Luas daerah

4.7.3.8.1 Luas Wilayah Keseluruhan

Luas wilayah sangat berperan dalamm menentukan kelayakan dalam daerah otonom baru kerena berkaitan dengan penataan ruang dan penggunaan lahan untuk berbagai

kepentingan. Di dalam suatu tata ruang wilayah setidaknya terdapat pola dan ruang dan struktur ruang yang keseluruhan di akomodasi oleh lahan di suatu kabupaten. Oleh sebab itu dengan menggunakan indikator luas wilayah keseluruhan maka Kabupaten Indragiri Selatan memiliki nilai luas yaitu 3.225,09 km. Jika di bandingkan dengan luas wilayah pembanding sekitar 8.424,93 km maka Kabupaten Indragiri Selatan sangat layak dimekarkan untuk menjadi daerah otonom baru untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 4.132
Nilal Rasio Variabel Luas Wilayah Serta Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Luas Wilayah Keseluruhan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	3.225	38	2
	b.Wilayah Sisa	7.383	87	5
2.	Wilayah Pembanding	8.424	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Dari tabel di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks luas wilayah keseluruhan yaitu mempunyai skor 2 (dua) atau kategori kurang mampu, namun demikian dari perspektif penataan ruang, semua kepentingan ruang akan terakomodasi dengan luas wilayah 3.225,09 km. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu.

4.7.3.8.2 Luas Wilayah Efektif yang dapat di Manfaatkan

Luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan berperan menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan peruntukan lahan untuk kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan clan pertahanan keamanan. Ruang wilayah yang dapat di manfaatkan harus mengakomodasikan ruang terbuka hijau, kawasan resapan dan ruang publik. Oleh sebab itu luas wiiayah efektif yang dapat di manfaatkan maka Kabupaten Indragiri Selatan memiliki nilai variable yaitu 1.263 km, sedangkan wiiayah sisa setelah pemekaran yaitu seluas 7.383 km, Data tersebut memberikan informasi bahwa di tinjau dari luas wilayah maka Kabupaten Indragiri Selatan sangat memungkinkan untuk di mekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu dengan memekarkan Kabupaten Indragiri Selatan.

Bila menggunakan analisa di atas maka sekor nitai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks luas wilayah yang dapat di manfaatkan yaitu mempunyai skor 1 atau kategori kurang mampu untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 4.133
Nilai Rasio Variabel Luas Wilayah yang dapat dimanfaatkan Serta Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	3.225	19	1
	b.Wilayah Sisa	7.383	112	5
2.	Wilayah Pembanding	8.424	100	5

***Sumber :** Data Olahan, 2009*

4.7.3.9 Pertahanan

4,7.3.9.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Luas Wilayah

Aspek pertahanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan dengan Iingkungan strategi dan juga integritas bangsa. Kabupaten Indragiri Selatan merupakan kabupaten yang berada di sepanjang Selat Malaka dan berbatasan dengan Negara tetangga. Indikator yang dipergunakan yaitu semakin tinggi rasio jumlah aparat pertahanan di suatu wilayah maka semakin balk aspek pertahanan daerah tersebut, apalagi bagi daerah di kawasan perbatasan laut dengan Negara tetangga. Berkaitan dengan indicator pertahanan maka Kabupaten Indragiri Selatan memiliki nilai variable yaitu 160 dengan rasio sebesar 0.000496. Sementara itu rasio jumlah personil aparat pertahanan di kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 0,000160 Wilayah sisa setelah pemekaran sekitar 0,000171.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai katagori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa niali indikator lebih besar atau sama dengan 80.% nilai rata-rata. Sedangkan skor di wilayah sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau dikatakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan Selain layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa merugikan

kabupaten induk karena di pandang dari sudut jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.134
Nilai Rasio Variabel Jumlah Personil Aparat Pertahanan Serta Nilal Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Luas Wilayah	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.000496	310	1
	b.Wilayah Sisa	0.000171	107	5
2.	Wilayah Pembanding	0.000160	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.9.2 Karateristik wilayah di lihat dari sudut pandang pertahanan

Karakteristik wilayah di lihat dari sudut pandang pertahanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan dengan strategi pertahanan. Karena Kabupaten Indragiri Selatan merupakan kabupaten yang tidak ada berbatasan dengan Negara tetangga sehingga Penanganan wilayah ini tidak akan sangat berbeda dengan wilayah lainnya. Dilihat dari indikator karakteristik wilayah dad sudut pandang pertahanan, maka untuk kabupatenn Indragiri Hilir memiliki potensi yang Iebih strategis.

Dari analisis maka skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks karakteristik wilayah

di lihat clan suclut pandang pertahanan, yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai katagori sangat mampu untuk Iebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 4.135
Nilai Rasio Variabel Karakteristik wilayah di Iihat dari sudut pandang pertahanan Serta Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragirl Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Karakteristik Wilayah dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	Utara berbatasan dengan propinsi lain		5
	b.Wilayah Sisa	Kepulauan,Laut dan Darat, tidak berbatasan dengan Negara lain	-	5
2.	Wilayah Pembanding	Daratan tidak berbatasan dengan Negara lain	-	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.10 Keamanan

4.7.3.10.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk

Keamanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan dengan kenyamanan tinggal, kriminalitas rendah dan keamanan berinvestasi. Semakin tinggi rasio jumlah aparat keamanan maka semakin baik keamanan daerah yang

hendak dimekarkan. Untuk kabupaaten Indragiri Hilir memiliki nilai variable yaitu 170 dengan rasio sebesar 8.07.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks keamanan yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 %. Nilai indikator 80 % memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan dengan kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai nilai indikator Iebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80 % memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa merugikan kabupaten induk karena di pandang mempunyai keamanan yang tinggi.

Tabel 4.136
Nilai rasio Variabel Jumlah personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk Dan Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.000807	114	5
	b.Wilayah Sisa	0.000733	104	5
2.	Wilayah Pembanding	0.000703	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.11 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

4.7.3.11.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di turunkan dari variable tingkat pendidikan, kesehatan clan pendapatan adalah merupakan variable kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM maka semakin baik tingkat kesejahteraan lebih tinggi yaitu dengan nilai variable rata-rata 71.87. Artinya bahwa indeks Pembangunan Manusia di wilayah Indragiri Selatan jauh lebih baik di atas rata-rata.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai Indikator 80 memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut Indeks Pembanguan Manusia. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 4.137
Nilai Rasio Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel: Indeks Pembangunan Manusia	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	71.87	106	5
	b.Wilayah Sisa	67.29	99	5
2.	Wilayah Pembanding	67.58	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.12 Rentang Kendali

4.7.3.12.1 Rata-rata Jarak Kabupaten/Kota atau Kecamatan ke Pusat Pemerintah (Ibukota Provinsi atau Ibukota Kabupaten/Kota)

Rentang kendali pemerintah di daerah sangat di tentukan oleh jarak dari pusat pemerintah (ibu kota) kepada wilayah sekitar yang di layani. Semakin dekat jarak pelayanan maka akan semakin baik rentang kendalinya, sebaiknya semakin jauh jarak pelayanan maka akan semakin lamban pelayanan. Dalam konteks kelayakan pemekaran bila mana jarak dari pusat ibu kota ke kawasan yang akan di mekarkan, semakin jauh akan semakin layak di mekarkan. Kabupaten Indragiri Selatan memiliki jarak yang relative jauh dari ibu kota Kabupaten Indragiri Selatan yaitu dengan nilai variabel 330 km dengan rasio jarak rata-rata 55 km/jam atau 1.1 jam, Sementara itu nilai kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil jarak ke pusat

pemerintah rata-rata mempunyal nilai pelayanan sekitar 50 km.

Berdasarkan variabel di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kabupaten Indragiri Selatan dalam konteks indikator variabel jarak pelayanan pemerintah yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rat-rata. Nilai indikator 80 % memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru). Dengan adanya Kabupaten lndragiri Selatan maka jarak ke pusat pemerintahan di kawasan Inhil setelah di mekarkan nilal ratarata menjadi 55 km dengan jarak tempuh sekitar 1.1 jam, sedangkan di wilayah sisa setelah pemekaran memilik nilai yang sama yaitu dengan skor 5 (lima), artinya setelah Indragiri Selatan resmi menjadi kabupaten tidak mempengaruhi wilayah sebelum pemekaran.

Tabel 4.138
Nilal Variabel Jarak Rata-rata Kecamatan Ke Pusat Pemerintah dan Rasionya serta Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota Kabupaten/ Kota)	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	55.00	110	5
	b.Wilayah Sisa	55.66	111	5
2.	Wilayah Pembanding	50.00	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

4.7.3.12.2 Rata-rata Waktu Perjalanan dari KabupatenlKota atau Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Provinsi) atau Kabupaten /Kota)

Rata-rata waktu perjalanan dari ibu kota Kabupaten Indragiri Selatan akan sangat menentukan efesiensi pelayanan pemerintah bagi wilayah sekitar yang akan di layani. Semakin pendek waktu perjalanan maka akan semakin efesiensi clan efektivitas pelayanan pemerintahan, sebaiknya semakin lama waktu di tempuh untuk mendapat pelayanan maka akan semakin tidak efesien pelayanan tersebut. Dalam konteks kelayakan pemekaran semakin panjang (lama) maka akan semakin layak daerah tersebut di mekarkan. Untuk Kabupaten Indragiri Selatan yaitu dengan nilai variabel rata-rata 1.1 jam.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Indragiri Hilir dalam konteks indikator variabel waktu perjalanan ke pusat pemerintah yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katagori sangat mampu. Hal ini berarti nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilal indikator 80 % memiliki makna bahwa Kabupaten lndragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru). Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilai indikator 80 memiliki makna bahwa Kabupaten Indragiri Selatan layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten

baru) tanpa membuat kabupaten induk (kab. Inhil) terganggu dengan adanya pemekaran.

Tabel 4.139
Nilal Variabel Rata-rata Waktu Perjalanan Dari Kecamatan Kepusat pemerintah Nilai Skor di wilayah Calon Kabupaten lndragiri Selatan

No	Wilayah	Nilai Variabel : Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Analisis Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	1.11	100	5
	b.Wilayah Sisa	1.84	165	5
2.	Wilayah Pembanding	1.11	100	5

Sumber : *Data Olahan, 2009*

Untuk lebih memperjelas dasar kebutuhan dari pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan, analisis terhadap faktor utama sebagaimana di sajikan pada tabel 4.140 berikut merupakan ringkasan dari 35 indikator sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka akan tergambar informasi yang berguna bagi calon pemimpin daerah ini tentang aspek-aspek apa saja yang harus di tingkatkan kerena secara relatif masih tertinggal dari rata-rata kemampuan kabupaten lain di Provinsi Riau.

Tabel 4.140

Total nilai Indikator Calon Kabupaten Indragiri Selatan

No	Indikator	Skor Maksimal	Indragiri Selatan	
			Skor	Pencapaian (% dari skor Maksimal)
1.	Kependudukan	100	85	85.0
2.	Kemampuan Ekonomi	75	75	100.0
3.	Potensi Daerah Kemampuan	75	65	87.3
4.	Keuangan Sosial Budaya	75	70	93.3
5.	Sosial politik	25	23	92.0
6.	Luas Daerah	25	11	44.0
7.	Pertahanan	25	9	36.0
8.	Keamanan	25	25	100.0
9.	Tingkat Kesejahteraan	25	25	100.0
10.	Masyarakat	25	25	100.0
11.	Rentang Kendali	25	25	100.0
Total		**500**	**428**	**83.9**

Dari tabel di atas terlihat bahwa kemampuan ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya dan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali merupakan aspek yang dominan sebagai dasar pembentukan Indragiri Selatan Letak geografis daerah ini berbatasan langsung dengan propinsi tetangga juga merupakan daerah kelautan membutuhkan tata administrasi yang Iebih balk untuk dapat Iebih balk untuk dapat Iebih efektif dalam mengambil keuntungan dari posisi strategis ini.

4.8 Gambaran Umum Wilayah Calon Kota Indragiri

Secara administratif rencana wilayah Kota Indragiri setelah pemekaran terdiri dari 6 kecamatan, masing-masing kecamatan yang direncanakan tergabung dengan Kota Indragiri ialah Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Batang Tuaka, Kuala Indragiri dengan jumlah desaikelurahan 44 dengan jumlah penduduk sekitar 206.099 Penduduk di kawasan ini mayoritas didominasi oleh 4 suku utama yaitu, suku Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa, selain itu terdapat juga suku-suku lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, calon Kota Indragiri Pasca Pemekaran terletak disebelah utara Kota Tembilahan dengan luas wilayah 2.995,55 km2.

Calon Kota Indragiri ini memiliki beberapa sungai yaitu, Sungai Batang Tuaka terdapat di Kecamatan Tembilahan, Batang Tuaka dan Sungai Indragiri di Kecamatan Tempuling, Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kuala Indragiri dan Kempas. Sumberdaya alam yang dimiliki mineral dan bahan galian di daerah ini relative sedikit, namun demikian potensi pertanian cukup besar terutama tanaman yang dapat tumbuh subur dilahan gambut, seperti tanaman pangan dan hortikultura, kelapa dalam maupun kelapa hibrida, kelapa sawit, pinang, dan sebagainya.

4.9 Deskripsi dan Analisis Hasil Kajian

Bagian ini memaparkan berbagai data, hasil kajian, dan analisis atas hasil kajian mengenai (tingkat) kelayakan pembentukan Kota Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir

rencananya akan dimekarkan menjadi 3 (tiga) daerah otonom yaltu, Indragiri Hilir Pascapemekaran (INHIL), Indragiri Selatan (INSEL), dan Kota Indragiri, sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh PP No. 78 Tahun 2007 berupa (1) Kependudukan, (2) Kemampuan Ekonomi,(3) Sosial Potensi Daerah,(4) Kemampuan Keuangan, (5) Sosial Budaya, (6) Sosial Politik, (7) Was Daerah, (8) Pertahanan, (9) Keamanan, (10) Tingkat Kesejahteraan masyarakat, (11) Rentang Kendali, dan (12) Pertimbangan Lain.

Semua ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kemampuan Calon pembentukan daerah otonom yang baru hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir, dan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pasca-pemekaran. Penilaian atas tingkat kemampuan ini sejalan dengan maksud dan tujuan otonomisasi daerah-daerah di Indonesia, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan PP.78 Tahun 2007).

4.9.1 Kriteria Jumlah Penduduk

Kriteria jumlah penduduk pada kajian ini hanya melihat dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk per kecamatan di wilayah calon Kota Indragiri pasca pemekaran adalah sebanyak 206.099 jiwa penduduk dengan kepadatan 68 (jiwalkm2). Untuk lebih jelas sebagaimana dapat di lihat pada tabel 4.141 berikut:

Tabel 4.141
Luas Wilayah dan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Calon Kota Indragirl Pasca Pemekaran

Kecamatan	Jml Desa	Luas Wilayah (km)	Rumah tangga	Penduduk 2008 (jiwa)			Kepa datan Pen duduk (jiwa/ km²)
				LK	PR	Jml	
1. Tembilahan	8	511,63	4.855	11.903	9.647	21.550	42
2. Tbh Hulu	6	197,37	15.347	36.386	28.938	65.324	331
3. Tempuling	7	691,19	7.097	14.403	13.741	28.144	41
4. Kempas	11	1.050,25	5.389	12.089	13.051	25.140	24
5. Bt. Tuaka	4	180,62	8.649	18.200	18.785	36.985	205
6. Kuindra	8	364,49	7.293	12.214	16.742	28.956	79
Total	**44**	**2.995,55**	**48.63**	**105.19**	**100.90**	**206.09**	**68**

Sumber : *Data Olahan,Tahun 2009*

Pada tabel di atas terlihat bahwa penduduk di wilayah calon Kota Indragiri Pascapemekaran yang terbanyak ada di kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di kecamatan Tembilahan. Pada tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat bahwa daerah yang paling padat penduduknya adalah di kecamatan di Tembilahan Hulu ini disebabkan oleh luas wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu yang relatif kecil, jumlah kepadatan penduduk terkecil seperti terlihat pada tabel 4.141 adalah di kecamatan Tempuling, ini juga disebabkan oleh faktor wilayah Kecamatan Tempuling yang begitu luas.

4.9.2 Kemampuan Ekonomi

4.9.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/ daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas adanya sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang. Secara umum Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung berdasarkan 2 (dua) pendekatan yaitu Produk Domestik Regional Brotu (PDRB) berdasarkan Atas Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Brotu (PDRB) berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan, dalam kajian ini PDRB dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan dari indikator-indikator dalam menghitung PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yakni, Pertama, pertanian, petemakan, perikanan, Hutbun, kedua, pertambangan dan penggalian, ketiga, industri, pengolahan, keempat, listrik dan air bersih, kelima, bangunan, keenam, perdagangan, hotel, ketujuh, perhubungan dan komunikasi, kedelapan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta kesembilan, jasajasa maka PDRB Kota Indragiri Pasca Pemekaran pada Tahun 2008 berdasarkan atas harga berlaku adalah 2.929.614 rata-rata pertumbuhan 29.29% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.142 berikut ini:

Tabel. 4.142
PDRB Kota Indragiri Atas Dasa Harga Bertaku Tahun 2005-2008 (dalam juta rupiah)

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Pertumbuhan 2005-2008 (%)
1. Tembilahan	461.344	481.991	522.513	544.131	80.399
2. Tbh Hulu	463.217	489.511	515.735	552.514	80.839
3. Tempuling	378.713	382.118	426.380	552.554	69.590
4. Kempas	499.958	515.341	574.441	618.103	88.313
5. Bt. Tuaka	256.664	267.453	288.495	290.206	44.112
6. Kuindra	279.811	294.214	364.541	372.106	52.426
Total	**2.339.707**	**2.430.628**	**2.692.105**	**2.929.614**	**415.682**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

Tabel. 4.143
PDRB Non Migas Perkapita Calon Kota Indragiri

Kecamatan	Jumlah Penduduk	PDRB Tahun 2008	PDRB Per Kapita
1. Tembilahan	21.550	544.131	25.249
2. Tbh Hulu	65.324	552.514	8.458
3. Tempuling	28.144	552.554	19.633
4. Kempas	25.140	618.103	24.586
5. Bt. Tuaka	36.985	290.206	7.846
6. Kuindra	28.956	372.106	12.850
Total	**206.099**	**2.929.614**	**14.214**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.9.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan produksi rill

barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi di Kota Indragiri, dan Calon Kota Indragiri, proses pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh kombinasi yang kompleks dari faktor-faktor ekonomi, Sosial (termasuk pendidikan dan keterampilan) demografi, geografi, politik kebijakan ekonomi dan faktor tainnya, laju pertumbumbuhan ekonomi calon wilayah Kota Indragiri berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan Tahun 2005-2008, yang mana dihitung dengan menggunakan indikator yang sama. Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor dari tahun ke tahun dengan menghilangkan inflasi pada tahun yang bersangkutan, maka PDRB Kota Indragiri Atas Dasar Harga Konstan (riil) pada tahun 2008 adatah 1.571.613 dengan rata-rata laju pertumbuhan i246,207%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.144 berikut ini :

Tabel 4.144
PDRB Kota Indragiri berdasarkan
Harga Kostan Tahun 2005-2008

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Pertumbuhan 2005-2008 (%)
1. Tembilahan	254.005	268.222	275.423	280.151	43.112
2. Tbh Hulu	220.124	223.451	230.087	240.346	36.560
3. Tempuling	190.361	200.009	160.770	190.680	29.672
4. Kempas	291.446	298.594	250.370	280.546	44.838
5. Bt. Tuaka	133.757	145.701	140.341	198.000	24.711
6. Kuindra	162.214	190.494	200.901	200.130	30.149
Total	**1.251.907**	**1.326.471**	**1.257.892**	**1.389.853**	**209.044**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

Tabel 4.145
Laju Pertumbuhan Ekonomi Calon Kota Indragiri

Kecamatan	2007	2008	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1. Tembilahan	268.222	275.423	11.111
2. Tbh Hulu	223.451	230.087	9.408
3. Tempuling	200.009	160.770	7.029
4. Kempas	298.594	250.370	10.618
5. Bt. Tuaka	145.701	140.341	6.766
6. Kuindra	190.494	200.901	4.010
Total	**1.257.892**	**1.389.853**	**52.954**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.9.2.3 Kontribusi PDRB Non Migas Terhadap PDRB Provinsi Riau

Penilaian atas subindikator ini bermanfaat untuk memperoleh gambaran mengenai calon Kota Indragiri ini dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, kemmpuan dalam membentuk penghasilan domestik di kawasan Riau sebagai basis kesejahteraan (khususnya kemakmuran ekonomi) masyarakat sebagai stu entitas otonom di Provinsi Riau. Kedua, daya dukung calon kabupaten sebagai daerah otonom baru dalam menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan kawasan.

Data terakhir menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kota Indragiri tanpa pemekaran berdasarkan harga kostan Non Migas Tahun 20052008 Pasca Pemerkeran adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel. 4.146
PDRB Kota Indragiri

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Pertumbuhan 2005-2008 (%)
1. Tembilahan	254.005	268.222	275.423	280.151	43.112
2. Tbh Hulu	220.124	223.451	230.087	240.346	36.560
3. Tempuling	190.361	200.009	160.770	190.680	29.672
4. Kempas	291.446	298.594	250.370	280.546	44.838
5. Bt. Tuaka	133.757	145.701	140.341	198.000	24.711
6. Kuindra	162.214	190.494	200.901	200.130	30.149
Total	**1.251.907**	**1.326.471**	**1.257.892**	**1.389.853**	**209.044**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

Tabel 4.147
Kontribusi PDRB Kota Indragiri
Terhadap PDRB Propinsi Riau

PDRB Kota Indragiri Tahun 2008	PDRB Propinsi Riau	Kontribusi PDRB
1.389,853.000	**119.034,983,66**	**11.67**

Sumber : *Data Olahan Tahun,2009*

4.9.3 Potensi Daerah

Potensi Daerah guna mendukung rencana pembentukan daerah otonom baru (Kota Indragiri) cukup memadai, ini terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut, seperti adanya lembaga keuangan, kelompok pertokoan, pasar, sekolah, pegawai pemerintah, kesehatan, panjang jalan, pekerja, dan rasio pegawai negeri sipil (PP No 78 tahun 2007).

4.9.3.1 Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk

4.9.3.1.1 Lembaga Keuangan

Bank merupakan salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting datam mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan bank di suatu daerah dapat mengindikasikan kemajuan ekonomi suatu wilayah. Data menunjukkan bahwa dari 6 kecamatan yang diwitayah Kota indragiri terdapat sesejumlah 10 Bank.

Kondisi sebaran bank di wilayah kecamatan dan rasionya terhadap 10.000 penduduk di wilayah caton Kota Indragiri dapat dilihat pada tabel 4.148 :

Tabel 4.148
Rasio Bank Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Bank	Rasio (X)
1. Tembilahan	21.550	9	4.176
2. Tbh Hulu	65.324	-	-
3. Tempuling	28.144	1	0.355
4. Kempas	25.140	-	-
5. Bt. Tuaka	36.985	-	-
6. Kuindra	28.956	-	-
Total	**206.099**	**10**	**0.485**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.9.3.1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank Per 10.000 Penduduk

Kenyataan bank dalam kenyataannya tidak dapat selalu diakses oleh pelaku ekonomi di daerah karena berbagai faktor. Oleh karena itu di daerah-daerah berkembang lembaga

keuangan lain di luar bank, yang disebut lembaga keuangan bukan bank. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha selain bank yang menjalankan fungsi dan kinerjanya seperti bank, yakni menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Badan usaha bukan bank diantaranya meliputi asuransi, pegadaian dan koperasi.

Dan data terakhir, terlihat bahwa lembaga bukan bank lebih terkosentrasi di daerah-daerah pedesaan (koperasi). Hal ini terlihat pada tabel 4.149.

Tabel 4.149

Rasio Bukan Bank Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Bukan Bank	Rasio (X)
7. Tembilahan	21.550	21	9.744
8. Tbh Hulu	65.324	12	1.836
9. Tempuling	28.144	14	4.974
10. Kempas	25.140	17	6.762
11. Bt. Tuaka	36.985	11	2.974
12. Kuindra	28.956	9	3.108
Total	**206.099**	**84**	**4.075**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.9.3.2 Fasibtas Perekonomian

Untuk mendukung proses perekonomian di daerah ini, terdapat fasilitas niaga seperti pasar, pertokoan, dan kios yang cukup memadai hingga proses transaksi niaga dapat berjalan dengan balk. Adapun fasilitas perdagangan yang ada diwilayah calon pemekaran Kota Indragiri pada tabel 4.150 berikut:

Tabel 4.150
Fasilitas Perekonomian
(Pertokoan dan Swalayan) Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pertokoan (unit)	Rasio (X)
1. Tembilahan	21.550	1.116	517.865
2. Tbh Hulu	65.324	940	143.898
3. Tempuling	28.144	386	137.151
4. Kempas	25.140	389	154.733
5. Bt. Tuaka	36.985	145	39.205
6. Kuindra	28.956	125	43.168
Total	**206.099**	**3.101**	**150.461**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

Tabel 4.151
Fasilitas Perekonomian(Pasar) Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pasar (unit)	Rasio (X)
1. Tembilahan	21.550	3	1.392
2. Tbh Hulu	65.324	4	0.612
3. Tempuling	28.144	5	1.776
4. Kempas	25.140	6	2.386
5. Bt. Tuaka	36.985	6	1.622
6. Kuindra	28.956	3	1.036
Total	**206.099**	**27**	**1.310**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.9.3.3 Pendidikan

Wilayah calon Kota Indragiri dengan jumlah penduduk 206.099 jiwa memiliki jumlah rakyatnya yang telah tercerahkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah menjadi skala

prioritas disamping pembangunan ekonomi sebagai contoh empirik misalnya bahwa Gubernur Riau periode 2009-2014 (H.M. Rush Zainal) merupakan putera yang berasal dari daerah ini, mayoritas penduduknya memanfaatkan fasititas pendidikan yang ada dari tingkat dasar hingga menengah dan bagi pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan menengahnya, mereka kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi diluar, dan saat ini Kota Indragiri memiliki Universitas dan Sekolah Tinggi, ini menandakan bahwa pendidikan perguruan tinggi sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Berikut keterangan jumlah sarana dan usia penduduk yang berusia sekolah.

Tabel 4.152
Fasilitas dan Usia Pendidikan

Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)		Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio (X)
SD	164	12.450	0.0131
SLTP	36	9.505	0.0036
SLTA/SMK	16	7.664	0.0020
Univ/Sekolah Tinggi	2	1.741	0.0011
Rasio Calon Kota Indragiri	**217**	**31.360**	**0.0069**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.3.4 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dimilik oleh calon Kota Indragiri ini meliputi Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling serta sejumlah tenaga medis, dokter, perawat dan bidan, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.153
Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Kesehatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Puskesmas Rawat Inap	37	206.099	1.795
Puskesmas Pembantu	35	206.099	1.698
Puskesmas Keliling	6	206.099	0.291
Rasio Calon Kota Indragiri	**77**	**206.099**	**3.736**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

Tabel 4.154
Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Kesehatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Dokter	18	206.099	0.873
Perawat	93	206.099	4.512
Bidan	65	206.099	3.153
Rasio Calon Kota Indragiri	**176**	**206.099**	**8.539**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009*

4.9.3.5 Persentase RT yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu, Perahu Motor atau Kapal

Dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2, 4 atau perahu motor, atau kapal dengan berbagai jenis, rata-rata memiliki roda 2 dan perahu, dengan asumsi bahwa sarana transportasi melalui jalur sungai dan taut sangat dominan dalam dinamika ekonomi mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.155
Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu, Perahu Motor atau Kapal

Fasilitas Kesehatan		Jumlah Rumah Tangga	Rasio (X)
Kendaraan Roda 4	725	48.630	1.4991
Kendaraan Roda 2	4.313	48.630	8.8690
Perahu	1.735	48.630	0.0365
Speed Boat dan sejenis	170	48.630	0.3515
Kapal Tongkang	22	48.630	0.0452
Rasio Calon Kota Indragiri	**5.348**	**48.630**	**10.997**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009, Data Diolah*

4.9.3.6 Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga

Salah satu kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat adalah ketersedian fasilitas listrik. Penggunaan listrik juga merupakan salah satu indikator dari tingkat kemajuan masyarakat disuatu daerah. Akses masyarakat terhadap listrik diwilayah calon Kota Indragiri Pascapemerkaran dapat dilihat pada tabel 4.156 berikut :

Tabel 4.156
Persentase Pelanggan Listrik (PLN/Non PLN) Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah R.Tangga Pelanggan Listrik (PLN/Non PLN)	Rasio (X)
1. Tembilahan	4.855	4.412	90.87
2. Tbh Hulu	15.347	14.847	96.74
3. Tempuling	7.097	5.907	83.23
4. Kempas	5.389	4.812	89.29
5. Bt. Tuaka	8.649	4.649	53.75
6. Kuindra	7.293	5.593	76.68
Total	**48.630**	**40.220**	**82.70**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009, Data Diolah*

Berdasarkan tabel di atas persentase pelanggan listrik untuk wilayah calon Kota Indragiri adalah 82.70 %. Pelanggan terbanyak untuk wilayah calon Kota Indragiri terpusat di Kecamatan Tembilahan.

4.9.3.7 Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Fasilitas panjang jalan terdapat diwilayah calon Kota Indragiri menurut statusnya terdiri dari jalan kabupaten, jalan kota adminitratif, jalan desa dan jalan desa tertinggal. Panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor di wilayah calon Kota Indragiri dapat dilihat pads tabel berikut ini :

Tabel 4.157
Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Kecamatan	Jumlah Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan Bermotor	Rasio (X)
1. Tembilahan	44.420	5.038	0.1134
2. Tbh Hulu	66.630	5.038	0.0756
3. Tempuling	96.712	5.038	0.0520
4. Kempas	70.232	5.038	0.0717
5. Bt. Tuaka	6.853	5.038	0.7351
6. Kuindra	4.472	5.038	1.1265
Total	**289.319**	**5.038**	**0.0174**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.3.8 Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun ke Atas

Di wilayah calon Kota Indragiri, jumlah pekerja yang berpendidikan minimal SLTA adalah sebanyak 57.781 orang.

Sedangkan jumlah penduduk usia 18 Tahun ke atas di wilayah calon Kota Indragiri adalah 91.703 orang. Persentase pekerja yang berpendidikan SLTA ke atas terhadap jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas di wilayah calon Kota Indragiri dapat dilihat tabel 4.158 berikut:

Tabel 4.158
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas

Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia >18 Tahun	Jumlah Pekerja Berpendidikan SLTA	Rasio (X)
1. Tembilahan	22.156	16.501	74.47
2. Tbh Hulu	18.811	14.157	75.25
3. Tempuling	17.070	11.200	65.61
4. Kempas	16.900	10.190	60.29
5. Bt. Tuaka	7.721	2.722	35.25
6. Kuindra	9.045	3.011	33.28
Total	**91.703**	**57.781**	**63.00**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009, Data Diolah*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah pekerja berpendidikan SLTA ke atas terhadap jumlah penduduk di atas usia 18 tahun, pada wilayah calon Kota Indragiri adalah sebesar 0.6300 %.

4.9.3.9 Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas

Di wilayah calon Kota Indragiri, jumlah pekerja yang berpendidikan minimal SI adalah sebanyak 48.990 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah

calon Kota Indragiri adalah 212.020 orang. Persentase pekerja yang berpendidikan SI ke atas terhadap jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah calon Kota Indragiri dapat dilihat pada tabel 4.159 berikut :

Tabel 4.159
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SI terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas

Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia >25 Tahun	Jumlah Pekerja Berpendidikan S1	Rasio (X)
1. Tembilahan	39.416	12.700	32.22
2. Tbh Hulu	47.803	15.901	33.26
3. Tempuling	48.971	10.480	21.40
4. Kempas	38.872	8.430	21.68
5. Bt. Tuaka	17.896	948	5.29
6. Kuindra	19.062	531	2.78
Total	**212.020**	**48.990**	**23.14**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir Dalam Angka,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.3.10 Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap Penduduk

Salah satu komponen penting dalam pelayanan Pemerintah Daerah adalah keberadaan pegawai negeri sipil. Asumsinya, semakin banyak pegawai negeri sipil maka semakin efektif pelaksanaan tugastugas Pemerintah Daerah khususnya pelayanan masyarakat. Dilihat dari sisi ini, jumlah pegawai negeri sipil yang ada di wilayah calon Kota Indragiri adalah sebanyak 1.510 sedangkan jumlah penduduk yang harus dilayani di wilayah calon Kota Indragiri adalah sebanyak 206.099 orang. Jumlah Pegawai negeri sipil dan jumlah penduduk beserta rasionya dapat dilihat pada tabel 4.160 berikut :

Tabel 4.160
Rasio Pegawal Negeri Sipil Terhadap Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah PNS Gol I/II/ III/IV	Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Dinas Pendidikan	1.132	206.099	54.9250
Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	137	206.099	6.6472
Penyuluh Pertanian	66	206.099	3.2023
Kesehatan	175	206.099	8.4910
Rasio Calon Kota Indragiri	**1.510**	**206.099**	**73.2657**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.4 Kemampuan Keuangan

Pembentukan Kota Indragiri pasti membawa konsekwensi berupa pelaksanaan otonomi dimasing-masing wilayah baru. Calon Kota Indragiri diharapkan memiliki kemampuan sendin yang memadai dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Dana inl pada dasarnya bersumber dari masyarakat setempat, yang banyak dipengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan calon Kota Indragiri menurut PP No. 78 Tahun 2007 ada 3 (tiga) indikator yaitu : Jumlah PDS, Rasio PDS terhadap jumlah penduduk, dan rasio PDS terhadap PDRB Non Migas.

4.9.4.1 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri

Jumlah Penerimaan Daerah sendiri adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil propinsi. Data terakhir penerimaan daerah sendiri calon Kota Indragiri dapat ditihat pada tabel 4.162 berikut :

Tabel 4.161
Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
Indragiri Hilir	798.508.112.910
Jumlah	**798.508.112.910**
Calon Kota Indragiri	299.250.017.565
Kabupaten Induk	**499.258.095.345**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.4.2 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk

Data terakhir menunjukkan, jumlah penerimaan daerah sendiri terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kota Indragin dapat diiihat pada tabel 4.163 berikut :

Tabel 4.162
Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri	Jumlah Penduduk	Rasio (X)
299.250.017.565	**206.099**	145.19

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.4.3 Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap PDRB Non Migas

Data terakhir menunjukkan, jumlah penerimaan daerah sendiri terhadap PDRB Non Migas di wilayah calon Kota Indragiri dapat dilihat pada tabel 4.164 berikut :

Tabe14.163

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri Terhadap PDRB Non Migas

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri	PDRB Non Migas Tahun 2008	Rasio (X)
299.250.017.565	**1.389.853.000**	215.310

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.5 Sosial Budaya

4.9.5.1 Fasilitas Peribadatan

Sarana ibadah yang ada di wilayah ini menunjukkan adanya spirit keberagaman yang tinggi dikalangan penduduk wilayah Kota Indragiri. Suatu yang sangat penting bagi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya harmonisasi hidup, sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi proses orientasi pembangunan melalui kebijakan pemerintah setempat yang dilandasi oleh nilai-nilai religius yang ada dimasyarakat yang berorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari jumlah sarana peribadatan yang ada di wilayah ini menunjukkan adanya pluralisme dan kemajemukan rakyatnya dalam memeluk suatu keyakinan agama. Sarana peribadatan yang tersedia terdiri dari musholla, masjid, gereja maupun vihara. Rasio tempat peribadatan per 10.000 penduduk di wilayah calon pemekaran Kota Indragiri adalah sebesar 0.14556 untuk Iebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.164
Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Sarana Peribadatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Masjid	249	206.099	12.0815
Surau/Mushollah	326	206.099	15.8176
Gereja	1	206.099	0.04852
Vihara	3	206.099	0.14556
Total	**5.348**	206.099	**28.0932**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.5.2 Fasilitas Olahraga dan Seni

Untuk mendukung proses kreatifitas seni dan olahraga di wilayah calon Kota Indragiri terdapat fasilitas berupa gedung pertunjukkan dan olahraga, sehingga proses berkesenian sebagai asset dan potensi dapat dikembangkan di samping mempromosikan potensi budaya khususnya melalui jalur seni, di wilayah ini sarana tersebut sudah ada seperti dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.165
Fasilitas Olahraga dan Seni Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Sarana Peribadatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Pementasan Seni	13	206.099	0.6307
Gedung Serbaguna	9	206.099	0.1455
Balai Pertemuan	45	206.099	2.2319
Total	**68**	206.099	**3.2993**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

Jumlah lapangan olah raga meliputi sepak bola, bola volly, bulu tangkis, sepak takraw clan lain-lain terdapat 326. Seperti pada tabel :

Tabel 4.166
Fasilitas Olahraga Per 10.000 Penduduk

Fasilitas Sarana Peribadatan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Lapangan Sepak Bola	56	206.099	2.7171
Lapangan Sepak Takraw	65	206.099	3.1538
Lapangan Bola Volly	96	206.099	4.6579
Lapangan Badminton	47	206.099	2.2804
Lapangan Futsal	26	206.099	1.2615
Lain-lain	36	206.099	1.7467
Total	**326**	206.099	**15.8176**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.6 Sosial Politik

4.9.6.1 Rasio Penduduk yang ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang mempunyai Hak Pilih

Adanya konstitusi yang memberikan jaminan kepada segenap warga Negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya, hal ini dimanfaatkan oleh warga dan masyarakat talon Kota Indragiri. Kesadaran politik masyarakat calon wiiayah Kota Indragiri dalam menayalurkan aspirasi politiknya seperti terlihat pada tabel di bawah **:**

Tabel 4.167
Jumlah Hak Pilih

Kecamatan	Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih	Jumlah Penduduk Yang Mempergunakan Hak Pilih	Rasio (X)
1. Tembilahan	40.416	39.410	0.9751
2. Tbh Hulu	47.803	42.003	0.8786
3. Tempuling	48.971	38.961	0.7955
4. Kempas	28.872	24.870	0.8613
5. Bt. Tuaka	16.896	10.879	0.6438
6. Kuindra	16.062	11.062	0.6887
Total	**199.020**	**167.185**	**0.8400**

Sumber : *Data Olahan*

4.9.6.2 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Pada wilayah calon Kota Indragiri terdapat 915 organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari OKP dan organisasi Profesi dan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.168
Jumlah Organsasi Kemasyarakatan Per 10.000 Penduduk

Kecamatan	Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih	Jumlah Penduduk Yang Mempergunakan Hak Pilih	Rasio (X)
LSM OKP ORMAS	137 335 443	206.099 206.099 206.099	6.6472 16.2543 21.4945
Total	**915**	**206.099**	**44.3961**

Sumber :*BPS Indragiri Hilir,2009*

4.9.7 Luas Daerah

Kriteria luas daerah pada kajian ini dilihat dari sub indikator luas wilayah keseluruhan serta luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan.

4.9.7.1 Luas Wilayah Keseluruhan

Dari segi Luas wilayah, luas wilayah Kota Indragiri adalah Km^2 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.169
Luas Wilayah Keseluruhan

Kecamatan	Luas Wilayah Keseluruhan
1. Tembilahan	511,63
2. Tbh Hulu	197,37
3. Tempuling	691,19
4. Kempas	1.050,25
5. Bt. Tuaka	180,62
6. Kuindra	364.49
Jumlah Luas Wilayah Keseluruhan	**2.995,55**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

Pada tabel di atas terlihat bahwa kecamatan yang terluas adalah kecamatan Kempas sedangkan wilayah terkecil adalah di kecamatan Batang tuaka.

4.9.7.2 Luas Wilayah Efektif yang dapat dikembangkan

Luas Wilayah efektif yang dapat dikembangkan di wilayah calon Kota Indragiri Pascapemekaran adalah 1.752.905 Km^2 tidak termasuk wilayah lautan untuk Iebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.170
Luas wilayah efektif yang dapat dikembangkan

Kecamatan	Luas Wilayah Pemukiman	Luas Wilayah Pengembangan
1. Tembilahan	285.81	225.81
2. Tbh Hulu	118.685	78.685
3. Tempuling	295.595	395.595
4. Kempas	375.26	675.26
5. Bt. Tuaka	60.31	120.31
6. Kuindra	107.254	257.245
Total Luas Wilayah Pemukiman Km^2	**1.215.914**	
Total Luas Wilayah Pemukiman Km^2		**1.752.906**

Sumber :*BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.8 Pertahanan

4.9.8.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Luas Wilayah

Kedudukan strategis wilayah calon pemekaran Kota Indragiri merupakan asset dalam pengembangan wilayah sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan Negara jika tidak dikelola dengan serius, untuk itu aspek pertahanan sangat menentukan terhadap pemekaran suatu wilayah berdasarkan PP 78 Tahun 2007, jika dilihat dari aspek ketersediaan aparat TNI, baik angkatan darat, laut dan udara. Untuk wilayah calon pemekaran wilayah Kota Indragiri Pascapemekaran, ketersediaan aparat hanya ada dari TNI angkatan darat dengan jumlah Personil sebanyak 257 Personil. Jika diperbandingkan dengan luas wilayah Indragiri Hilir Pascapemekaran, maka ratio personil terhadap luas wilayah keseluruhan adalah 2.995,55 km2 (dalam Ha) sebesar 0.08579 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.172 berikut ini :

Tabel 4.171

Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Luas Wilayah

Pertahanan / Kesatuan		Luas Wilayah	Rasio (X)
Personil TNI AD	257	2.995,55	0.05879
Personil TNI AL	-	-	-
Personil TNI AU	-	-	-
Total	**257**	**2.995,55**	**0.05879**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.8.2 Karakteristik Wilayah, dilihat dart sudut pandang Pertahanan

Kedudukan strategis wilayah calon pemekaran Kota Indragiri sebagai kawasan perbatasan, disamping merupakan asset dalam pengembangan wilayah sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan Negara jika tidak dikelola dengan serius.

4.9.9 Keamanan

4.9.9.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk

Jika dilihat dart aspek keamanan dalam menjaga ketertiban wilayahnya, maka jumlah personil yang ada di wilayah calon Kota Indragiri adalah 275 personil. Jika diperbandingkan dengan luas wilayah Kota Indragiri, maka ratio personil terhadap jumlah penduduk adatah sebesar 0.00133.

Tabel 4.172
Rasio Jumlah personil aparat Keamanan
Terhadap Jumlah Penduduk

Pertahanan / Kesatuan		Jumlah Penduduk	Rasio (X)
Personil POLRI	275	206.009	0.00133
Total	**275**	**206.099**	**0.00133**

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.10 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

4.9.10.1 Indek Pembangunan Manusia

Tujuan pembangunan millennium *(Millenium Development Goals-MDGs)* adalah mengatasi delapan tantangan utama pembangunan, kedelapan tantangan itu bersumber dari Deklarasi Milennium PBB, sebuah komitmen global mengenai pembangunan yang dibuat oleh para pemimpin dunia dan disetujui oleh Sidang Umum PP dimana pencapaiannya secara global harus dilakukan pada 2015. Untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam PP No. 78 Tahun 2007 adalah Indeks Pembangunan Manusia. Adapun indeks Pembangunan Manusia untuk calon wilayah Kota Indragiri yang dilihat dari taraf hidup manusia adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.173
Indek Pembangunan Manusia

Kecamatan	Indek Pembangunan Manusia			
	Angka harapan hidup	Angka melek huruf	Rata-rata lama Sekolah	IPM
Tahun 2007	70.9	98.00	7.2	72.40
Tahun 2008	70.7	97.52	7.3	71.87

Sumber : *BPS Indragiri Hilir ,2009, Data Diolah Kembali*

4.9.11 Rentang Kendali

4.9.11.1 Rata-Rata Jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten

Rentang kendali merupakan indikator yang mengisyaratkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa pemerintah. Rentang kendali ini diindikasikan dari jarak tempuh dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten. Berdasarkan kondisi sebelum pemekaran, wilayah Indragiri Hilir memiliki jarak rata-rata ke ibukota Tembilahan sejauh 111,17 Km dengan rata-rata waktu tempuh mencapal 2,5 jam.

Sedangkan dengan terbentuknya wilayah Kota Indragiri maka ke Ibukota Kecamatan berjarak rata-rata 54.8 Km dengan waktu tempuh rata-rata 0.88 jam. Dengan pemekaran, jarak tempuh dan waktu tempuh untuk menjangkau fasilitas layanan pemerintah menjadi kecil di wilayah Kota Indragiri, dibandingkan sebelum pemekaran. Hal ini didasarkan dari rata-rata jarak dan waktu tempuh antar kecamatan di wilayah Indragiri hilir hanya sekitar 54.8 km untuk jarak tempuh dan sekitar 0.88 jam untuk waktu tempuh. Jarak dan waktu tempuh untuk masing-masing kecamatan di wilayah Indragiri Hilir di tujukan pada tabel berikut :

Tabel 4.174
Rentang Kendali

Kecamatan	Jarak (km) dan waktu tempuh (jam) antar kecamatan di wilayah Kota Indragiri					
	Tembilahan	Tbh Hulu	Tempuling	Kempas	Bt. Tuaka	Kuindra
Tembilahan		30 Km	40 Km	90 Km	40 Km	50 Km
Tbh Hulu	30 Menit		30 Km	70 Km	60 Km	60 Km
Tempuling	50 Menit	30 Menit		60 Km	80 Km	140 Km
Kempas	1.20 Jam	1.10 Jam	1 Jam		120 Km	160 Km
Bt. Tuaka	40 Menit	1.40 Jam	1.10 Jam	1.40 Jam		90 Km
Kuindra	1.20 Jam	1.20 Jam	2 Jam	2.20 Jam	1.40 Jam	
Jarak rata-rata kecamatan (km) 50 km						
Waktu tempuh Rata-rata kecamatan (jam) 50 km /Jam						

Sumber : *Data olahan,2009*

4.9.11.2 Rata-Rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan

Rata-rata jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten untuk wilayah calon Kota Indragiri adalah 54.8 Km pembentukan Kota Indragiri akan membawa pada perubahan bagi masyarakat yang selama ini bertempat tinggal di wilayah calon Kota Indragiri, yakni akan semakin dekatnya jarak tempuh ke pusat pemerintahan kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.175
Rata-Rata Jarak Kecamatan Ke Pusat Pemerintahan

Kecamatan	Jarak (km) ke ibu kota Kabupaten Tembilahan	Waktu tempuh (jam) ke Ibu Kota Kabupaten
1. Tembilahan	0	0
2. Tbh Hulu	30	0.30
3. Tempuling	40	0.40
4. Kempas	70	1.2
5. Bt. Tuaka	130	2,6
6. Kuindra	59	0.50
Rata-rata Jarak dan Waktu Tempuh di Kota Indragiri	**54.8**	**0.88**

Sumber :*BPS Indragiri Hilir,2009, Data Diolah Kembali*

4.10 Analisis Hasil Kajian

4.10.1 Pendekatan Analisis

Pada bagian metodologi telah dibahas, bahwa terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam studi ini (baik pada tahap penggalian data ataupun pada tahap analisis data).Kedua pendekatan yang dimaksud adalah, pendekatan kauntitatif, dan pendekatan kualitatif, dan pendekatan kuantitatif

lebih mendapat tekanan dalam kajian ini. Sebab, kajian ini dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan yang telah tersusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 secara komprehensif menilai kelayakan pembentukan suatu daerah otonom melalui 11 (sebelas) kriteria, yang Iebih lanjut diuraikan secara lebih rinci dalam 35 sub indikator. Ukuran ituiah yang kemudian menjadi landasan bagi penilaian bagi daerah dalam melakukan pemekaran wilayahnya. Ke 35 sub-indikator tersebut kemudian dibeikan skor berdasarkan bobot yang telah ditentukan sehingga secara keseluruhan atau skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh indikator PP tersebut memberikan gambaran kemampuan ekonomi dan kekayaan potensi yang saat ini dimiliki oleh daerah otonom (baik kabupaten induk atau pun calon kabupaten otonom).

Berdasarkan amanat dan Peraturan Pemerintah tersebut, skor total dari rencana calon wilayah pemekaran harus di atas rata-rata batas kelulusan dan tidak boleh salah satunya memiliki skor di atas batas kelulusan yang ditetapkan, sehingga dengan demikian baik calon kabupaten maupun kabupaten induk yang ditinggalkan dapat bersama-sama berkembang menjadi daerah otonom yang mampu membiayai dinnya sendiri tanpa harus menjadi beban bagi pusat serta, masyarakat.

Melalui penggabungan kedua pendekatan tersebut, diharapkan akan dapat disajikan suatu informasi yang lengkap, sehingga Tim DPOD akan memiliki informasi yang Iebih memadai dalam pengambilan keputusan terutama tentang

kelayakan suatu daerah, dalam hal ini Kota Indragiri menjadi daerah otonom yang baru yang ada di Propinsi Riau.

4.10.2 Analisis Kelayakan Pemekaran

Analisis mengenai kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan menjadi daerah otonom, didasarkan pada data-data yang diperoleh dengan jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari 35 sub-indikator dari PP No. 78 Tahun 2007 tersebut.

Dalam Bab II PP 78/2007 yang membahas tentang syarat-syarat pembentukan daerah secara jelas di atur dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa :Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota, yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pada kajian ini hanya membahas mengenai syarat teknis yang secara tegas diatur dalam pasal 6 ayat 1 PP 78/2007, yang menyebutkan syarat teknis meliputi: faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pada ketentuan pada pasal 6 ayat 1 inilah maka pengkajian terhadap kelayakan usulan pemekaran daerah Kota Indragiri, akan dapat dijelaskan Iebih Ianjut mengenai penilaian terhadap potensi Kota Indragiri. Dalam kajian ini akan di bahas satu persatu tentang analisis masing-masing rencana daerah otonom baru.

4.10.3 Analisis Kelayakan Pemekaran Calon Kota Indragiri

4.10.3.1 Kependudukan

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang ikut menjadi penentu dalam rangka pemekaran wilayah ini, sebab jumlah penduduk termasuk ke dalam kriteria potensi daerah yang mentukan bagi berhasil atau tidaknya suatu daerah tersebut dalam memajukan sekaligus juga mensejahterakan masyarakatnya. Namun perlu juga diingat, bahwa jumlah penduduk selain bisa menjadi faktor yang negative. Artinya, jumlah penduduk yang besar namun tidak disertai dengan kualitas yang memadai baik dari sisi pendidikan maupun dad sisi kesehatan dan kesejahteraan justru dapat menjadi beban bagi suatu daerah ku sendiri.

Dari hasil penggalian data, dapat diperoleh gambaran bahwa untuk kriteria jumlah penduduk di Kota Indragiri cukup memadai, yakni berada pada angka nilai batas kelulusan, untuk tebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.176
Skor Indikator Jumlah Penduduk
Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding (%)	Skor
1.	Jumlah Penduduk	206.099	81	5
2.	Jumlah Penduduk Wilayah Pembanding	252.299	100	5

Sumber : *BPS Provinsi Riau,2008, Data Diolah*

Rasio nilai variable jumlah penduduk pada wilayah calon pemekaran Kota Indragiri terhadap jumlah penduduk wilayah pembanding (jumlah penduduk rata-rata kabupaten lain di provinsi Riau) adalah sebesar 252.299 dengan skor nilai 5 (lima) jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah pemekaran rencana Kota Indragiri maka memiliki persentase sebesar 81 persen dengan skor 5 (lima).

4.10.3.2 Kepadatan Kependudukan

Wilayah calon pemekaran, Kota Indragiri yang luas wilayah total mencapai 2.995,55 Km^2. Dengan jumlah penduduk sebanyak 206.099 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk per Km^2 di wilayah calon pemekaran sebesar 68 jiwa per Km^2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk pada wilayah INHIL yang tersisa setelah pemekaran, sebesar 57,37 jiwa per Km^2. Tingkat kepadatan penduduk pada wilayah calon pemekaran ini maupun pada wilayah induk yang tersisa setelah pemekaran lebih rendah dari rata-rata tingkat kepadatan penduduk per wilayah efektif di kabupaten lain di provinsi Riau, yang rata-rata kepadatan penduduknya sebesar 29,42 jiwa Km^2.

Tabel 4.177
Skor Indikator Kepadatan Penduduk per Luas Wilayah Efektif pada Wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km^2)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	68.01	231	5
	Wilayah Sisa setelah pemekaran	57.37	195	5
2.	Wilayah Pembanding	29.42	100	5

Sumber : *BPS Provinsi Riau,2008, Data Diolah*

Rasio nilai variabel tingkat kepadatan penduduk perwilayah efektif pada wilayah talon pemekaran Kota Indragiri terhadap kepadatan penduduk adalah sebesar 251 %, yang berarti bahwa variable tingkat kepadatan penduduk pada wilayah calon pemekaran Kota Indragiri memiliki skor 5 (lima). Sedangkan pada wilayah sisa (Indragiri Hilir setelah pemekaran) rasio tingkat kepadatan penduduknya per wilayah dengan kepadatan penduduk wilayah pembanding sebesar 195 % yang berarti indikator kepadatan penduduk wilayah Indragiri Hilir yang tersisa setelah pemekaran memiliki skor 5 (lima).

4.10.3.2 Faktor Kemampuan Ekonomi

4.10.3.2.1 Indikator PDRB Non Migas Perkapita

PDRB per kapita non-migas merupakan salah satu indikator yang umum clan penting untuk menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis, di peroleh gambaran bahwa tingkat PDRB perkapita wilayah calon pemekaran lebih tinggi dad PDRB per kapita wilayah pembanding. PDRB non migas pada wilayah calon pemekaran Kota Indragiri sebesar Rp 14.21 Juta per kapita, sedangkan PDRB non Migas pada sisa sebesar Rp 9.89 Juta per kapita, sementara wilayah pembanding memiliki PDRB non migas per kapita sebesar Rp 6.93 Juta per kapita.

Tabel 4.178
Skor Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Pertumbuhan Ekonomi (%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a. Wilayah Pemekaran	14.21	205	5
	b. Wilayah Sisa	9.89	142	5
2.	Wilayah Pembanding	6,93	100	5

Sumber : *BPS, PDRB Kota Indragiri Riau,2008*

Dan tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah rencana pemekaran Kota Indragiri sangat mampu dengan persentase sebesar 205 % dengan skor 5 (lima). IN disebabkan oleh daerah ini sangat mudah diakses bagi pelaku-pelaku ekonomi yang ada, sedangkan diwilayah sisa juga memiliki skor yang sama yaitu 5 (lima).

4.10.3.2.2 lndikator Kontribusi PDRB Non Migas

Indikator kontribusi PDRB Non Migas di ukur dari Rasio antara Non Migas wilayah analisis menurut harga berlaku tahun 2005 dengan Non Migas Provinsi Riau pada tahun yang sama. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sebelum pemekaran member kontribusi sebesar 32.38 % terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau. Dan besaran Kontnbusi tersebut, sekitar 11.67 % bersumber dan wilayah Calon Kota Indragiri, sisanya bersumber dari wilayah sisa dari

wilayah calon pemekaran dengan kontrbusi sebesar 20.71 % Juta per kapita terhadap PDRB NON Migas Provinsi Riau. Sedangkan wilayah-wilayah kabupaten di Provinsi Riau rata-rata member kontribusi sebesar 15.56 %.

Tabel 4.179
Skor indikator Kontribusi PDRB Non Migas Wilayah Calon Kota Indragiri Terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau

No	Wilayah	Nilai Indikator: Kontribusi PDRB Non Migas (%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	11.67	75	4
	b.Wilayah Sisa	19.85	127	5
2.	Wilayah Pembanding	15.56	100	5

***Sumber :** BPS, PDRB Kab/Kota di Provinsi Riau,2008*

Berdasarkan niiai Rasio antara kontribusi PDRB Migas wilayah calon pemekaran dengan nilai kontribusi wilayah pembanding terhadap PDRB Non Migas Provinsi Riau yang lainnya sebesar 32.38 menunjukkan bahwa calon wilayah pemekaran hanya memberi kontribusi terhadap PDRB Non Migas Provinsi hanya sebesar 11.67 %, sementara wilayah sisa dad wilayah pemekaran member kontribusi lebih besar dari wilayah pernbanding dengan nilai sebesar 19.85 Dengan demikian maka indikator kontribusi PDRB Non migas pads wilayah calon pemekaran Kota Indragiri terhadap PDRB Non Migas Provinsi memiliki skor 4 (empat) sementara wilayah sisa pemekaran memiliki nilai skor 5 (lima).

4.10.3.3 Faktor Potensi Daerah

4.10.3.3.1 Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk

Walaupun ketersediaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Non Bank yang ada di wilayah calon pemekaran Kota Indragiri, yang di indikasikan oleh ratio lembaga bank dan Non Bank per 10.000 penduduk paling adalah sebesar 4.07 lembaga per 10.000 penduduk, namun indek ketersediaan lembaga tersebut tidak jauh berbeda dengan ketersediaannya dengan wilayah sisa setelah pemekaran. Sedangkan indeks ketersediaan lembaga Bank dan Non Bank pada wilayah sisa pemekaran mencapai 3.67 lembaga per 10.000 penduduk, yang berarti indeksnya lebih rendah dari indeks wilayah pembanding.

Tabel 4.180
Skor Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk pada wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Bank & Lembaga Non Bank Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	4.07	97	4
	b.Wilayah Sisa	3.67	87	5
2.	Wilayah Pembanding	4.19	100	5

***Sumber :** Data Olahan,2009*

Berdasarkan dari rasio antara indeks ketersediaan lembaga Bank dan Non Bank yang ada di wilayah calon pemekaran dengan indeks ketersediaannya berada di atas 97 %, maka nilai skor untuk indikator ini bernilai 5 (lima). Demikian pule halnya

dengan skor indikator Bank dan non Bank ini di wilayahkan sisa pemekaran berada di atas 87% dengan nilai skor untuk indikator ini 5 (lima).

4.10.3.3.2 Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk

Jumlah pertokoan kedai, warung dan tempat perbelanjaan lainnya yang ada di wilayah Calon Kota Indragiri, secara relative jumlah pertokoan lebih banyak di bandingkan di wilayah sisa pemekaran, namun lebih sedikit di bandingkan dengan wilayah pembanding yaitu sekitar 150.461 pertokoan per 10.000 penduduk, sementara di wilayah sisa rasionya sebesar 109,35 pertokoan per 10.000 penduduk dan untuk wilayah pembanding nilai rasionya mencapai 199,65 per 10.000 penduduk.

Tabel 4.181
Skor Indikator Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk pada Wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	150.461	75	4
	b.Wilayah Sisa	109.35	54	3
2.	Wilayah Pembanding	199.65	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Dengan membandingkan antara ketersediaan kelompok pertokoan per 10.000 penduduk di wilayah analisis dengan ketersediaan di wilayah pembanding, maka di peroleh ratio sekitar 75% di wilayah calon pemekaran, sehingga indikator ini

memiliki nilai skor 4 (empat) untuk wilayah calon pemekaran, sedangkan wilayah sisa pemekaran memiliki ratio sekitar 54 % sehingga indikator ini memiliki nilai 3 (tiga).

4.10.3.3.3 Indikator Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk

Tabel 4.182
Skor indikator Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk pada Wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	1.31	61	4
	b.Wilayah Sisa	1.70	80	5
2.	Wilayah Pembanding	2.13	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Dan tabel di atas perbandingan indeks ketersediaan pasar pada wilayah calon pemekaran dengan wilayah pembanding menghasilkan rasio sekitar 61%, dengan skor 4 (empat) sementara diwilayah sisa setelah pemekaran yaitu sebesar 80% atau setara dengan skor nilai 5 (lima).

4.10.3.3.4 Indikator Rasio Sekolah SD Per Penduduk usia SD

Ketersediaan Prasarana sekolah dasar menurut jumlah usia sekolah dasar pada wilayah calon pemekaran Kota Indragiri lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Baik jika di bandingkan dengan wilayah sisa pemekaran, maupun bila di bandingkan dengan wilayah pembanding. Terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.183
Skor indikator Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia di Wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.0131	225	5
	b.Wilayah Sisa	0.0057	99	5
2.	Wilayah Pembanding	0.0058	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri dalam Angka,2008*

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio antara sekolah dasar per penduduk usia SD di wilayah calon pemekaran adalah 0.0131 yang berarti setiap 1.000 penduduk usia SD terdapat 13.1 unit SD dapat menampung siswa per SD. Angka ratio sekolah dasar per penduduk usia SD di wilayah sisa pemekaran juga tidak berbeda jauh nilainya yaitu sekitar 5.7 unit SD.

Mengingat ketersediaan indeks sekolah dasar (nilai rasio sekolah SD per penduduk usia SD) pada masing-masing wilayah setelah dianalisis maka skor untuk rencana wilayah Kota Indragiri memiliki skor 5 atau 225% sedangkan diwilayah sisa setelah pemekaran juga memiliki skor yang sama dengan nilai skor yaitu 5 (lima) dengan persentase 99%.

4.10.3.3.5 Indikator Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SUP

Indeks ketersediaan SLTP pada wilayah Calon Kota Indragiri (di ukur dari rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP) sedikit

lebih tinggi di bandingkan pada wilayah sisa pemekaran. Indeks ketersediaan sekolah SLTP pada wilayah calon pemekaran ini sebesar 0.0036 yang berarti setiap 1.000 penduduk usia SUP terdapat 3.6 unit SLTP, sementara di wilayah sisa pemekaran hanya tersedia 6.6 unit per setiap 1.000 penduduk usia SLTP. Sedangkan indeks ketersediaan sekolah SLTP pada wilayah pembanding mencapai nilai 4.1 unit per setiap penduduk usia SLTP. Untuk Iengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.184
Skor Indikator Rasio Sekolah SUP Per Penduduk Usia SUP di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator : Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.0036	87	5
	b.Wilayah Sisa	0.0066	158	5
2.	Wilayah Pembanding	0.0041	100	5

Sumber : *BPS Indragiri Hilir dalam Angka 2008*

Nilai indeks ketersediaan sekolah SLTP (nilai rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP) pada wilayah calon pemekaran hanya sekitar 87% dari nilai indeks ketersediaan SLTP di wilayah pembanding, sedangkan rasio indek ketersediaan sekolah SLTP ini di wilayah sisa pemekaran terhadap indek wilayah pembanding sama yaitu sekitar 158%. Dengan demikian, berdasarkan pada nilai rasio perbandingan indek ketersediaan wilayah calon pemekaran clan wilayah sisa pemekaran terhadap nilai indek wilayah pembanding, maka skor indikator

rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP di wilayah calon pemekaran bemilai skor 5 (lima) sedangkan wilayah sisa pemekaran bemilai skor 5 (lima).

4.10.3.3.6 Indikator Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA

Indeks ketersediaan sekolah SLTA pada wilayah Calon Kota Indragiri memilki indeks yang lebih rendah baik jika di bandingkan dengan wilayah sisa pemekaran, maupun jika di bandingkan Nilai indeks ketersediaan sekolah SLTA di wilayah calon pemekaran yang di ukur dari rasio

Sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 0.0020 yang setiap 1.000 penduduk usia sekolah SLTA terdapat sekolah SLTA sebanyak 2 unit sekolah sedangkan nilai indeks pada wilayah sisa pemekaran sebesar 0.0035 yang berarti terdapat 3.5 unit sekolah SLTA per 1.000 penduduk usia SLTA. Lebih jelasnya indeks ketersediaan sekolah SLTA pada wilayah analisis dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 4.185
Skor Indikator Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.0020	95	5
	b.Wilayah Sisa	0.0035	166	5
2.	Wilayah Pembanding	0.0021	100	5

Sumber : *BPS Indragiri dalam Angka 2008*

Hasil perbandingan nitai indeks ketersediaan sekolah SLTA di wilayah calon pemekaran dengan nilai indeks berupa wilayah pembanding menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sarana sekolah SLTA per penduduk usia SLTA pada wilayah calon pemekaran hanya sekitar 95% dari rasio sarana sekolah SLTA per penduduk usia SLTA di wilayah pembanding, dengan demikian indikator ini pads wilayah calon pemekaran memiliki skor 5 (lima) demikian pula pada wilayah sisa pemekaran, skor pada indikator rasio sarana sekolah per penduduk usia SLTA memiliki nilai skor 5 (lima).

4.10.3.3.7 Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk

Ketersediaan Fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu clan sarana lainnya juga merupakan indikator pening untuk menilai potensi wilaayh calon pemekaran dalam menyediakan fasilitas layanan dasar seperti kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan data indeks ketersediaan sarana kesehatan yang di ukur clad rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk, terlihat bahwa nilai indeks ini di wilayah calon pemekaran bernilai sebesar 3.736 unit per 10.000 penduduk. Nilai index ketersediaan sarana kesehatan di wilayah calon pemekaran ini Iebih tinggi jika di bandingkan nilai index pada wilayah pembanding yang nilai indeksnya sebesar 2.424 unit yang berarti setiap 10.000 penduduk jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah pembanding sebanyak 2.345 unit. Lengkapnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.186
Skor Indikator Raslo Fasiliitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	3.736	159	5
	b.Wilayah Sisa	2.424	103	5
2.	Wilayah Pembanding	2.345	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri dalam Angka 2008*

Hasil perbandingan indeks ketersediaan sarana kesehatan di wilayah calon pemekaran dengan index serupa di wilayah pembanding memiliki 159 % yang berarti bahwa calon wilayah Kota Indragiri memiliki potensi yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya di bandingkan dengan wilayah pembanding. Sedangkan wilayah sisa pemekaran, meskipun potensi dalam menyediakan fasilitas kesehatan lebih rendah dari wilayah pembandingan namun nilai skor nya sama dengan rencana wilayah pemekaran Kota Indragiri sama-sama skor 5 (lima).

Dengan demikian potensi calon wilayah pemekaran dalam menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat sangat mendukung jika Kota Indragiri resmi menjadi daerah otonom.

4.10.3.3.8 Indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk

Tabel 4.187
Skor indikator Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Tenaga Medis Per 10.000 penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	8.539	90	5
	b.Wilayah Sisa	12.648	134	5
2.	Wilayah Pembanding	9.415	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir dalam Angka, 2008*

Pada tabel di atas terlihat bahwa indeks ketersediaan tenaga medis di wilayah calon pemekaran sebesar 8.539 yang artinya setiap 10.000 penduduk terdapat tenaga medis sebanyak._8.5 orang tenaga medis. Sedangkan di wilayah sisa pemekaran dan di wilayah pembanding masing-masing terdapat 1.2 dan 9.4 tenaga medis per 10.000 penduduk. Dengan membandingkan index ketersediaan tenaga medis pada masing-masing wilayah analisis dengan wilayah pembanding, maka indikator potensi ketersediaan tenaga medis (rasio tenaga medis per 10.000 penduduk) pada wilayah calon pemekaran maupun pada wilayah sisa pemekaran masing-masing memiliki skor 5 (lima).

4.10.3.3.9 Indikator Persentase Penduduk yang Mempunyai Kendaraan Bermotor/Kapal/Perahu Motor

Indeks ketersediaan kendaraan bermotor atau alat transformasi Iainnya pada rumah tangga juga merupakan

indikator penting bagi calon pemekaran wilayah, karena indeks tersebut mengindentifikasikan ketersediaan sarana penunjang transformasi bagi masyarakat dalam mengaxes Layanan jasa pemerintah maupun daim menunjang aktivitas perekonomian. Index ketersediaan kendaraan bermotor/ perahu/kapal bermotor di wilayah talon, pemekaran yang di ukur dari persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor menunjukkan nilai yang Iebih kecil di bandingkan di wilayah sisa pemekaran, maupun di wilayah pembanding.

Tabel 4.189
Skor Indikator Persentase Penduduk yang Mempunyal Kendaraan Bermotor/KapaUPerahu Motor di Wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Persentase RT Memiliki Kendaraan Bermotor/Perahu / Kapal/Motor (100%)	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	10.99	73	4
	b.Wilayah Sisa	14.52	96	5
2.	Wilayah Pembanding	15.00	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir dalam Angka, 2008*

Persentase rumah tangga di wilayah calon pemekaran yang memiliki kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor sebesar 73 rumah tangga, sedangkan di wilayah sisa pemekaran proporsinya sebesar 96 %. Berdasarkan perbandingan nilai indeks ketersediaan kendaraan bermotor/perahu/kapal bermotor di wilayah anatisis dengan nilai indeks serupa di

wilayah calon pemekaran bernilai rasio perbandingan untuk wilayah sisa pemekaran. Dengan demikian skor indikator persentase rumah tangga yang memilki kendaraan bermotor/ perahu/kapal bermotor di wilayah calon pemekaran memiliki skor 4 (empat) sedangkan wilayah sisa memiliki skor 5 (lima).

4.10.3.3.10 Indikator Persentase Pelanggan Listrik terhadap jumlah Rumah Tangga

Fasilitas layanan penerangan PLN di wilayah calon pemekaran, umumnya hanya mampu melayani rumah tangga yang berada di pusat-pusat kecamatan dan beberapa desa di sekitarnya, sehingga sebagian besar masyarakat menggunakan sarana penerangan Non PLN. Kondisi tersebut juga tidak berbeda jauh dengan di wilayah sisa pemekaran. Besamya pelanggan listrik balk yang PLN maupun pelanggan listrik Non PLN di calon wilayah pemekaran baru sekitar 82.70 dan total rumah tangga yang ada, sedangkan di wilayah sisa pemekaran persentase pelanggan listrik ini mencapai,41.01 dan total rumah tangga. Sementara di rata-rata kabupaten lain di lingkungan Provinsi riau, di mana rata-rata persentase pelanggan listriknya terhadap total rumah tangganya mencapai 75.13.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelayanan fasilitas penerangan bagi rumah tangga di wilayah calon pemekaran sangat balk di bandingkan dengan tingkat pelayan jasa penerangan di kabupaten lainnya di provinsi Riau.

Indikator tingkat pelayan jasa penerangan yang di ukur dan persentase pelanggan PLN dan Non PLN di wilayah analisis maupun di wilayah pembanding dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.190

Skor Indikator Persentase Pelanggan Listrik terhadap jumlah Rumah Tanggadi wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator : Persentase Listrik PLN dan Non PLN Terhadap Jumlah RT	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembanding	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	82.70	110	5
	b.Wilayah Jasa	41.01	54	3
2.	Wilayah Pembanding	75.13	100	5

Sumber : *BPS, Kecamatan Dalam Angka, 2003 dan Indragiri Hilir Dalam Angka, 2008*

Dengan membandingkan nilai indikator pelayanan jasa peneranagn di wilayah analisis dengan nilai indikator tersebut di wilayah pembanding, maka terlihat bahwa nilai indikator layanan jasa penerangan ini di wilayah calon pemekaran hanya 110 % dari tingkat layanan jasa penerangan wilayah pembanding, sedangkan di wilayah sisa pemekaran nilai rasionya mencapai 54 %. Berdasarkan nilai rasio perbandingan tingkat layanan jasa penerangan di wilayah analisis dengan wilayah pembanding tersebut, maka skor untuk potensi layanan jasa penerangan ini di wilayah calon pemekaran maupun di wilayah sisa pemekaran masing-masing memiliki nilai skor 5 (lima), dan wilayah sisa pemekaran memiliki skor 3 (tiga).

4.10.3.3.11 Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap jumlah Kendaraan Bermotor

Indikator rasio panjang jalan tehadap kendaraan bermotor mengidentifikasikan potensi pelayanan prasaran jalan bagi

masyarakat, semakin tinggi nilai rasio ini maka potensi yang tersedia bagi pelayanan jasa jalan ini semakin bagus atau dengan kata lain ketersediaan jalan yang ada semakin memadai, mengenai ketersediaan panjang jalan di wilayah pemekaran kota Indragiri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.191
Skor indikator Rasio panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Panjang Jalan Terhadap Kendaraan Bermotor	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.01741	20	2
	b.Wilayah Sisa	0.09189	106	5
2.	Wilayah Pembanding	0.08600	100	5

Sumber : BPS, Kecamatan Dalam Angka, 2003 dan Indragiri Hilir Dalam Angka, 2008

Mengingat ketersediaan jalan per unit kendaraan bermotor di wilayah canon pemekaran Iebih rendah di bandingkan ketersediaan jafan per unit kendaraan di wilayah sisa pemekaran, maka skor dari indikator rasio panjang jafan terhadap jumlah kendaraan bermotor di wilayah calon pemekaran memilki skor 2 (dua) demikian pula ketersediaan jafan per unit kendaraan di wilayah sisa pemekaran Iebih tinggi di bandingkan di wilayah pembanding yang di tunjukkan oleh rasio perbandingan sebesar 106 %, sehingga nilai skor pada indikator ini di wilayah sisa pemekaran juga memilki nilai skor 5 (lima).

4.10.3.3.11 Indikator Persentase Pekerja yang berpendidikan Minimal SLTA Terhaadp Penduduk Usia 18 Tahun Keatas

Indiaktor persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA keatas terhadap penduduk usia 18 tahun keatas, merupakan indikator potensi sumber daya manusia yang terdapat di wilayah analisis. Berdasarkan nilai variable dari indikator ini di peroleh gambaran bahwa persentase tenaga kerja yang berpendidikan SLTA ke atas terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas di wilayah Calon Kota Indragiri sebanyak 63.00 sedangkan di wilayah sisa pemekaran terdapat 17.07 clan wilayah pembanding terdapat 18.00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.192
Skor Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Persentase Pekerja Berpendidikan Minimum SLTA Terhadap Usia 18 Tahun ke Atas	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	63.00	350	5
	b.Wilayah Pembanding	17.07	94	5
2.	Wilayah Pembanding	18.00	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka, 2006 Susena 2008*

Ratio perbandingan nilai variable dari indikator persentase pekerja yang minimal berpendidikan SLTA terhadap penduduk yang berusia 18 tahun ke atas di wilayah calon pemekaran di bandingkan dengan di wilayah pembanding menunjukkan nilai rasio sebesar 350 dengan nilai skor 5 (lima), sedangkan nilai rasio variabel tersebut di wilayah sisa pemekaran dengan di wilayah pembanding memilki nilai rasio sebesar 94 % dengan demikian skor 5 (lima).

4.10.3.3.12 Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke atas

Indikator persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas jugs merupakan indikator kinerja yang menggambarkan potensi cumber daya manusia yang tersedia di wilayah yang di analisis. Di wilayah Calon Kota Indragiri, persentase pekerja berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas sebanyak 23.14 sementara di wilayah pembanding persentase tenaga kerja tersebut terdapat sebanyak 16.00 Gambaran tersebut menjelaskan bahwa potensi sumber daya manusia yang tersedia di wilayah calon pemekaran jauh tebih balk di bandingkan dengan wilayah pembanding.

Tabel 4.193
Skor Indikator Persentase Pekeda yang Berpendidikan Minimal SI Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Persentase Pekerja Berpendidikan Minimum S1 Terhadap Usia 25 Tahun ke Atas	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	23.14	140	5
	b.Wilayah Sisa	13.22	82	5
2.	Wilayah Pembanding	16.00	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Dalam Angka, 2006 Susena 2008*

Nilai rasio perbandingan nilai variabel dan indikator pekerja berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah calon pemekaran dengan wilayah pembanding memiliki nilai rasio sebesar 144 % dengan demikian indikator ini di wilayah calon pemekaran memiliki nilai skor 5 (lima), sedangkan di wilayah sisa pemekaran, nilai rasio variabel tersebut terhadap nilai variabel wilayah pembanding rasionya mencapai 82 % yang berarti skor indikator persentase pekerjaan berpendidikan minimal SI terhadap usia 25 tahun ke atas di wilayah sisa pemekaran memiliki nilai skor 5 (lima).

4.10.3.3.13 Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap 10.000 Penduduk

Selain indikator persentase pekerja menurut tingkat pendidikan SLTA clan S1, maka nilai variabel indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk juga mengindikasikan

ketersediaan sumber daya manusia di wilayyh analisis. Wilayah Calon Kota Indragiri yang memiliki jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 1.510 jiwa, memiliki rasio pegawai negeri per 10.000 penduduk sebesar 73.26 % yang berarti setiap 1.000 penduduk terdapat pegawai negeri sipil sebanyak 7.3 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4.194
Skor Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil
Terhadap Penduduk di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Indikator: Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Indikator Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	73.26	82	5
	b.Wilayah Sisa	110.58	124	5
2.	Wilayah Pembanding	89.15	100	5

Sumber : *BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka, 2008 Susena 2008*

Berdasarkan hasil perbandingan nilai variabel indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk di wilayah calon pemekaran terhadap wilayah pembanding, maka di dapatkan nilai rasio sebesar 82 % yang berarti indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk di wilayah calon pemekaran memiliki nilal skor 5 (lima). Sedangkan di wilayah sisa pemekaran memiliki nilai rasio sebesar 124 % yang berarti potensi ketersediaan pegawai negeri sipil di wilayah sisa inl kbih tinggi di bandingkan ketersediaan pegawai negeri sipil di wilayah pembanding, karena itu nilal skor indikator rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk di wilayah sisa pemekaran memiliki skor 5 (lima).

4.10.3.4 Kemampuan Keuangan

4.10.3.4.1 Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri

Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah baru karena berkaitan dengan kemampuan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh kerena itu indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi PDS di suatu wilayah maka semakin balk aspek kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kota Indragiri memiliki nilal variabel yaitu 299.250.017.565 dengan rasio sebesar 38 %. Artinya daerah inl tergolong mampu, tetapi bila Kota Indragiri telah menjadi daerah otonom baru maka PDS akan meningkat karena masih banyak SDA yang ada belum di kelola secara optimal seperti adanya cadangan minyak bumi, dan adanya Batubara yang belum terkelola dengan balk. Sementara itu PDS di kabupaten pembanding pada daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 205,06, wilayah sisa setelah pemekaran 110.48 dan Kota Indragiri setelah pemekaran 215.31.

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam konteks PDS yaitu mempunyai skor 4 (empat).atau di katakan sebagai katagori mampu.

Tabel 4.195
Nilai Variabel Jumlah dan Rasionya serta Nilai Skordi wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Jumlah PDS	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	215.31	104	5
	b.Wilayah Sisa	110.48	53	3
2.	Wilayah Pembanding	205.06	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Kesimpulan dari Indikator Jumlah PDS di Wilayah Calon Kota Indragiri, memiliid skor 5 (lIIma) sedangkan Wilayah sisa pemekaran (Inhil setelah Pemekaan), memiliki skor 3 (tiga)

4.10.3.4.2 Rasio PDS Terhadap jumlah Penduduk

Rasio Pendapatan Daerah sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daearh baru karena berkaitan denagn kemampuan mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi rasio PDS terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah maka semakin baik aspek keuangan daerah dalam membangun kesjahteraan rakyat. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kota Indragiri memitiki nilai variabel yaitu 299.250.017.565 degan rasio sebesar 145.19% artinya tergolong tidak mampu untuk Iebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.196
Nilai Variabel PDS Tehadap Jumlah dan Rasionya serta Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	145.19	66	4
	b.Wilayah Sisa	411.73	187	5
2.	Wilayah Pembanding	219.33	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Analisis di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam kontex rasio PDS terhadap jumlah penduduk yaitu mempunyai skor 4(empat) atau di katakan sebagai katagori tidak mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40 % nilai rata- rata. Sedangkan di wilayah sisa setelah pemekaran memiliki skor 5 (lima), artinya setelah adanya pembentukan otonom baru tidak mempengaruhi terhadap pembangunan yang ada di Indragiri Hilir sebelum dilakukannya pemekaran.

4.10.3.4.3 Rasio PDS Terhadap PDRB

Rasio Pendapatan daerah sendiri (PDS) terhaadp PDRB sesuai denagn ketentuan dalam PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah abru karena berkaitan dengan kemampuan pertumbuhan perekonomian

daerah. Oleh sebab itu indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS).

Terhadap PDRB di suatu wilayah maka semakin baik aspek pertumbuhan perekonomian daerah. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kota Indragiri memiliki nilai variabel yaitu 1.389,853 dengan rasio sebesar 0.90 % artinya daerah ini tergolong mampu, tetapi bila Kota Indragiri telah menjadi daearh otonom baru maka rasio PDS akan meningkat karena SDA yang ada belum di kelola secara optimal.

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam kontex rasio Pendapatan Daerah sendiri (PDS) terhadap PDSB yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau dikatakan sebagai sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau lama dengan 80 % nilai rata- rata.Nilai indikator 5 (lima) memiliki makna bahwa Kota lndragiri pada dasarnya sangat layak di rekomendasikan menjadi Daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap PDRB, dan Kota Indragiri harus selalu berusaha dalam meningkatkan rasio PDS-nya. Skor pada wilayah sisa pemekaran mendapatkan nilai sebesar 187 % atau di katakan sebagai kategon sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilal indikator lebih besar atau sama dengan 187 % maka nilai rata-rata. Nilai indikator 5 (lima).

Tabel 4.197
Nilai Variabel PDS Terhadap PDRB dan Rasionya serta Mail Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio PDS Terhadap PDRB	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	0.90	375	5
	b.Wilayah Sisa	0.45	187	5
2.	Wilayah Pembanding	0.24	100	5

***Sumber :** Data Olahan,2009*

4.10.3.5 Sosial Budaya

4.10.3.5.1 Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk

Aspek rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk PP No. 78 Tahun 2007 ikut menentukan kelaaykan pemekaran daerah baru karena berkaitan dengan penyediaan sarana peribadatan masyarakat dalam rangka penis catan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat di Kota Indragiri merupakan masyarakat yang sangat taat beribadah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 4.198
Nilai Variabel Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk serta Nib! Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	28.09	93	5
	b.Wilayah Sisa	26.16	86	5
2.	Wilayah Pembanding	30.20	100	5

***Sumber :** Data Olahan,2009*

Analisa di atas memberikan penilaian bahwa skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam kontex rasio sarana peribadatan yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategon sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan nilai rata- rata. Nilai indikator skor 5 (lima) memiliki makna bahwa Kota Indragiri layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru).

4.10.3.5.2 Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk

Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran daerah baru karena berkaitan dengan penciptaan masyarakat yang sehat jasmani. Masyarakat di Kota Indragiri merupakan masyarakat yang baik dalam aspek olah raga. Oleh sebab itu indikator yang di gunakan yaitu semakin tinggi fasilitas lapangan olah raga tersedia (per 10.000 penduduk) di suatu wilayah maka semakin baik aspek jasmani daerah tersebut.

Dan hasil perhitungan memberikan penilaian bahwa skor nilai di berikan terhadap Kota lndragin dalam konteks fasilitas olah raga yaitu mempunyai skor 5 (lima), atau di katakan sebagai kategon sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan jumlah nilai rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa Kota Indragiri layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan

80 % nilai rata-rata. Nilai indikator 5 (lima) memiliki makna bahwa Kota Indragiri layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten) tanpa merugikan kabupaten induk karena di pandang dan sudut fasilitas lapangan olah raga, kabupaten induk maupun kabupaten yang di mekarkan sama-sama dapat mengakomodasi masyarakat yang akan melakukan kegiatan olah raga. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.199
Nilal Variabel Rasio Fasilitas Lapangan Olah Raga per 10.000 penduduk serta Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	a.Wilayah Pemekaran	3.29	90	5
	b.Wilayah Sisa	3.79	103	5
2.	Wilayah Pembanding	3.65	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.5.3 Jumlah Balai Pertemuan

Jumlah balai pertemuan sesuai PP No. 78 tahun 2009 ikut menentukan kelayakan pemekaran daerah baru karena berkaitan dengan penyediaan sarana rapat dan pertemuan dalam rangka musyawarah untuk mufakat pada suatu agenda rapat tertentu. Masyarakat di Kota Indragiri merupakan masyarakat yang tergolong tinggi tingkat permusyawaratannya. Oleh sebab itu indikator yang di gunakan yaitu semakin tinggi rasio sarana balai pertemuan di suatu wilayah maka semakin

baik aspek permusyawaratan daerah tersebut. Rasio fasilitas balai pertemuan per 10.000 penduduk sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan pemekaran daerah baru karena berkaitan dengan kondisi demokrasi yang ada ditengah masyarakat itu sendiri. Masyarakat di Kota Indragiri merupakan masyarakat yang bijak dalam menyelesaikan problematika yang ada. Oleh sebab itu indiaktor yang di gunakan yaitu semakin banyak fasilitas balai pertemuan tersedia (per 10.000 penduduk) di suatu wilayah maka semakin tinggi pelaxanaan musyawarah di daerah tersebut.

Dari hasil perhitungan memberikan penilaian bahwa skor nilai di berikan terhadap Kota Indragiri dalam konteks balai pertemuan yaitu mempunyai skor 5 (lima), atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator Iebih besar atau sama dengan jumlah nilal rata-rata. Nilai indikator 80% memiliki makna bahwa Kota Indragiri layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru. Skor pads kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.200
Nilai Variabel Balai pertemuan Serta Rasionalnya dan Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Jumlah Balai Pertemuan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	326	217	5
	Wilayah Sisa	138	92	5
2.	Wilayah Pembanding	150	100	5

***Sumber :** Data Olahan,2009*

4.10.3.6 Sosial Politik

4.10.3.6.1 Rasio Penduduk yang ikut Pemilu Legislative, yang mempunyai Hak Pilih

Aspek rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan pertisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Kota Indragiri merupakan kabupaten yang tingkat partisipasi politik dalam Pemilu tergolong cukup tinggi dan hal itu sangat baik dalam penciptaan demokrasi lokal. Indikator yang di pergunakan yaitu semakin tinggi partisipasi politik di suatu wilayah maka semakin baik aspek demokrasi lokal daerah tersebut.

Berdasarkan anaiisa di atas maka skor yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam kontex rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau dikatakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata- rata. Nilai indiaktor 80% memiliki makna bahwa Kota Indragiri Iayak di rekomendasikan: menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dad sudut rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar nilai skor 4 (empat) atau di katakan sebagai kategori mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 78%. nilai rata- rata. Nilai indikator 78% memiliki makna bahwa Kota Indragiri layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa mengganggu demokrasi lokal kabupaten induk.

Tabel 4.201
Nilal Variabel rasio Penduduk yang Ikut Pemilu dari Jumlah penduduk yang mempunyai Hak Pilih Serta Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasional Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	0.84	100	5
	Wilayah Sisa	0.66	78	4
2.	Wilayah Pembanding	0.84	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.6.2 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Aspek jumlah organisasi kemasyarakatan sesuai PP No. 78 tahun 2007 ikut menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan penguatan pilar-pilar demokrasi lokal. Organisasi kemasyarakatan merupakan sosial kontrol dan juga kekuatan sinergi pelaxanaan pembangunan daerah. Kota Indragiri merupakan kabupaten yang tingkat partisipasi masyarakat pembangunan cukup tinggi dan hal itu sangat baik dalam percepat pembangunan daerah. Indikator yang di gunakan yaitu semakin tinggi jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan pembangunan daerah tersebut. Berkaitan dengan indikator tersebut maka untuk Kota Indragiri memiliki nilai jumlah organisasi kemasyarakatan sebanyak 915 dengan rasio sebesar 44.396

Berdasarkan analisa di atas skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam konteks jumlah organisasi kemasyarakatan yaitu mempunyai skor 1 (satu) atau di katakan sebagai tidak mampu. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.202
Mail Variabel rasio Organisasi Kemasyarakatan Serta Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	915	33	1
	Wilayah Sisa	2841	90	5
2.	Wilayah Pembanding	2756	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.7 Luas daerah

4.10.3.7.1 Luas Wilayah Keseluruhan

Luas wilayah sangat berperan dalamm menentukan kelayakan dalam daerah otonom baru kerena berkaitan dengan penataan ruang dan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan. Di dalam suatu tata ruang wilayah setidaknya terdapat pola dan ruang dan struktur ruang yang keseluruhan di akomodasi oleh lahan di suatu kabupaten. Oleh sebab itu dengan menggunakan indikator luas wilayah keseluruhan maka Kota Indragiri memiliki nilai luas yaitu 2.995.55 km. Jika di

bandingkan dengan luas wilayah pembanding sekitar 8.424,93 km maka Kota Indragiri sangat layak dimekarkan untuk menjadi daerah otonom baru untuk Iebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 4.203
Nilai Rasio Variabel Luas Wilayah Serta Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Luas Wilayah Keseluruhan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	2.995	35	2
	Wilayah Sisa	7.383	87	5
2.	Wilayah Pembanding	8.424	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Dari tabel di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam konteks luas wilayah keseluruhan yaitu mempunyai skor 2 (dua) atau kategori kurang mampu, namun demikian dari perspektif penataan Wang, semua kepentingan Wang akan terakomodasi dengan luas wilayah 2.995.55 km. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagal kategori sangat mampu.

4.10.3.7.2 Luas Wilayah Efektif yang dapat dimanfaatkan

Luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan berperan menentukan kelayakan daerah otonom baru karena berkaitan dengan peruntukan lahan untuk kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan dan pertahanan keamanan. Ruang wilayah yang dapat di manfaatkan harus mengakomodasikan ruang terbuka hijau, kawasan resapan dan ruang publik. Oleh sebab itu luas

wilayah efektif yang dapat di manfaatkan maka Kota Indragiri memiliki nilai variable yaitu 1.752 km, Sedangkan wilayah sisa setelah pemekaran yaitu seluas 7.383 km, Data tersebut memberikan informasi bahwa di tinjau dari luas wilayah maka Kota Indragiri sangat memungkinkan untuk di mekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu dengan memekarkan Kota Indragiri.

Bila menggunakan analisa di atas maka sekor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam konteks luas wilayah yang dapat di manfaatkan yaitu mempunyai skor 2 atau kategori kurang mampu untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 4.204
Nilai Rasio Variabel Luas Wilayah yang dapat dimanfaatkan Serta Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	1.752	26	2
	Wilayah Sisa	7.383	112	5
2.	Wilayah Pembanding	6.570	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.8 Pertahanan

4.10.3.8.1 Rasio Jumlah Personit Aparat Pertahanan terhadap Luas wilayah

Aspek pertahanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan denagn lingkungan strategi dan juga

integritas bangsa. Kota Indragiri merupakan kabupaten yang berada di sepanjang Selat Malaka dan berbatasan dengan Negara tetangga. Indikator yang dipergunakan yaitu semakin tinggi rasio jumlah aparat pertahanan di suatu witayah maka semakin baik aspek pertahanan daerah tersebut, apalagi bagi daerah di kawasan perbatasan laut dengan Negara tetangga. Berkaitan dengan indikator pertahanan maka Kota Indragiri memiliki nilai variable yaitu 257 dengan rasio sebesar 0.08579 Sementara itu rasio jumlah personil aparat pertahanan di kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil yaitu sebesar 0,000160 Wilayah sisa setetah pemekaran sekitar 0,000171.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam kontex rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap Was wilayah yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai katagori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa niali indikator Iebih besar atau sama dengan 80.% nilai rata-rata. Sedangkan skor di wilayah sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) .atau dikatakan sebagai kategori sagat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80 % memiliki makna bahwa Kota Indragiri selain layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa merugikan kabupaten induk karena di pandang dari sudut jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah untuk lebih jelasnya daaat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.205
Nilail Rasio Variabel Jumlah Personil Aparat Pertahanan Serta Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	0.085790	536	5
	Wilayah Sisa	0.000171	107	5
2.	Wilayah Pembanding	0.000160	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.8.2 Karateristik Wilayah dilihat dart sudut pandang Pertahanan

Karakteristik wilayah di lihat dari sudut pandang pertahanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan dengan strategi pertahanan. Karena Kota Indragiri merupakan kabupaten yang tidak ada berbatasan dengan Negara tetangga sehingga Penanganan wilayah ini tidak akan sangat berbeda dengan wilayah Iainnya. Dilihat dari indikator karakteristik wilayah dari sudut pandang pertahanan, maka untuk kabupatenn Indragiri Hilir memiliki potensi yang lebih strategis.

Dari analisis maka skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragin dalam konteks karaktenstik wilayah di lihat dari sudut pandang pertahanan, yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai katagori sangat mampu untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 4.206
Nilai Rasio Variabel Karakteristik wilayah di lihat clad sudut pandang pertahanan Serta Mail Skor di wilayah Caton Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Karakteristik Wilayah dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan	Rasio Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	Utara berbatasan dengan propinsi lain		5
	Wilayah Sisa	Kepulauan, Laut dan darat, tidak berbatasan dengan Negara lain	-	5
2.	Wilayah Pembanding	Daratan, tidak berbatasan dengan Negara lain	-	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.9 Keamanan

4.4.3.9.1 Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk

Keamanan sangat menentukan kelayakan daerah baru karena berkaitan dengan kenyamanan tinggal, kriminalitas rendah dan keamanan berinvestasi. Semakin tinggi rasio jumlah aparat keamanan maka semakin baik keamanan daerah yang hendak di mekarkan.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam konteks keamanan yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar

atau sama dengan 80 %. Nilai indikator 80 % memiliki makna bahwa Kota Indragiri Iayak di rekomendasikan menja di daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan dengan kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% nilai rata-rata. Nilai indikator 80 memiliki makna bahwa Kota Indragiri Iayak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) tanpa merugikan kabupaten induk karena di pandang mempunyai keamanan yang tinggi.

Tabel 4.207
Nilai rasio Variabel Jumlah personil Aparat KeamananTerhadap Jumlah Penduduk Dan Nilai Skor di wilayahCalon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	0.001330	189	5
	Wilayah Sisa	0.000733	104	5
2.	Wilayah Pembanding	0.000703	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.10 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

4.10.3.10.1 Indeks Pembangunan Manusia

Index Pembangunan Manusia (IPM) yang di turunkan dari variable tingkat pendidikan, kesehatan clan pendapatan adalah

merupakan variable kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM maka semakin balk tingkat kesejahteraan Iebih tinggi yaitu dengan nilai variable rata-rata 72.40. Artinya bahwa index Pembangunan Manusia di wiiayah Kota Indragiri jauh Iebih baik di atas rata-rata.

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam kontex Index Pembangunan Manusia yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilai Indikator 80 memiliki makna bahwa Kota Indragiri layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru) jika di pandang dari sudut Index Pembanguan Manusia. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu, untuk Iebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.208
Nilal Raslo Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Indeks Pembangunan Manusia	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	72.40	107	5
	Wilayah Sisa	67.29	99	5
2.	Wilayah Pembanding	67.58	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.11 Rentang Kendali

4.10.3.11.1 Rata-Rata Jarak Kabupaten/Kota atau Kecamatan ke Pusat Pemerintah (Ibukota Provinsi atau Ibukota Kabupaten/Kota)

Rentang kendali pemerintah di daerah sangat di tentukan oleh jarak dari pusat pemerintah (ibu kota) kepada wilayah sekitar yang di layani. Semakin dekat jarak pelayanan maka akan semakin baik rentang kendalinya, sebaiknya semakin jauh jarak pelayanan maka akan semakin lamban pelayanan. Dalam konteks kelayakan pemekaran bila mana jarak dari pusat ibu kota ke kawasan yang akan di mekarkan, semakin jauh akan semakin layak di mekarkan. Kota Indragiri memiliki jarak yang relative jauh dari ibu kota Kota Indragiri (Tembilahan) yaitu dengan dengan rasio jarak rata-rata 55 km/jam atau 0.88 jam, Sementara itu nilai kabupaten pembanding di daerah sekitar Inhil jarak ke pusat pemerintah rata-rata mempunyai nilai pelayanan sekitar 50 km.

Berdasarkan variabel di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam kontex indikator variabel jarak pelayanan pemerintah yaitu mempunyai skor 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator Iebih besar atau sama dengan 80% nilai rat-rata. Nilai indikator 80 memiliki makna bahwa Kota Indragiri Iayak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru (kabupaten baru). Dengan adanya Kota Indragiri maka jarak ke pusat pemerintahan di kawasan Inhil setelah di mekarkan nih rata-rata menjadi 54 km dengan jarak tempuh sekitar 0.88 jam, sedangkan di wilayah sisa setelah pemekaran memilik nilai yang

sama yaitu dengan skor 5 (lima), artinya setelah Kota Indragiri resmi menjadi daerah otonom tidak mempengaruhi wilayah sebelum pemekaran.

Tabe14.209
Nilai Variabel Jarak Rata-rata Kecamatan Ke Pusat Pemerintah dan Rasionya serta Nilai Skor di wilayah Caion Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan (Ibu Kota Kabupaten/ Kota)	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	54.80	109	5
	Wilayah Sisa	55.66	111	5
2.	Wilayah Pembanding	50.00	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

4.10.3.11.2 Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kabupaten/Kota atau Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Provinsi) atau Kabupatenl Kota)

Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke Ibukota Kota Indragiri akan sangat menentukan efesiensi pelayanan pemerintah bagi wilayah sekitar yang akan dilayani. Semakin pendek waktu perjalanan maka akan semakin efesiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan, sebaiknya semakin lama waktu di tempuh untuk mendapat pelayanan maka akan semakin tidak efesien pelayanan tersebut. Dalam kontex kelayakan pemekaran semakin panjang (lama) maka akan

semakin layak daerah tersebut di mekarkan. Untuk Kota Indragiri (Tembilahan) yaitu dengan nilai variabel rata -rata 0.88 jam,

Berdasarkan analisa di atas maka skor nilai yang di berikan terhadap Kota Indragiri dalam kontex indikator variabel waktu perjalanan ke pusat pemerintah yaitu mempunyai skor 4 (empat) atau di katagori mampu. Hal ini berarti nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60 % nilai rata-rata. Nilai indikator 60 % memiliki makna bahwa Kota Indragiri layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru. Skor pada kabupaten sisa setelah pemekaran mendapat nilai sebesar 5 (lima) atau di katakan sebagai kategori sangat mampu. Hal ini berarti bahwa nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80 % nilai rata-rata. Nilai indiaktor 80 % memiliki makna bahwa Kota Indragiri layak di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru tanpa membuat kabupaten induk (Kab. Inhil) terganggu dengan adanya pemekaran.

Tabel 4.210
Nilai Variabel Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatanke Pusat pemerintah Nilai Skor di wilayah Calon Kota Indragiri

No	Wilayah	Nilai Variabel: Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan	Rasio Nilai Variabel Wilayah Analisis dengan Wilayah Pembandingan	Skor
1.	Wilayah Pemekaran	0.88	79	4
	Wilayah Sisa	1.84	165	5
2.	Wilayah Pembanding	1.11	100	5

Sumber : *Data Olahan,2009*

Untuk Iebih memperjelas dasar kebutuhan dari pemekaran Kota Indragiri, analisis terhadap faktor utama sebagaimana di sajikan pada tabel 4.211 berikut merupakan ringkasan dari 35 indikator sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka akan tergambar informasi yang berguna bagi calon pemimpin daerah ini tentang aspek-aspek apa saja yang hams di tingkatkan kerena secara relatif masih tertinggal dari rata-rata kemampuan kabupaten lain di Provinsi Riau.

Tabel 4.211
Total nilal Indikator Calon Kota Indragiri

No	Indikator	Skor Maksimal	Kota Indragiri	
			Skor	Pencapaian (% dari skor maksimal)
1.	Kependudukan	100	80	80.00
2.	Kemampuan Ekonomi	75	70	93.33
3.	Potensi Daerah	75	62	82.66
4.	Kemampuan Keuangan	75	65	85.33
5.	Sosial Budaya	25	25	100.00
6.	Sosiai polifik	25	17	68.00
7.	Luas Daerah	25	10	40.00
8.	Pertahanan	25	25	100.00
9.	Keamanan	25	25	100.00
10.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	100.00
11.	Rentang Kendali	25	25	100.00
Total		**500**	**429**	**84.30**

Dan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan ekonomi, pertahanan, keamanan, sosil budaya dan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali merupakan aspek yang dominan sebagai dasar pembentukan Kota Indragiri. Letak geografis daerah

ini berbatasan langsung dengan propinsi tetangga juga merupakan daerah kelautan membutuhkan tata administrasi yang lebih balk untuk dapat lebih balk untuk dapat lebih efektif dalam mengambil keuntungan dari posisi strategis ini.[]

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemekaran sesungguhnya adalah wujud harapan masyarakat akan kebaikan kesejaldwam dengan mendekatkan tingkat pelayanan publik dan administrasi. Karena itu di harapkan dengan pemekaran daerah pada masyarakat, dan kegiatan ekonomi menjadi tersebar. Berdasarkan penilaian indikator-indikator sebagaimana diamanahkan oleh PP 78 Tahun 2007, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan 35 sub indikator yang tercantum dalam PP 78 Tahun 2007 rencana pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir menjadi 3 wilayah Administrasi Iayak dan patut direkomendasikan menjadi daerah otonom baru mengingat total skor yang dicapai masing-masing daerah rencana pembentukan daerah otonom baru tersebut melebihi skor batas minimal yang diamanahkan undang-

undang sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah yang mana di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa : Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori skor :

1) Sangat Mampu 420 sld 500 Rekomendasi.
2) Mampu 340 s/d 419 Rekomendasi.
3) Kurang Mampu 260 s/d 339 ditolak.
4) Tidak mampu 180 s/d 259 ditolak.
5) Sangat Tidak Mampu 100 sld 179 ditolak

Untuk Iebih jelasnya dapat dilihat tabeki berikut ini :

Tabel 5.1
Rekapitulasi Skor Indikator
Rencana Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Skor Maksimal	Indragiri Hilir Pasca Pemekaran	
			Skor	Pencapaian (% dari skor maksimal)
1.	Kependudukan.	100	80	80.0
2.	Kemampuan Ekonomi.	75	75	95.0
3.	Potensi Daerah.	75	67	87.0
4.	Kemampuan Keuangan.	75	65	86.6
5.	Sosial Budaya.	25	23	92.0
6.	Sosiai polifik	25	19	76.0
7.	Luas Daerah.	25	18	72.0
8.	Pertahanan.	25	25	100.0
9.	Keamanan.	25	25	100.0
10.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.	25	25	100.0
11.	Rentang Kendali.	25	25	100.0
Total		**500**	**437**	**88.87**

No	Indikator	Skor Maksimal	Indragiri Selatan	
			Skor	Pencapaian (% dari skor maksimal)
1.	Kependudukan.	100	85	85.0
2.	Kemampuan Ekonomi.	75	75	100.0
3.	Potensi Daerah.	75	65	87.3
4.	Kemampuan Keuangan.	75	70	95.3
5.	Sosial Budaya.	25	23	92.0
6.	Sosiai polifik	25	11	44.0
7.	Luas Daerah.	25	9	36.0
8.	Pertahanan.	25	25	100.0
9.	Keamanan.	25	25	100.0
10.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.	25	25	100.0
11. 11.	Rentang Kendali.	25	25	100.0
Total		**500**	**438**	**89.9**

No	Indikator	Skor Maksimal	Kota Indragiri	
			Skor	Pencapaian (% dari skor maksimal)
1.	Kependudukan.	100	80	80.00
2.	Kemampuan Ekonomi.	75	70	93.33
3.	Potensi Daerah.	75	62	82.66
4.	Kemampuan Keuangan.	75	65	85.33
5.	Sosial Budaya.	25	25	100.00
6.	Sosiai polifik	25	17	68.00
7.	Luas Daerah.	25	10	40.00
8.	Pertahanan.	25	25	100.00
9.	Keamanan.	25	25	100.00
10.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.	25	25	100.00
11.	Rentang Kendali.	25	25	100.00
Total		**500**	**429**	**84.30**

2. Bahwaberdasarkanhasilkajiandenganmempertimbangkan beberapa faktor dalam penentuan ibu kota Kabupaten pada masing-masing wilayah rencana pemekaran dapat

ditarik kesimpulan bahwa untuk Ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir Pasca pemekaran di Rekomendasikan di Mandah, Ibukota Kabupaten Indragiri Selatan di Rekomendasikan di Kecamatan Kemuning, sedangkan untuk Ibukota Kota Indragiri di Rekomendasikan di Kota Tembilahan, mengingat ke Tiga masing-masing wilayah ini memiliki kelebihan tersendiri dibanding daerah-daerah lainnya.

5.2 Sarana dan Implikasi Kebijakan

Dari hasil analisis dan kesimpulan, dapat di sarankan hal-hal berikut:

1. Usulan pemekaran/pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi 3 wilayah Administrasi harus terus di perjuangkan untuk memenuhi aspirasi dan keinginan masyarakat setempat agar pelayanan publik menjadi lebih balk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk itu, karena studi hanya memberikan rekomendasi dari aspek penilaian secara teknis, maka usulan pemekaran selanjutnya di lengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan fisik kewilayahan yang sejatinya sudah terpenuhi.
3. Analisis terhadap setiap indikator utama memberikan informasi yang balk bagi calon pemimpin daerah ini tentang aspek-aspek apa saja yang harus di tingkatkan karena secara relatif masih tertinggal dari rata-rata kemampuan kabupaten lain di provinsi Riau. Dad perhitungan skor

kelayakan terlihat bahwa aspek kemampuan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali merupakan aspek yang dominan sebagai dasar pembentukan Rencana Pemekeran Kabupaten Indragiri Hilir menjadi 3 wilayah administrasi. Letak geografis daerah ini yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan juga merupakan daerah kelautan membutuhkan tata administrasi yang lebih balk untuk dapat Iebih efektif dalam mengambil keuntungan dan posisi strategis ini. Sedangkan penilaian dari indikator utama yang lain menunjukkan bahwa potensi Indragin Hilir secara relatif masih lebih rendah dari kota-kota daerah kabupaten di Riau, tetapi masih di anggap mampu. Hal ini justru menjadi tantangan bagi calon pemerintah kabupaten baru ini untuk lebih memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas.

4. Pemenntah baru yang akan di bentuk di Kabupaten Indragiri Hilir nantinya harus menyadan bahwa pembangunan. ketiga wilayah administrasi tersebut tidak bisa bergantung pada sumber daya alam terutama di dalam jangka panjang. Oleh karena itu usaha untuk menjaga kesinambungan pembangunan harus di tompang pembangunan berbasis sumber daya manusia. Ada dua hal yang hares di perhatikan di dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.[]

DAFTAR PUSTAKA

Akita, Takahiro (1992), Sources of Regional Economics Growth in Japan: A Case of Hokkaido Perfecture Between 1970-1985, Journal of Input Output Analysis, No. 1. 1992.

Bowman, M and Hampton, W., (1983). Local Democracies: A Study in Comparative Local Government, Melbourne: Longman.

Cheema, G. Shabbir, et al., (1983), Implementing Decentralization Policies: An Introduction, dalam G. Shabbir Cheema (ed), (1983), Decentralization and Development: Policies Implementation in Developing Countries (London: Sage Publications).

Cochrane, Glynn, (1983), Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries (Hew York: World Bank).

Davey, Kenneth, (1983) Financing Regional Government (Chichester: John Wiley &Sons)."

Devas, Nick, (1989), Financing Local Government in Indonesia (Ohio University Center for International Studies: Monograph in International Studies).

Kuncoro, Mudrajad, Political Economy of Decentralization In Indonesia: Toward Cultivating the Grassroots?"dalam The Indonesian Quarterly XXI/3.

Kuznets, Simon (1976), Demographics Aspects of The Size Distribution of Income: An Exploratory Essay, Journal of Economic Development and Cultural Change 25 (1), 1976.

Legge, J.D., (1961), Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: a Study in Local Administration 1950-1960, (New York: Cornell University Press).

Leemans, A. F., (1970), Changing Patterns of Local Government, The Hague: IULA.

Loughlin, M, (1986). Local Government in the Modem State, London: Sweet and Maxwell.

Mahan, Bagir, (1996), Politik Hukum Otonomi Daerah Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemen'ntahan Daerah, dalam Martin Hutabarat, et. al. Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Harapan).

Maddick, H., (1983), Democracy, Decentralisation,, and Development, Bombay: Asian Publishing House.

Mawhood, Philip, (1983), "Decentralization: the Concept and the Practice, dalam Philip Mawhood, ed, (1983), Local Government in the Third World, (Chichester: John Willey & Sons).

Osborne, David., dan Ted Gaebler, (1995), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, (Terjemahan: Abdul Rosyid), Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo).

Rondinelli A. Dennis, et al., (1983), Decentralization in Developing Countries: ARiview of Recent Experience, (New York: World Bank).

Sidik, Machfud, (1994), "Hubungan Keuangan Pusat/Daerah", dalam Center for Development Studies Bulletin Triwulanan, No. 1 Tahun 1,1994.

Smith, Brian C, (1985), Decentralization: The Territorial Dimension of the State, (Hamstead: George Allen & Unwin).

Tambunan, Tulus (1996), Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Urata, S. (1987), Sources of Economic Growth and Structural Change in China 1951-1981, Journal of Comparative Economics, No. 11, 1997.

World Bank, (1988), Indonesian Selected Issues of Public Resources Management (New York: World Bank Report No. 7007-Ind).

World Bank, (1988), World Development Report (Oxford: Oxford University Press).

…………, (2008), Propinsi Riau Dalam Angka Tahun 2008 (Pekanbaru:

Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Propinsi Riau).

…………, (2009), Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka Tahun 2009 (Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir).

LAMPIRAN

PETA RENCANA KOTA INDRAGIRI

PETA RENCANA KABUPATEN INDRAGIRI SELATAN
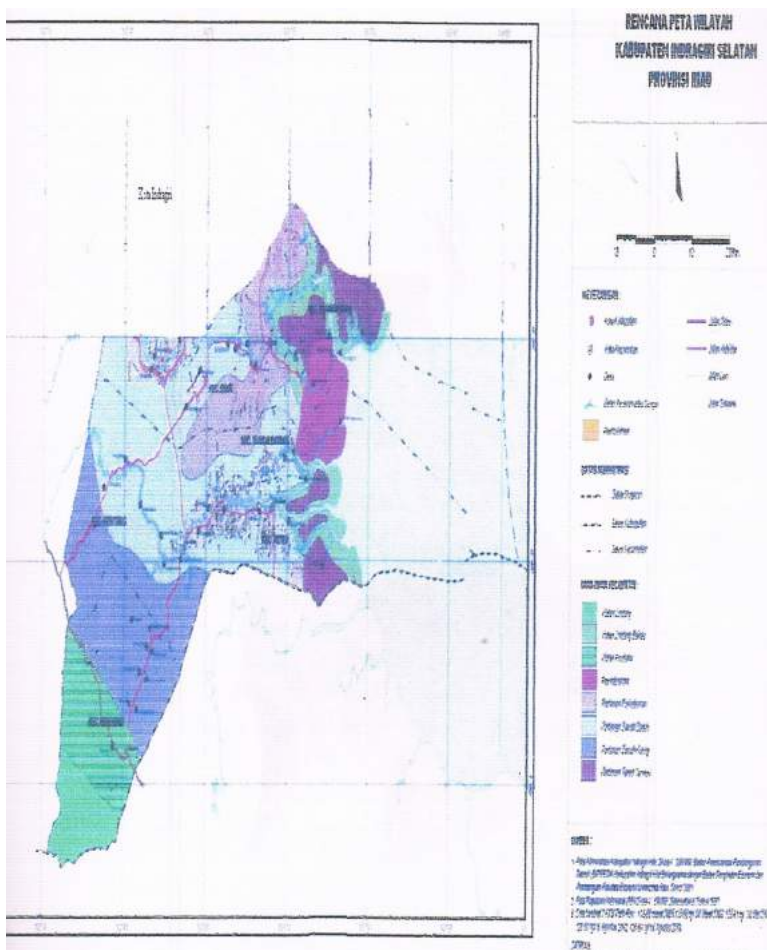
PETA RENCANA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PASCA PEMEKARAN
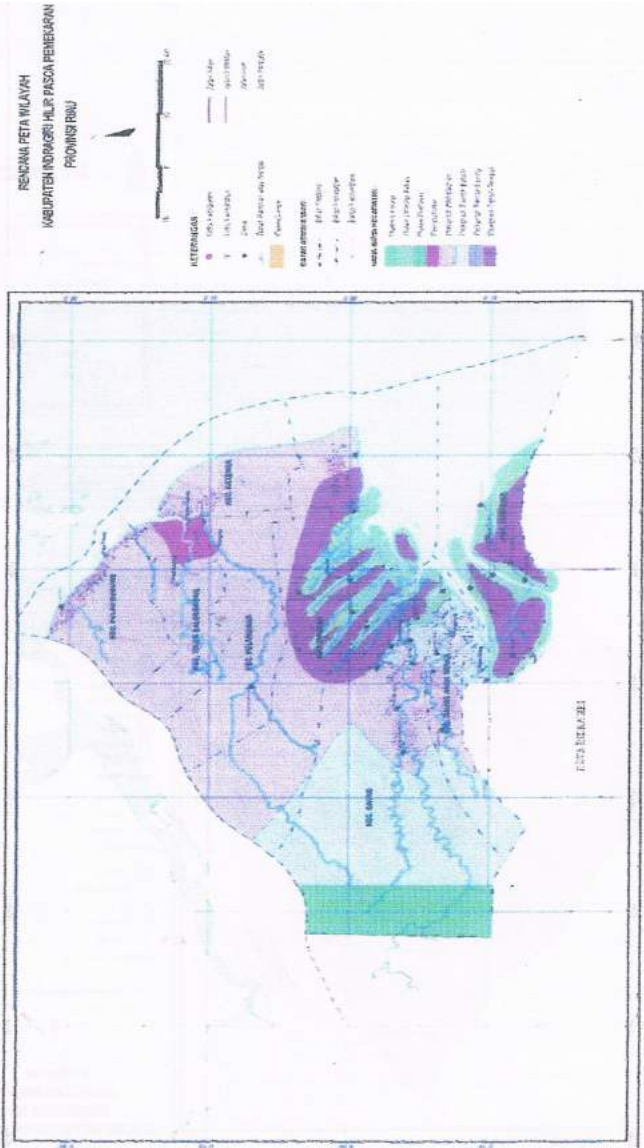
PETA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
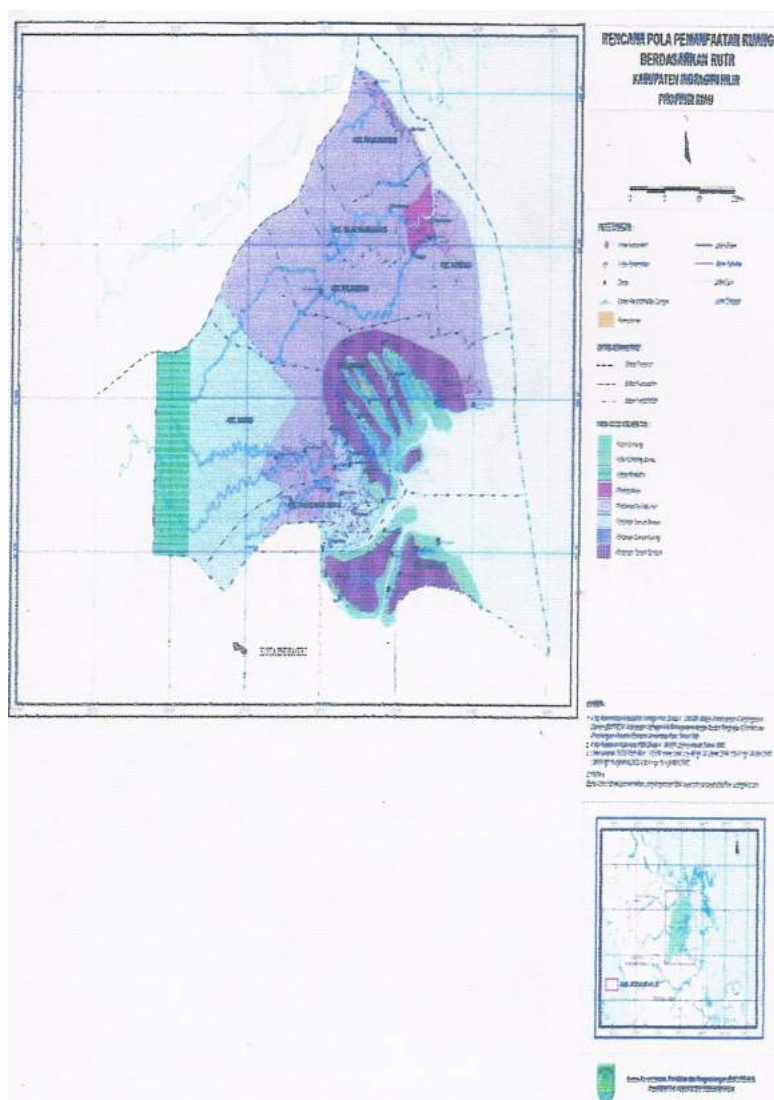
LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI

Nahdlatul Ulama

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D. Lahir di Teluk Pinang, Gaung Anak Serka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 29 Desember 1966, adalah sosok seorang pemimpin yang memiliki Komitmen tinggi serta mempunyai kemampuan dalam mengelola Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam Bidang Manajemen ia juga memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) dari Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" Jakarta, sedangkan gelar Doktor (S-3) ia peroleh dari Universitas Utara Malaysia, Kedah Kuala Lumpur.

Di luar kesibukannya dalam menjalankan roda Pemerintahan, Indra Muchlis Adnan menjadi Dosen di beberapa Universitas di Jakarta dan Riau, serta menjadi Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh para pengusaha, akademisi, birokrat, pemuda, mahasiswa dan para santri.

Pengalaman dalam berbagai Organisasi mencatat, ia pernah aktif sebagai Sekretaris dan Ketua DPD KNPI RIAU, Pengurus DPP KNPI, Pengurus DPP AMPI dan Ketua Umum AMPI RIAU, Pengurus DPD Partai Golkar Riau dan saat ini Menjadi Ketua Umum DPD Partai Golkar RIAU, Jabatan Ketua Umum lainnya yang pernah dan sedang diemban adalah Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi Riau, Ketua Umum BPD GAPENSI Riau, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Riau, Ketua KADINDA Riau, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Riau dan Ketua APKASI/BKKKS, serta Pengda PSSI RIAU.

Dalam bidang Politik, Sejarah mencatat Indra Muchlis Adnan pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2003, dan pernah diberi kepercayaan rakyat menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir selama dua periode untuk masa jabatan tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H, M. Si. Lahir di Pulau Cawan, Mandah, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 12 Februari 1967. Gelar Sarjana Hukum Ketatanegaraan (S-1) Tahun 1985-1989 diraihnya di Universitas Islam Riau Pekanbaru, Magister Administrasi Publik (S-2) Tahun 1992-1994 dan Doktor Ilmu Administrasi (S-3) Tahun 1997-2001 diraihnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Hingga saat ini bekerja sebagai Dosen dan Guru Besar Tetap FISIP Universitas Islam Riau, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana UNRI, dan Dosen Pascasarjana Universitas Surapati Jakarta. Jabatan yang di emban saat ini sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UIR dan Direktur Pascasarjana Kerjasama UIR-UNPAD.

Selain mengajar aktif juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau adalah ketua dan peneliti pada Pusat Penelitian Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (P2OD & PM) Universitas Islam Riau, Anggota Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Gubernur Riau (TPK2 GUBRI) Tahun 2003-2008, Staf Ahli Konsultan The Institute for Decentralization and Development Studies (InDDeS), Staf Ahli Peneliti pada Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), anggota Advocat dan Konsultan Hukum (AAI). Ia juga aktif menulis di berbagai media cetak.

ISBN 978-602-0992-36-5

9 786020 992365

Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 0821 34 797 663
email: one_trussmedia@yahoo.com